

Bela Negara: Perspektif Teoretik dan Praksis

# BELA NEGARA

## Perspektif Teoretik dan Praksis



**Penulis:**

Djuni Thamrin  
Diah Ayu Permatasari  
Indah Pangestu Amaritasari  
Aly Ashghor

**Editor:**

Hermawan Sulistyono

Konsep Bela Negara beranjak dari pemikiran klasik mengenai negara-bangsa (*nation-state*). Negara-bangsa modern didominasi oleh ide-ide dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian Westphalia (Westphalen). Gagasan mengenai negara-bangsa adalah syarat tentang keabsahan dan eksistensi sebuah negara-bangsa—wilayah dan pengakuan kedaulatan dari negara lain.

Konsep negara-bangsa kemudian memasuki sejarah modern dengan kedaulatan yang diatur dalam hukum internasional. Perjanjian Westphalia telah menguatkan konsep pertahanan nasional, memberikan dasar hukum kepada negara untuk mempertahankan diri dari ancaman eksternal, juga menjadi dasar bagi pengembangan militer.

Selain hal tersebut, buku ini juga membahas tentang konsep keamanan non-tradisional dan ancaman non-militer, termasuk konteks ancaman yang bersifat lebih kompleks pada era *post truth*. Buku ini juga membahas peran bela negara secara konkret yang dapat ditumbuh-kembangkan melalui pelaksanaan Tridharma di lembaga pendidikan. Diharapkan lahir generasi yang berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Semoga buku ini memberi dampak positif bagi khalayak umum.



**Ubhara Jaya Press**  
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya  
Bekasi Utara, Jawa Barat 17121  
tel: (021) 88955882, 88955883



# BELA NEGARA

Perspektif Teoretik dan Praksis

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014**  
**Tentang Hak Cipta**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **BELA NEGARA**

## **Perspektif Teoretik dan Praksis**

### **Pengarah:**

Irijen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM

### **Editor:**

Prof. (Emeritus Research) Hermawan Sulistyono, Ph.D

### **Penulis:**

Djuni Thamrin

Diah Ayu Permatasari

Indah Pangestu Amaritasari

Aly Ashghor

Ubhara Jaya Press

2024

## **BELA NEGARA**

### **Perspektif Teoretik dan Praksis**

Copyright © 2024, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

xiv + 196 hlm.; 14,5 x 21 cm

ISBN 978-623-6331-24-8

Pengarah: Bambang Karsono

Editor : Hermawan Sulistyو

Penulis : Djuni Thamrin

Diah Ayu Permatasari

Indah Pangestu Amarithasari

Aly Ashghor

Editor Bagian : Sumarno

Supriadi

Proofreader: Ika Prabandini Ariasningsih

Desain Sampul dan tata letak: Supriadi

### **Penerbit**

Ubhara Jaya Press

Jln. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara - Jawa Barat 17121

Phone: +62 21 88955882; Fax: +62 21 88955871

Email: [penerbit-ubj@ubharajaya.ac.id](mailto:penerbit-ubj@ubharajaya.ac.id)

Website: [ubj-press.ubharajaya.ac.id/](http://ubj-press.ubharajaya.ac.id/)

Cetakan pertama, Mei 2024

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

## PENGANTAR

Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM  
*Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*

**B**ELA Negara merupakan konsep yang melibatkan sejumlah nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara. Prinsip ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menekankan bahwa pelaksanaan Bela Negara harus dilakukan melalui pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing individu. Dengan demikian konsep bela negara tidak perlu dipersempit sebagai wajib militer.

Beberapa negara “menerjemahkan” Bela Negara dengan bobot yang lebih condong pada kewajiban warga negara dalam urusan pertahanan melalui wajib militer. Mereka mengikatnya dengan undang-undang, sehingga berkekuatan hukum yang mengikat warganya untuk turut serta dalam bela negara melalui program wajib militer. Beberapa negara yang menerapkan wajib militer di antaranya: Israel, Singapura, Korea Selatan, Yunani, Turki, Norwegia, Swiss, dan Finlandia yang menerapkan wajib militer.

Amerika Serikat pernah menerapkan wajib militer, tetapi mencabutnya pasca Perang Vietnam. Petinju legendaris Muhammad Ali alias Cassius Clay yang menolak menjalani

wajib militer saat Perang Vietnam, harus membayar “mahal”. Sebagai juara dunia tinju, Ali dilarang bertanding selama beberapa tahun. Ali baru bisa “menari-nari” di atas ring tinju profesional pada tahun 1971, setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan vonis Ali. Keputusan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Ali telah disertifikasi sebagai penolak wajib militer berdasarkan keyakinan agamanya yang sah.

Perspektif dan spektrum bela negara bagi Indonesia lebih luas dari membela negara dengan mengangkat senjata. Justru dengan spektrum yang lebih luas tersebut, semua kalangan dan profesi punya kesempatan luas untuk mengejawantahkan Bela Negara sesuai dengan bidang profesinya.

Pandemi Covid-19 menjadi *blessing in disguise* bagi dua ilmuwan muda Indonesia untuk terlibat dalam pembuatan vaksin AstraZeneca di Oxford University, Inggris. Carina Citra Dewi Joe dan Indra Rudiansyah, turut andil dalam pengembangan vaksin pada proyek riset vaksin Covid-19 yang dipimpin Profesor Vaksinologi University of Oxford, Sarah Gilbert.

Prof Dr Mezak Arnold Ratag, ilmuwan asal Malang, Jawa Timur yang menemukan lebih dari 100 buah nebula planeter baru. Dia membuat bangga Ibu Pertiwi. Jamak kalau kemudian namanya diabadikan di 120 Planetary Nebula Cluster, seperti Ratag-Zijlstra-Pottasch-Menzies dan Ratag-Pottasch cluster.

Ilmuwan asal Pekalongan, Jawa Tengah, Dr Joe Hin Tjio, melambungkan nama Indonesia setelah menemukan fakta jumlah kromosom dalam tubuh manusia. Setiap manusia memiliki kromosom 46 buah atau 23 pasang kromosom yang memiliki milyaran DNA.

Di dunia dirgantara, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie mengharumkan Indonesia. Teori *crack propagation*, yang memberikan solusi bagaimana mendeteksi rambatan kerusakan konstruksi pada badan pesawat. Habibie juga sukses rancang-bangun Pesawat N-250 Gatotkaca. Pesawat yang dikembangkan mulai akhir 1980-an itu, akhirnya mengangkasa untuk kali pertama pada 10 Agustus 1995.

Sejumlah atlet sukses menggetarkan arena olahraga dengan bergelornya lagu Indonesia Raya saat mengiringi Merah Putih dikerek sebagai penanda capaian raihan prestasi puncak dengan medali emas. Sederet atlet itu adalah Susi Susanti, Alan Budikusuma, Taufik Hidayat, Ricky Subagja/Rexy Mainaky, Candra Wijaya/Tony Gunawan, Taufik Hidayat, Hendra Setiawan/Markis Kido, Liliyana Natsir/Tontowi Ahmad, Greysia Polii/Apriyani Rahayu (cabang olahraga bulu tangkis), serta Eko Yuli Irawan dan Windy Cantika Aisah (angkat berat).

Beberapa contoh tersebut memberi gambaran betapa spektrum untuk “mengespresikan” bela negara sangat luas. Sangat terbuka untuk semua profesi. Inilah yang perlu ditanam-pahamkan kepada para mahasiswa di perguruan tinggi kita. Program Bela Negara di perguruan tinggi kita selain didasarkan pada Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, juga diperkuat dengan kesepakatan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memberikan keleluasaan bagi setiap perguruan tinggi untuk mengintegrasikan Bela Negara dalam Tridarma. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menambahkan komponen bela negara dalam MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk memfokuskan diri pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan tujuan

perbaikan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional.

Bela negara pada konteks profesi menjadi penting, karena mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja kelak. Perguruan tinggi diharapkan bukan hanya sebagai tempat mencetak lulusan yang kompeten secara profesional, tetapi juga menjadi wadah dalam membentuk pribadi berkarakter yang memiliki integritas terhadap bangsa dan negaranya.

Dalam mendukung pendidikan bela negara, setiap perguruan tinggi mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sesuai dengan kebijakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (LLDikti III) Jakarta, maka semua perguruan tinggi di Jakarta berkewajiban menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Bela Negara, dengan mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Hal tersebut menjadi pedoman bagi setiap perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program pembinaan karakter, penguatan revolusi mental, dan persiapan mahasiswa menghadapi berbagai ancaman. Melalui pelatihan bela negara, mahasiswa diarahkan untuk membentuk karakter yang disiplin, kerja sama, dan tanggung jawab, serta menjadi pionir dalam menanggapi berbagai tantangan modern seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan ekstrem, paham radikalisme, separatisme, bencana alam, konflik antar mahasiswa, dan penyebaran penyakit menular.

Buku Bela Negara ini hadir dengan semangat untuk memberikan pandangan yang komprehensif mengenai pentingnya

bela negara melalui profesi masing-masing. Semoga buku ini menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi mahasiswa dan sivitas akademika lainnya di berbagai perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan, sambil tetap memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan ketahanan nasional secara keseluruhan.

Jakarta, Februari 2024



# DAFTAR ISI

PENGANTAR:	
Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	v
I. NEGARA-BANGSA DAN KEBUTUHAN BELA NEGARA	1
1.1. Definisi dan Karakteristik Negara-Bangsa	6
1.2. Sejarah dan Perkembangan Konsep Negara-Bangsa di Indonesia	14
1.3. Keberagaman Budaya, Agama, Dan Etnis dalam Konteks Negara-Bangsa	20
1.4. Kedaulatan dan Integritas Negara-Bangsa	21
1.5. Ancaman terhadap Integritas dan Kedaulatan Negara-Bangsa	34
1.6. Konsep Bela Negara	38
1.7. Dasar Hukum Bela Negara	41
1.8. Kebutuhan Bela Negara dalam Konteks Negara-Bangsa	42
1.9. Peran Bela Negara dalam Menjaga Kedaulatan dan Integritas	46
1.10. Urgensi Bela Negara	49

1.11. Tantangan dan Peluang	55
1.12. Relevansi Bela Negara dalam Konteks Global	58
II. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNASIONAL:GLOBAL DAN REGIONAL	61
2.1. Perubahan Demografi	63
2.2. Geopolitik Multipolar	67
2.3. Geoekonomi: Fragmentasi Perekonomian	75
III.. LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL DAN LOKAL	83
3.1. Ketahanan di Dunia Baru	89
3.2. Lingstra Daerah	90
3.3. Faktor Saintek	92
IV. ANCAMAN DAN RESPON NEGARA REPUBLIK INDONESIA	97
4.1. Ancaman	98
4.2. Respon Negara Republik Indonesia	120
V. IMPLEMENTASI BELA NEGARA DI PERGURUAN TINGGI	135
5.1. Bela Negara dalam Konteks Pendidikan	139
5.2. Tanggung Jawab terhadap Pembentukan Karakter Bangsa	141
5.3. Peran Mahasiswa sebagai Intelektual Muda	143
5.4. Pengintegrasian Konsep Bela Negara	144
5.5. Tantangan Global dan Peran Perguruan Tinggi	146

5.6. Universitas dapat Membentuk Pusat Kajian Bela Negara yang Dinamis	149
5.7. Beberapa Arena Strategis Pusat Kajian Bela Negara di Perguruan Tinggi	150
5.8. Relevansi Perguruan Tinggi Membangun Pusat Kajian Bela Negara	153
5.9. Manfaat dan Dampak Pusat Kajian Bela Negara untuk universitas	155
5.10. Manfaat untuk Mahasiswa	156
5.11. Dampak pada Masyarakat dan Negara	158
5.12. Bela Negara dan Pengembangan Kurikulum	164
5.13. Bela Negara dalam Pengembangan Ilmu dan Bidang Hukum	167
5.14. Bela Negara dalam Bidang Ilmu dan Bidang Teknik	169
5.15. Bela Negara dalam Ilmu dan Bidang Ekonomi dan Bisnis	170
5.16. Bela Negara dalam Bidang Ilmu Komunikasi	172
5.17. Bela Negara dalam Ilmu dan Bidang Psikologi	173
5.18. Bela Negara dalam Bidang Ilmu Pendidikan	174
5.19. Bela Negara dalam Bidang Ilmu Komputer	174
DAFTAR PUSTAKA	177
INDEKS	189
TENTANG PENULIS DAN EDITOR	193



# I

## NEGARA-BANGSA DAN KEBUTUHAN BELA NEGARA

**N**EGARA-BANGSA (*nation-state*) muncul setelah Perjanjian Westphalia ditandatangani pada tahun 1648. Sebelum Perjanjian Westphalia, konsep negara-bangsa yang kita kenal saat ini belum ada. Pada masa itu, dunia diperintah oleh sistem feodal, di mana kekuasaan tersebar di antara berbagai monarki, kekaisaran, dan otoritas feodal. Konsep wilayah dan kedaulatan modern belum ada. Pembagian politik didasarkan pada wilayah geografis, agama, dan hubungan pribadi antar penguasa. Batas negara dan identitas nasional belum ada, masyarakat lebih banyak terikat dengan komunitas lokal, suku, dan agama.

Perjanjian Westphalia menjadi tonggak penting dalam sejarah modern, karena menciptakan sistem negara-negara berdaulat yang diatur oleh hukum internasional. Ini juga menandai awal munculnya konsep negara-bangsa. Perjanjian ini mengakui kedaulatan setiap negara dan menetapkan batas-batas wilayah yang diakui secara internasional. Konsep negara-bangsa muncul di Eropa sebagai tanggapan terhadap perang agama yang menghancurkan benua itu selama satu abad. Setiap negara dianggap sebagai “bangsa” yang berdaulat dan memiliki wilayah, populasi, pemerintahan, dan hukum yang berlaku.

Perjanjian Westphalia memiliki sumbangan penting terhadap perkembangan paham negara-bangsa (*nation-state*) dan konsep bela negara (*national defense*). Dalam perjanjian ini, setiap negara dianggap sebagai “bangsa” yang memiliki hak kedaulatan—hak untuk mengatur urusan dalam wilayah mereka tanpa campur tangan eksternal. Hal ini menguatkan konsep negara-bangsa sebagai entitas politik yang independen dan memiliki wewenang atas wilayah dan penduduknya. Inilah awal munculnya konsep negara-bangsa yang menjadi dasar bagi negara-negara modern.

Perjanjian Westphalia memberi cek kepada pemerintah untuk memainkan peran sentral dalam mengontrol wilayahnya. Ini mengarah pada konsep negara-bangsa yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat untuk menjalankan kekuasaan dan otoritas atas penduduk dan wilayahnya. Konsep ini menjadi dasar bagi struktur pemerintahan negara-negara modern yang mengatur, melindungi, dan melayani warganya.

Perjanjian Westphalia juga memperkuat konsep pertahanan nasional atau bela negara. Dengan mengakui kedaulatan negara, perjanjian ini memberikan dasar hukum untuk negara-negara mempertahankan diri dari ancaman eksternal. Ini menciptakan dasar bagi pengembangan militer dan konsep pertahanan nasional, yang merupakan bagian integral dari konsep negara-bangsa. Negara-negara modern memiliki kebijakan pertahanan nasional dan militer untuk melindungi kedaulatan dan keamanan mereka.

Dengan demikian, Perjanjian Westphalia memainkan peran sentral dalam pembentukan dan penguatan konsep negara-bangsa, mencakup kedaulatan, pemerintahan pusat, dan pertahanan nasional. Konsep ini menjadi dasar bagi

negara-negara modern dalam urusan internal dan eksternal mereka, serta melindungi kepentingan nasional mereka.

Negara-bangsa adalah suatu bentuk organisasi politik yang didasarkan pada identitas bersama dalam hal budaya, bahasa, sejarah, dan nilai-nilai yang mempersatukan penduduknya. Konsep ini muncul sebagai hasil dari evolusi politik dan sosial yang melibatkan proses pembentukan negara yang sejalan dengan pembentukan identitas nasional. Esensinya, negara-bangsa mencerminkan gagasan bahwa suatu entitas politik seharusnya mencerminkan satu kelompok etnis atau budaya tertentu.

Negara-bangsa umumnya terbentuk melalui beberapa tahap. *Pertama*, masyarakat berkembang dan membentuk komunitas berdasarkan faktor-faktor seperti budaya, bahasa, dan sejarah bersama. Proses ini sering melibatkan pembentukan identitas kolektif yang kemudian menjadi dasar bagi gagasan negara-bangsa. *Kedua*, seiring waktu, entitas politik muncul sebagai respons terhadap kebutuhan administratif dan keamanan. Pembentukan negara melibatkan pembagian wilayah, penentuan batas-batas administratif, dan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan.

Negara-bangsa juga mencakup ideologi nasionalisme, yang menekankan pentingnya kesatuan budaya dalam menciptakan entitas politik yang kokoh. Nasionalisme dapat muncul sebagai kekuatan yang mendorong kemerdekaan dari kekuasaan luar atau sebagai faktor penyatuan suatu negara. Selain itu, bahasa menjadi elemen kunci dalam pembentukan identitas nasional, karena berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempersatukan masyarakat.

Salah satu contoh negara-bangsa yang sering dikutip adalah Jerman pada abad ke-19. Sebelum penyatuan Jerman pada 1871, wilayah ini terdiri dari berbagai negara kecil yang berbeda-beda. Proses penyatuan ini dipimpin oleh Otto von Bismarck dan melibatkan perang melawan Prancis yang akhirnya menghasilkan pembentukan kekaisaran Jerman. Sentimen nasionalisme Jerman dan persatuan etnis menjadi pendorong utama di balik pembentukan negara-bangsa ini.

Namun, negara-bangsa tidak selalu mencerminkan kenyataan politik di seluruh dunia. Beberapa negara memiliki keragaman etnis dan budaya yang tinggi. Mereka mungkin mencari cara untuk mengakomodasi identitas yang berbeda-beda. India adalah contoh negara dengan keragaman etnis dan budaya yang luar biasa. Konsep negara-bangsa di India lebih kompleks karena melibatkan berbagai kelompok etnis, bahasa, dan agama.

Kritik terhadap konsep negara-bangsa muncul dari perspektif globalisasi dan multikulturalisme. Beberapa berpendapat bahwa fokus pada satu identitas budaya dapat menjadi sumber konflik dan ketidaksetaraan di dalam suatu negara. Dalam dunia yang semakin terhubung, di mana migrasi dan pertukaran budaya menjadi semakin umum, beberapa negara mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga konsep negara-bangsa mereka.

Selain itu, menjadi catatan bahwa negara-bangsa adalah suatu model ideal dan bahwa implementasinya dapat bervariasi secara signifikan di berbagai konteks. Beberapa negara mungkin mencapai tingkat kesatuan budaya yang tinggi, sementara yang lain mungkin mengadopsi model yang lebih inklusif. Kesuksesan suatu negara-bangsa dalam menciptakan identitas nasional yang kuat kerap tergantung pada sejauh

mana masyarakat dapat mengelola dan menghormati keragaman internalnya.

Dalam konteks Indonesia—Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—negara-bangsa adalah rumah bagi berbagai suku bangsa. Konsep negara-bangsa ini penting dalam memahami bagaimana suatu negara dapat berfungsi sebagai wadah bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, negara-bangsa adalah entitas politik yang memungkinkan suatu bangsa untuk bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Namun konsep negara-bangsa tidak selalu berarti bahwa semua orang dalam suatu negara memiliki identitas budaya, sejarah, atau bahasa yang sama. Sebaliknya, banyak negara-bangsa, termasuk Indonesia, adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Meskipun demikian, semua warga negara di negara-bangsa tersebut dapat bersatu dalam mencapai tujuan bersama negara.

Dalam perkembangan kontemporer, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, telah mengubah konsep negara-bangsa dalam beberapa cara. Batas-batas negara “nyaris” tidak memiliki arti sejauh transfer informasi, perdagangan, dan hubungan manusia. Di era digital, orang dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu dan komunitas di seluruh dunia tanpa kendala geografis. Negara-negara akhirnya dihadapkan pada tantangan baru yang timbul akibat globalisasi teknologi.

Namun, negara-bangsa masih mempertahankan perannya dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan regulasi dalam konteks global yang terus berubah. Negara-negara sering berusaha mengatur dan mengontrol internet dan teknologi lainnya untuk memastikan keamanan nasional mereka.

Meskipun batas-batas geografis mungkin kurang relevan dalam beberapa aspek, negara-bangsa masih merupakan entitas hukum yang diakui secara internasional yang memiliki tanggung jawab terhadap warganya.

Dengan kata lain, konsep negara-bangsa telah berubah dan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, memainkan peran penting dalam politik global, kebijakan, dan hukum internasional. Teknologi telah menciptakan tantangan baru dan membuka peluang baru dalam hubungan antar negara. Meskipun demikian, negara-negara tetap sebagai entitas yang menjalankan peran pemerintahan, melindungi warganya, dan mempertahankan kedaulatan mereka.

## **1.1. Definisi dan Karakteristik Negara-Bangsa**

Anthony D. Smith<sup>1</sup> dan Benedict Anderson<sup>2</sup> adalah dua sarjana dalam studi konsep negara-bangsa dan nasionalisme. Konsep pertama dari Anthony D. Smith, mengembangkan konsep nasionalisme etnis. Menurutnya, negara-bangsa adalah hasil dari hubungan antara etnisitas dan nasionalisme. Definisinya tentang negara-bangsa mencakup:

*Etnisitas sebagai elemen kunci.* Smith berpendapat bahwa etnisitas merupakan elemen kunci dalam pembentukan negara-bangsa. Etnisitas mencakup kesamaan budaya, bahasa, agama, dan sejarah bersama di antara kelompok tertentu. Dalam konteks ini, etnisitas tidak hanya merujuk pada aspek

---

<sup>1</sup> Anthony D. Smith, *The Ethnic Origins of Nations* (Oxford: Blackwell Publishing, 1986).

<sup>2</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Revised (London - New York: Verso, 1991).

genetis, tetapi juga mencakup aspek-aspek budaya yang membedakan satu kelompok dari yang lain. Misalnya, bahasa yang digunakan oleh kelompok tersebut bisa menjadi ciri khas etnisitas.

Sebagai contoh, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis berbeda—Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan lain sebagainya. Setiap kelompok etnis ini memiliki bahasa, budaya, dan tradisi unik mereka sendiri. Etnisitas mereka memainkan peran penting dalam membentuk identitas kelompok dan membedakan satu kelompok dari yang lain. Bahasa yang berbeda, adat istiadat, dan tradisi agama menjadi ciri khas etnisitas mereka.

Dalam konteks kontemporer, generasi Z (Gen-Z) tumbuh dalam masyarakat yang multikultural dan global. Mereka mungkin berasal dari latar belakang etnis yang beragam, dan etnisitas tetap menjadi bagian penting dari identitas mereka. Pandangan Smith tentang kesamaan budaya, bahasa, agama, dan sejarah masih relevan dalam menjelaskan bagaimana Gen Z mungkin merasa terhubung dengan akar etnis mereka.

Pandangan Smith tentang etnisitas sebagai fondasi negara-bangsa dapat memunculkan pertanyaan tentang bagaimana generasi Z mengelola identitas etnis mereka dalam konteks global. Mereka mungkin merasa terhubung dengan negara mereka berdasarkan etnisitas, tetapi juga merasa sebagai warga dunia. Hal ini bisa menciptakan identitas ganda atau bahkan konflik internal dalam cara generasi Z memandang diri mereka sendiri. Mereka mungkin berjuang untuk menemukan keseimbangan antara identitas etnis dan identitas global mereka.

Generasi Z memiliki pandangan global yang lebih kuat dan identitas yang lebih kompleks daripada generasi sebelum-

nya. Mereka merasa terhubung dengan komunitas global dan melihat negara mereka dalam konteks global yang lebih luas. Ini menciptakan pergeseran cara mereka mengelola identitas nasional dan etnis dalam dunia yang semakin terhubung secara global. Konsep etnisitas sebagai fondasi negara-bangsa, seperti yang diperkenalkan oleh Anthony D. Smith, masih relevan dalam pemahaman identitas generasi Z, tetapi dalam konteks yang lebih luas dan kompleks.

*Perasaan identitas bersama.* Bagi Smith, identitas bersama di antara anggota kelompok etnis ini sangat penting dalam membentuk kesadaran nasional dan rasa kebangsaan. Anggota kelompok etnis ini merasa terkait satu sama lain dan merasa memiliki identitas bersama yang melebihi identitas individu mereka. Ini dapat menciptakan perasaan persatuan dan kesetiaan terhadap kelompok etnis.

Sebagai gambaran, selama perjuangan kemerdekaan, rakyat Indonesia dari berbagai kelompok etnis merasa memiliki perasaan identitas bersama sebagai “Bangsa Indonesia.” Mereka bersatu dalam tekad untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan asing. Perasaan persatuan ini sangat penting dalam menciptakan identitas nasional yang kuat.

Gen Z adalah generasi yang tumbuh dalam era digital dan terhubung secara luas melalui jaringan internet. Mereka mungkin merasa memiliki perasaan identitas bersama dengan rekan-rekan sebaya mereka yang berbagi minat, pandangan politik, atau nilai-nilai tertentu, walaupun mereka berbeda etnis. Konsep perasaan identitas bersama yang dijelaskan oleh Smith dapat diterapkan pada identitas dan kelompok virtual dalam konteks digital.

*Tradisi dan mitos bersama.* Smith juga menekankan pentingnya tradisi bersama dan mitos asal-usul bersama dalam membentuk identitas nasional. Ini dapat mencakup cerita-cerita tentang sejarah bersama, tokoh-tokoh pahlawan nasional, atau legenda-legenda yang memperkuat perasaan kesatuan kelompok etnis. Mitos asal-usul bersama sering digunakan untuk menghubungkan kelompok dengan masa lalu yang glorius dan menciptakan rasa kebanggaan nasional.

Di Indonesia, ada kisah tentang kejayaan Majapahit, kerajaan besar di masa lalu. Kisah ini menggambarkan kejayaan dan kebesaran masa lalu yang dirayakan sebagai bagian dari sejarah bersama. Kisah tentang pahlawan nasional seperti Soekarno dan Hatta juga memperkuat perasaan nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, karena mereka dianggap sebagai pemimpin yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan.

*Kesadaran nasional dan globalisme.* Dalam pandangan Anthony D. Smith, nasionalisme dan kesadaran nasional mengacu pada konsep identitas nasional, erat terkait dengan etnisitas dan sejarah bersama. Dalam pandangannya, kesadaran nasional adalah perasaan solidaritas, identitas bersama, dan rasa kebangsaan yang muncul di antara anggota sebuah kelompok etnis atau nasional. Smith menyatakan bahwa kesadaran nasional sering kali didasarkan pada elemen-elemen seperti budaya, bahasa, agama, dan sejarah bersama. Dalam konteks ini, kesadaran nasional terkait dengan ide bahwa anggota kelompok etnis merasa sebagai bagian dari suatu entitas yang lebih besar yang merupakan negara-bangsa.

Smith juga memahami bahwa kesadaran nasional dapat memengaruhi perasaan solidaritas di antara anggota kelompok etnis. Kesadaran tersebut mendorong partisipasi dalam

berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya dalam rangka mempertahankan dan memajukan identitas nasional mereka.

Adapun globalisme adalah fenomena yang berkaitan dengan integrasi dan interkoneksi global dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, teknologi, dan budaya. Smith sendiri tidak terlalu mendalami konsep globalisme, namun dalam konteks kontemporer, globalisme mengacu pada ide bahwa kita hidup dalam dunia yang semakin terhubung dan terintegrasi secara global. Peristiwa di satu negara atau wilayah dapat memiliki dampak pada negara atau wilayah lainnya.

Dalam konteks globalisme, kesadaran nasional dapat dihadapkan pada tantangan karena individu dan kelompok mungkin merasa terhubung dengan dunia yang lebih luas. Hal ini dapat mencakup identifikasi dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, perdagangan internasional, atau gerakan sosial global. Masyarakat yang semakin terhubung melalui media sosial dan teknologi informasi juga dapat memengaruhi bagaimana kesadaran nasional dan globalisme berinteraksi.

Pandangan Smith tentang kesadaran nasional lebih terkait dengan identitas dan solidaritas dalam konteks etnis atau nasional. Sementara globalisme mencerminkan pemahaman tentang dunia yang semakin terkoneksi secara global, di mana isu-isu dan identitas dapat bersifat lebih luas daripada batas negara. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, perasaan kesatuan nasional dapat bersanding dengan kesadaran terhadap isu-isu global yang lebih besar.

Gen Z sering memiliki pandangan global yang lebih kuat daripada generasi sebelumnya. Mereka mungkin lebih cen-

derung memandang diri mereka sebagai bagian dari komunitas global. Namun, pandangan Smith tentang etnisitas sebagai fondasi negara-bangsa juga dapat diterapkan pada cara Gen Z—merasa terhubung dengan negara mereka dalam konteks global yang lebih luas.

Ada kemungkinan Gen Z yang melihat identitas nasional mereka sebagai bagian dari identitas global yang lebih besar. Mereka mungkin merasa bahwa mereka adalah warga dunia (*global citizens*). Isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, atau hak asasi manusia juga merupakan bagian penting dari identitas mereka. Pandangan ini dapat mengubah cara Gen Z melihat negara mereka. Mereka mungkin lebih cenderung melihat negara mereka sebagai entitas yang harus berkontribusi pada komunitas global dan memperhatikan isu-isu global. Ini bisa bertentangan dengan pandangan tradisional tentang identitas nasional yang terutama didasarkan pada faktor-faktor seperti etnisitas dan sejarah bersama.

Dalam beberapa contoh di atas, dapat dilihat elemen-elemen etnisitas, perasaan identitas bersama, dan tradisi serta mitos bersama, berkontribusi pada pembentukan identitas nasional dalam konteks Indonesia. Hal ini mengilustrasikan pandangan Anthony D. Smith tentang peran kunci etnisitas dalam pembentukan negara-bangsa dan kesadaran nasional.

Smith berpendapat bahwa kelompok etnis yang berbagi kesamaan budaya, bahasa, agama, dan sejarah bersama memiliki potensi untuk mengembangkan kesadaran nasional dan rasa kebangsaan yang kuat. Etnisitas dalam pandangan Smith, adalah fondasi dari negara-bangsa, dan perasaan identitas bersama serta mitos asal-usul bersama menjadi perekat kesatuan dalam konteks nasional. Pandangan ini memainkan

peran penting dalam pemahaman asal-usul dan karakteristik negara-bangsa.

Generasi Z, yang merupakan generasi muda saat ini, dengan pandangan global yang mereka miliki, berimplikasi pada pemahaman identitas nasional dan hubungannya dengan konsep etnisitas dalam konteks global yang lebih luas. Pandangan Global yang lebih kuat pada Gen Z tumbuh dalam era teknologi informasi yang canggih. Memberi mereka akses mudah ke berita, informasi, dan pandangan dari seluruh dunia melalui internet dan media sosial. Mereka lebih terbuka terhadap berbagai pandangan global dan isu-isu internasional. Generasi ini juga terbiasa berkomunikasi dengan rekan-rekan dari berbagai negara melalui platform daring, seperti media sosial dan permainan daring. Hal ini membantu mereka merasa terhubung dengan komunitas global dan perspektif beragam.

Konsep kedua dikembangkan oleh Benedict Anderson. Anderson mengembangkan konsep *Imagined Communities* atau “komunitas terbayangkan.” Anderson berpendapat bahwa negara-bangsa adalah produk dari imajinasi kolektif masyarakat. Definisi Anderson tentang negara-bangsa mencakup komunitas terbayangkan, penyebaran media cetak, dan imajinasi nasional.

*Komunitas terbayangkan.* Anderson berpendapat bahwa negara-bangsa adalah *Imagined Communities* atau “komunitas terbayangkan” karena anggotanya membayangkan bahwa mereka adalah bagian dari entitas yang lebih besar, yaitu negara tersebut, meskipun mereka mungkin tidak pernah bertemu satu sama lain.

Di Indonesia, masyarakat dari berbagai daerah dan kelompok etnis mungkin tidak pernah bertemu, tetapi mereka memiliki perasaan bahwa mereka adalah bagian dari Bangsa Indonesia. Mereka merasa memiliki hubungan dengan orang-orang di seluruh Indonesia berdasarkan kesamaan bahasa, simbol-simbol nasional, dan gagasan tentang negara kesatuan.

*Penyebaran media cetak.* Anderson menyoroti peran penting media cetak dalam pembentukan identitas nasional. Bahasa bersama dalam bentuk surat kabar, majalah, dan buku dapat menghubungkan orang dari berbagai daerah dan kelompok etnis, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berbagi ide-ide nasional.

Penyebaran surat kabar dan majalah berbahasa nasional, membantu menyatukan orang-orang dari berbagai daerah dengan bahasa yang sama. Media cetak ini memainkan peran penting dalam menyebarkan pemikiran nasionalisme dan identitas nasional.

*Imajinasi nasional.* Konsep imajinasi nasional menekankan pentingnya pemikiran kolektif dan pandangan bersama yang memungkinkan orang untuk merasa sebagai bagian dari sebuah negara-bangsa. Selama peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, jutaan orang berkumpul di seluruh negeri untuk merayakan identitas nasional mereka. Mereka menyadari sebagai bagian dari Indonesia dan merayakan imajinasi nasional mereka bersama-sama.

Dalam keseluruhan, konsep “komunitas terbayangkan” Benedict Anderson, dapat membantu Generasi Z dalam memahami bagaimana mereka merasakan identitas nasional dalam konteks global yang semakin terhubung. Mereka dapat tetap terhubung dengan negara mereka, tetapi juga merasa

sebagai bagian dari komunitas global yang lebih besar. Ini mencerminkan pergeseran identitas yang lebih kompleks dalam era digital dan global saat ini.

## **1.2. Sejarah dan Perkembangan Konsep Negara-Bangsa di Indonesia**

Dua sarjana yang mendalami tentang sejarah dan perkembangan konsep negara-bangsa di Indonesia adalah M.C Ricklefs<sup>3</sup> dan Robert Cribb.<sup>4</sup> Sejarah dan perkembangan konsep negara-bangsa di Indonesia merupakan aspek penting dalam pemahaman tentang negara-bangsa Indonesia.

M.C. Ricklefs adalah sejarawan terkenal yang menyajikan sejarah modern Indonesia. Perkembangan konsep negara-bangsa di Indonesia, menurutnya, dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda dan perjuangan kemerdekaan. Beberapa poin penting yang diuraikan oleh Ricklefs adalah:

*Pengaruh Penjajahan Belanda.* Sejak abad ke-17, penjajahan Belanda berpengaruh dalam membentuk identitas kolonial dan memicu pertumbuhan kesadaran nasional di kalangan penduduk Indonesia. Eksplorasi Belanda, ekspansi perdagangan, dan pengenalan budaya Eropa di wilayah tersebut memiliki dampak besar.

---

<sup>3</sup> M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1200*, Third Edit (Palgrave, 2001).

<sup>4</sup> Robert Cribb dan Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, Second Edi (Lanham, Maryland-Toronto-Oxford: Scarecrow Press, 2004). Baca juga: Robert Cribb, "The Historical Roots of Indonesia's New Order: Beyond the Colonial Comparison," in *Soeharto's New Order and its Legacy: Essays in honour of Harold Crouch*, ed. oleh Edward Aspinall dan Greg Fealy (Canberra Australia: ANU ePress, 2010), 67–80.

Penjajahan Belanda di Indonesia bertujuan mengeksploitasi sumber daya alam dan perdagangan. Selama berabad-abad, Belanda membangun infrastruktur administrasi dan ekonomi yang sangat berpengaruh. Mereka mengenalkan sistem kolonial yang memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pemahaman kesejarahan kolonial ini dapat membantu generasi Z lebih memahami akar-akar bernegara dan berbangsa di Indonesia.

*Perjuangan Kemerdekaan.* Ricklefs mencatat perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang, telah memperkuat kesadaran nasional. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah tonggak penting dalam pembentukan negara-bangsa Indonesia.

Perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah fase penting dalam pembentukan negara-bangsa. Sejak pengakuan kemerdekaan pada tahun 1945, generasi Indonesia yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan berjuang keras untuk mendirikan negara ini.

*Proses pembentukan identitas nasional.* Sejarah Indonesia modern dimulai sejak sekitar tahun 1200, dapat digambarkan sebagai rangkaian cerita yang kompleks dan beragam tentang negara kepulauan di Asia Tenggara. Indonesia, dengan budaya, bahasa, dan wilayah yang beragam, telah mengalami sejarah yang panjang dan rumit. Berikut adalah gambaran umum tentang peristiwa dan perkembangan kunci dalam sejarah modern Indonesia sejak sekitar tahun 1200:

1. Kerajaan Awal (1200-1600). Selama periode ini, kepulauan Indonesia menjadi tempat bagi berbagai kerajaan dan kekaisaran seperti Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting da-

lam membentuk budaya, perdagangan, dan politik di wilayah tersebut.

2. Masuknya Islam (abad ke-13 hingga ke-17). Islam mulai tersebar di Indonesia melalui perdagangan dan kegiatan dakwah. Konversi banyak penguasa dan elit Indonesia ke Islam secara signifikan memengaruhi lanskap agama di kepulauan ini.
3. Kolonialisme Eropa (abad ke-17 hingga ke-20). Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) mendirikan pos perdagangan di Jawa pada awal abad ke-17 dan secara bertahap memperluas pengaruhnya di kepulauan Indonesia. Periode kolonial Belanda berlangsung selama berabad-abad dan memiliki dampak mendalam pada masyarakat dan budaya Indonesia.
4. Pendudukan Jepang (1942-1945). Pada Perang Dunia II Jepang menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Ada hal “positif” dari pendudukan Jepang dibandingkan dengan pemerintah Belanda. Jepang memberikan kesempatan bagi para pemuda Indonesia untuk mengorganisir diri dan memperjuangkan kemerdekaan.
5. Nasionalisme dan Kemerdekaan Indonesia (1945). Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia, memanfaatkan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka—kemudian harus dilalui pula dengan konflik bersenjata dengan Belanda, perundingan, dan diplomasi internasional—akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat pada tahun 1949.

6. Soekarno dan Republik Awal (1945-1967). Soekarno, seorang pemimpin utama gerakan kemerdekaan Indonesia, menjadi Presiden Indonesia yang pertama. Tahun-tahun awal Republik ditandai oleh upaya membangun bangsa, termasuk adopsi konstitusi baru pada tahun 1945 dan tantangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan.
7. Demokrasi Terpimpin Sukarno (1957-1966). Pemerintahan Sukarno berkembang menjadi rezim otoriter di bawah konsep “Demokrasi Terpimpin.” Ketidakstabilan ekonomi, gejolak politik, dan perjuangan ideologis menjadi ciri khas periode ini.
8. Era Orde Baru Soeharto (1967-1998). Pada tahun 1965, Jenderal Suharto berkuasa dalam periode gejolak politik dan sosial, yang ditandai dengan pembunuhan massal orang-orang yang dicurigai sebagai komunis. Rezim “Orde Baru” Suharto memprioritaskan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi dikritik karena otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia.
9. Reformasi dan Era Pasca-Soeharto (1998-sekarang). Pada tahun 1998, di tengah protes massal dan tekanan untuk reformasi politik, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Ini menandai awal era Reformasi yang ditandai oleh perubahan politik dan sosial, desentralisasi, dan upaya demokratisasi.
10. Indonesia Kontemporer. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mengalami perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Indonesia telah menjadi negara demokrasi yang hidup, salah satu ne-

gara terpadat di dunia, dan anggota G20. Negara ini dihadapkan pada tantangan seperti konflik regional, masalah lingkungan, dan pembangunan ekonomi.

Gambaran umum tersebut adalah narasi yang disederhanakan tentang sejarah Indonesia sejak sekitar tahun 1200. Peristiwa sejarah sebenarnya jauh lebih kompleks, di mana berbagai wilayah dan budaya berkontribusi pada keragaman nasional negara ini.

Ricklefs menyajikan perkembangan sejarah Indonesia yang mengarah ke pembentukan negara-bangsa itu, termasuk peran tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta dalam mendefinisikan ideologi negara. Ricklefs menyoroti peran penting tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta dalam mendefinisikan ideologi negara. Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan yang mendasari identitas nasional Indonesia.

Dalam konteks kekinian, sejarah perkembangan negara-bangsa dan perjuangan kemerdekaan Indonesia memperkuat identitas nasional. Sejarah dan ideologi negara-bangsa merupakan bagian penting dalam membentuk identitas generasi Indonesia yang berada dalam konteks global yang semakin terkoneksi.

Dalam pada itu, Robert Cribb mengkaji akar-akar sejarah identitas Indonesia. Pandangannya tentang sejarah dan perkembangan konsep negara-bangsa di Indonesia mencakup beberapa poin kunci.

*Keanekaragaman etnis dan kebudayaan.* Cribb menyoroti keragaman etnis dan budaya di Indonesia, serta peran kerajaan-kerajaan lokal dalam membentuk identitas lokal. Indonesia memiliki banyak kelompok etnis, bahasa, dan budaya yang

beragam. Indonesia dikenal karena keanekaragaman etnis dan budaya. Ada lebih dari 300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa dan dialek yang berbeda di seluruh kepulauan Indonesia.

Keanekaragaman ini mencerminkan warisan sejarah yang kompleks dan peran kerajaan-kerajaan lokal dalam membentuk identitas lokal. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya, yang memiliki pengaruh besar di wilayah Indonesia, berkontribusi pada pembentukan identitas budaya yang unik.

*Pengaruh Hindu-Buddha.* Cribb menekankan pengaruh kuat Hindu-Buddha dalam sejarah Indonesia, terutama dalam pembentukan budaya dan seni. Ini menciptakan fondasi budaya yang kuat bagi masyarakat Indonesia.

Pengaruh kuat Hindu-Buddha dalam sejarah Indonesia mencakup periode besar kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Pengaruh ini terlihat dalam seni, arsitektur, dan sistem kepercayaan. Pengaruh Hindu-Buddha menciptakan fondasi budaya yang kuat bagi masyarakat Indonesia, dan banyak unsur-unsur dari agama ini masih terlihat dalam upacara keagamaan dan tradisi budaya.

*Islam sebagai agama mayoritas.* Islam memainkan peran sentral dalam membentuk identitas Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim. Cribb membahas peranan Islam dalam proses pembentukan identitas nasional Indonesia. Islam memainkan peran sentral dalam membentuk identitas Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim. Masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 membawa perubahan signifikan dalam agama, budaya, dan masyarakat. Islam

menjadi agama mayoritas di Indonesia, dan nilai-nilai Islam memengaruhi budaya, kebijakan, dan masyarakat Indonesia.

Pemahaman tentang keanekaragaman etnis dan budaya, pengaruh Hindu-Buddha, dan peran Islam dalam sejarah Indonesia dapat membantu generasi merayakan dan menghargai keragaman Indonesia. Hal ini juga dapat menguatkan rasa kebangsaan, memahami akar-akar sejarah yang beraneka ragam, dan memelihara warisan budaya Indonesia yang kaya.

Baik Ricklefs maupun Cribb memberikan wawasan yang berharga tentang Indonesia, dengan sejarah yang kompleks, telah mengembangkan konsep negara-bangsa. Kedua pandangan ini membantu kita memahami bagaimana sejarah, agama, budaya, dan perjuangan kemerdekaan berkontribusi pada identitas nasional Indonesia yang unik.

### **1.3. Keberagaman Budaya, Agama, dan Etnis dalam Konteks Negara-Bangsa**

Robert W Hafner menempatkan keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam konteks negara-bangsa. Robert W. Hefner membahas tentang keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam konteks negara-bangsa Indonesia. Pandangan Hefner dapat dirangkum berikut.

Islam moderat dan toleran: Hefner menyoroti ciri-ciri khas Islam di Indonesia, yang cenderung moderat, inklusif, dan toleran. Islam di Indonesia lebih berakar dalam tradisi lokal dan berinteraksi dengan unsur-unsur budaya, agama, dan etnis lainnya. Hal ini menciptakan keragaman dalam praktik agama dan pemahaman Islam.

Keragaman etnis dan bahasa: Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan beragam bahasa dan dialek. Budaya etnis yang berbeda berkontribusi pada keragaman budaya yang kaya di seluruh negara. Hefner mendokumentasikan cara budaya etnis ini tetap bertahan dan berkontribusi pada keberagaman budaya nasional.

Pancasila sebagai dasar negara: Hefner juga membahas peran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mengakui keberagaman agama dan kepercayaan sebagai prinsip dasar. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menerima berbagai agama dan keyakinan serta mempromosikan toleransi agama.

#### **1.4. Kedaulatan dan Integritas Negara-Bangsa**

Kedaulatan dalam menjaga kemandirian negara sangat penting dalam konteks studi tentang negara-bangsa dan politik internasional. Hal ini mengacu pada prinsip dasar bahwa sebuah negara memiliki otoritas tertinggi atas wilayah, rakyat, dan urusan dalam negerinya, dan tidak tunduk pada pengaruh atau kendali eksternal. Berikut penjelasan lebih rinci tentang mengapa kedaulatan penting dalam menjaga kemandirian negara:

##### **Kedaulatan sebagai Landasan Hukum dan Politik**

Kedaulatan adalah prinsip hukum internasional yang mengakui bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan eksternal. Prinsip ini juga merupakan landasan politik dasar

untuk kemandirian negara-bangsa, di mana pemerintah berfungsi sebagai pemegang kedaulatan atas nama rakyatnya.

Jean-Jacques Rousseau—filsuf, penulis, dan pemikir politik pada Abad Pencerahan—memiliki pandangan yang sangat relevan tentang kedaulatan sebagai landasan hukum dan politik. Rousseau mengembangkan konsep kontrak sosial untuk menjelaskan dasar legitimasi dan landasan hukum dari kedaulatan negara.

Rousseau mengajukan ide kontrak sosial, yang merupakan perjanjian di antara semua anggota masyarakat yang membentuk suatu negara. Dalam kontrak ini, individu-individu secara sukarela menyepakati untuk menggabungkan hak-hak individu mereka menjadi “kehendak bersama” (*volonté générale*). Kontrak sosial ini, menurut Rousseau, menjadi landasan hukum dan politik yang sah bagi pemerintahan. Kedaulatan terletak pada kehendak bersama yang mencerminkan kepentingan umum.

Rousseau juga menekankan konsep kedaulatan rakyat, di mana kehendak bersama adalah ekspresi dari kemauan seluruh masyarakat. Ini berarti pemerintahan hanya sah jika itu adalah representasi dari kehendak kolektif rakyat, bukan oligarki atau pemerintahan tirani yang berlaku untuk kepentingan kelompok kecil.

Rousseau berpendapat bahwa kehendak bersama adalah satu-satunya sumber yang sah untuk kedaulatan. Ini berarti pemerintahan harus bertindak sesuai dengan kepentingan umum, sebagaimana dinyatakan dalam kontrak sosial, dan tidak boleh bertindak atas dasar kehendak atau kepentingan pribadi.

Rousseau membedakan antara kedaulatan dan pemerintahan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat, sementara pemerintahan adalah lembaga yang menjalankan fungsi administratif dan eksekutif atas nama rakyat. Kedaulatan tetap bersama rakyat, sementara pemerintahan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

Rousseau memandang republik, di mana rakyat secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sebagai bentuk pemerintahan yang ideal. Baginya, republik adalah bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat.

Dalam konsep Rousseau, kedaulatan adalah dasar hukum dan politik yang sah untuk suatu negara. Pandangannya tentang kontrak sosial dan kedaulatan rakyat menjadi landasan bagi pemikiran politik modern dan konsep-konsep seperti demokrasi representatif. Pandangan ini menekankan pentingnya konsensus, partisipasi warga negara, dan kesejahteraan umum dalam pemerintahan.

Joseph Nye, ahli teori politik Amerika, dikenal dengan konsep “kekuatan lembut” (*soft power*) dan pandangannya tentang hubungan internasional. Pandangan Nye berfokus pada bagaimana negara-negara menggunakan sumber daya non-militer, seperti budaya, diplomasi, nilai-nilai, teknologi, dan pengaruh global, untuk mencapai tujuan politik mereka. Terkait dengan kedaulatan sebagai landasan hukum dan politik, pandangan Joseph Nye memiliki beberapa elemen penting.

Joseph Nye memperkenalkan konsep *soft power*, yang mengacu pada kemampuan sebuah negara untuk mempengaruhi dan membentuk preferensi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan citra positif. Kekuatan lembut me-

rupakan elemen penting dalam mempertahankan kedaulatan dan memperkuat hubungan internasional.

Nye juga menekankan pentingnya memahami interdependensi global. Di era globalisasi, banyak isu lintas batas, seperti perubahan iklim, perdagangan, dan keamanan, mempengaruhi kedaulatan negara secara langsung. Negara-negara perlu bekerja sama dalam kerangka hukum dan lembaga internasional untuk mengatasi tantangan ini.

Joseph Nye menggarisbawahi pentingnya diplomasi dan hubungan internasional yang kuat dalam menjaga kedaulatan dan merespons masalah global. Menurutnya, negara-negara dapat bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengorbankan kedaulatan mereka.

Dalam konteks kedaulatan, Nye menganggap penting untuk mengatasi tantangan baru yang muncul akibat teknologi dan ruang siber. Pengaturan dan kerja sama antarnegara sangat penting untuk melindungi kedaulatan siber dan mencegah serangan siber yang dapat mengancam keamanan negara.

Nye memahami bahwa dalam lingkungan geopolitik yang terus berubah, negara-negara perlu memahami dinamika kekuatan dan pengaruh global untuk mengelola kedaulatan mereka secara efektif. Ini termasuk menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan baru yang muncul di tingkat global.

Pandangan Joseph Nye menekankan bahwa kedaulatan dalam dunia yang semakin terhubung sangat terkait dengan kemampuan negara-negara untuk memanfaatkan kekuatan lembut, menjalin kerja sama internasional, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan global. Pendekatan ini mencerminkan realitas hubungan internasional modern di mana

kekuatan militer saja tidak lagi cukup untuk mempertahankan kedaulatan.

Meskipun Joseph Nye dan Jean-Jacques Rousseau memiliki pandangan yang berbeda dalam beberapa hal, tetapi ada beberapa persamaan yang dapat diimplementasikan di konteks Indonesia, yakni:

- a. Diplomasi dan Kerja Sama Internasional: Baik Nye maupun Rousseau menggarisbawahi pentingnya diplomasi dan kerja sama internasional. Dalam konteks Indonesia, negara ini dapat mengimplementasikan pendekatan diplomasi yang bijaksana untuk mempromosikan kepentingan nasional sambil tetap berkomitmen terhadap kerja sama dengan negara lain dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, keamanan, dan isu-isu lingkungan.
- b. Perlindungan Kedaulatan Siber: Joseph Nye menyoroti pentingnya melindungi kedaulatan siber negara. Indonesia, seperti negara lain, dapat mengambil langkah-langkah untuk mengamankan ruang siber nasional dan mencegah serangan siber yang dapat mengancam keamanan nasional dan data warga.
- c. Kebijakan Luar Negeri Berbasis Nilai: Rousseau menekankan pentingnya nilai-nilai dalam kebijakan luar negeri. Indonesia dapat menerapkan pendekatan serupa dengan menjadikan nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian sebagai pilar kebijakan luar negeri. Ini akan membantu Indonesia membangun citra positif di mata masyarakat internasional.
- d. Penyelesaian Konflik Damai: Rousseau dan Nye keduanya mendorong penyelesaian konflik melalui

cara damai. Indonesia dapat berperan sebagai mediator atau pendukung upaya perdamaian di kawasan dan konflik global. Dalam hal ini, negara ini dapat mempromosikan pendekatan diplomasi dan negosiasi.

- e. Kemandirian Energi dan Sumber Daya Alam: Kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam adalah elemen penting dalam kedaulatan suatu negara. Indonesia dapat menjaga kemandirian dalam sektor energi dan sumber daya alam serta mengelola sumber daya ini dengan bijaksana untuk kepentingan jangka panjang.
- f. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat: Baik Nye maupun Rousseau menekankan perlunya fokus pada kesejahteraan masyarakat. Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendorong perlindungan hak asasi manusia, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai upaya mempertahankan kedaulatan dengan cara yang inklusif.

Penting untuk diingat bahwa konteks Indonesia unik, dan implementasi pandangan ini akan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada di negara ini. Selain itu, dalam urusan internasional, Indonesia juga dapat memanfaatkan ajaran-ajaran pendiri bangsa seperti Pancasila dan politik luar negeri bebas aktif yang telah memandu kebijakan luar negerinya selama beberapa dekade.

## **Pemberdayaan Negara**

Kedaulatan memberdayakan negara-bangsa untuk mengambil keputusan sendiri tentang kebijakan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini

memungkinkan negara untuk mengejar kepentingan nasional mereka dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka sendiri.

Pandangan Jean-Jacques Rousseau dan Joseph Nye tentang pemberdayaan negara memiliki beberapa kesamaan yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Mari kita bahas pandangan masing-masing dan kesamaannya:

Dalam konteks pemberdayaan Negara, Jean-Jacques Rousseau menekankan pentingnya kedaulatan sebagai landasan hukum dan politik. Baginya, kedaulatan harus dimiliki oleh rakyat secara kolektif, dan negara harus mewakili kehendak umum rakyat. Ini mengimplikasikan pemberdayaan rakyat dalam mengambil keputusan politik. Pandangan Rousseau menciptakan kerangka kerja di mana rakyat memiliki peran sentral dalam menentukan nasib negara.

Joseph Nye mengenalkan konsep *soft power* dan menekankan pentingnya pengaruh dan daya tarik untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks global yang kompleks, Nye mendukung ide bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari kapasitas militer atau kekuatan ekonominya, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memengaruhi dan membentuk kebijakan dunia melalui diplomasi, budaya, dan nilai-nilai yang dianut.

Kedua ilmuwan itu memiliki kesamaan pandangan yang dapat diimplementasikan di Indonesia, yaitu:

1. Kedaulatan dalam pandangan Rousseau dan konsep *kekutu* dalam pemikiran Nye menekankan pemberdayaan. Di Indonesia, ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan rakyat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik, memastikan bahwa

kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat.

2. Rousseau memandang kedaulatan sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasional, sementara Nye menekankan daya tarik untuk mencapai tujuan luar negeri. Indonesia dapat menggabungkan kedua aspek ini dengan mempromosikan kebijakan yang menguntungkan kepentingan nasional sambil memanfaatkan daya tarik budaya dan diplomasi untuk memengaruhi isu-isu global yang penting bagi negara ini.
3. Mengingat era digital saat ini, Indonesia dapat menerapkan pandangan Nye tentang keamanan siber dan daya tarik teknologi untuk memastikan kedaulatan di dunia maya. Ini mencakup melindungi infrastruktur siber dan memanfaatkan inovasi teknologi untuk mencapai keunggulan.
4. Implementasi konsep *kekuatan lunak* juga menekankan pentingnya kemitraan dan diplomasi yang efektif. Indonesia dapat menjalin kemitraan strategis dan diplomasi yang baik dengan negara lain untuk memajukan kepentingan nasional dan mempromosikan nilai-nilai yang dianut Indonesia di tingkat internasional.

Dalam beberapa aspek, pandangan Rousseau dan Nye berbeda, namun dengan penggabungan elemen-elemen ini, justru dapat membantu Indonesia membangun kedaulatan yang kuat dan memanfaatkan daya tariknya dalam hubungan internasional untuk mencapai tujuan nasional dan berperan aktif dalam diplomasi global.

## Mengatasi Imperialisme dan Kolonialisme

Kedaulatan menjadi sangat penting dalam sejarah karena masyarakat internasional telah mengalami era imperialisme dan kolonialisme yang didasari oleh upaya negara-negara asing untuk menguasai wilayah dan sumber daya negara lain. Kedaulatan adalah alat penting untuk memerdekakan diri dari kendali asing dan mempertahankan integritas wilayah. Pandangan Rousseau dan Nye terkait dengan isu mengatasi imperialisme dan kolonialisme, sekalipun berasal dari konteks sejarah yang berbeda, dapat memberikan wawasan yang berguna di Indonesia.

a. Pandangan Jean-Jacques Rousseau.

Rousseau hidup pada abad ke-18, ketika imperialisme dan kolonialisme Eropa mencapai puncaknya. Dalam pandangannya, kedaulatan adalah hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan asing. Pandangan ini sangat relevan dengan perjuangan bangsa-bangsa yang berusaha memerdekakan diri dari penjajahan asing. Rousseau menekankan bahwa kedaulatan harus dimiliki oleh rakyat secara kolektif dan harus digunakan untuk melindungi integritas wilayah serta menghapus kendali asing.

b. Pandangan Joseph Nye

Joseph Nye memperkenalkan konsep *soft power* dan fokus pada pengaruh dan daya tarik untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks imperialisme dan kolonialisme, konsep ini dapat digunakan oleh negara yang dulu dijajah untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka dan membangun hubungan internasional yang kuat. Dengan menggunakan daya tarik budaya,

diplomasi, dan kerjasama internasional, negara yang sebelumnya dijajah dapat memerdekakan diri dan mempertahankan integritas wilayah.

Pandangan Rousseau dan Nye memiliki kesamaan yang penting dalam konteks mengatasi imperialisme dan kolonialisme, yakni:

- a. Pemberdayaan kedaulatan: kedaulatan, baik dalam pandangan Rousseau maupun konsep kekutu Nye, menekankan pentingnya pemberdayaan negara dan rakyat dalam menghadapi campur tangan asing. Ini dapat mendorong negara yang dijajah untuk berjuang demi pembebasan dan pemeliharaan kedaulatan wilayah mereka.
- b. Perlawanan terhadap imperialisme: baik Rousseau maupun Nye akan mendukung perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, baik secara aktif melalui perjuangan rakyat maupun diplomasi yang menggunakan daya tarik budaya untuk mempengaruhi masyarakat internasional.
- c. Pentingnya diplomasi: dalam mengatasi imperialisme dan kolonialisme, diplomasi adalah alat yang sangat penting. Negara yang ingin memerdekakan diri perlu menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain untuk mendukung perjuangan mereka.
- d. Pemeliharaan integritas wilayah: Rousseau dan Nye keduanya mengakui pentingnya pemeliharaan integritas wilayah. Ini berarti melindungi wilayah dari campur tangan asing dan memastikan bahwa kekuasaan tidak diserahkan kepada pihak asing.

Pandangan mereka berbeda dalam hal konteks dan pendekatan, penggabungan elemen-elemen ini dapat membantu negara yang pernah dijajah mengatasi dampak imperialisme dan kolonialisme, mempertahankan kedaulatan, dan membangun hubungan internasional yang kuat dengan menggunakan daya tarik budaya dan diplomasi.

### **Pilar Identitas Nasional**

Kedaulatan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional dan memperkuat rasa kebanggaan nasional serta identitas kultural bagi warga suatu negara. Ini berdampak positif pada solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Mari kita tinjau perspektif Jean-Jacques Rousseau dan Joseph Nye, serta bagaimana hal ini berlaku dalam konteks Indonesia.

Rousseau menekankan bahwa kedaulatan seharusnya dimiliki oleh rakyat secara kolektif melalui kontrak sosial. Kedaulatan rakyat adalah manifestasi kehendak bersama yang menciptakan negara. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan yang berasal dari rakyat membantu membangun rasa kebanggaan nasional. Rakyat merasa terlibat dalam pembentukan nasionalisme mereka, dan kesatuan di antara mereka muncul dari partisipasi aktif dalam proses politik. Ini membantu membentuk identitas nasional yang kuat.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman ini bisa diaplikasikan dengan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik dan pembentukan kebijakan. Ini dapat menguatkan persatuan dan memperkuat identitas nasional yang beragam.

Joseph Nye berbicara tentang daya tarik budaya dan diplomasi. Dalam hal ini, melalui diplomasi yang cerdas dan efektif, sebuah negara dapat mempromosikan budayanya dan menarik masyarakat internasional. Identitas nasional dan budaya yang menarik dapat memperkuat rasa kebanggaan nasional. Sebagai contoh, makanan, seni, musik, olahraga, dan pendidikan adalah aspek budaya yang dapat mengidentifikasi suatu negara di mata dunia.

Di Indonesia, budaya yang kaya dan beragam adalah salah satu sumber daya terbesar yang dapat memperkuat identitas nasional. Promosi budaya Indonesia melalui diplomasi budaya dapat memperkaya dan memperkuat rasa kebanggaan nasional. Mengenalkan berbagai aspek budaya Indonesia kepada dunia dapat memperkuat identitas nasional dan meningkatkan persatuan dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kedaulatan berperan penting dalam menjaga identitas nasional dan rasa kebanggaan. Dengan mendorong partisipasi rakyat dalam proses politik dan diplomasi budaya yang aktif, Indonesia dapat memperkuat identitas nasionalnya dan meningkatkan persatuan di tengah keragaman budaya yang luar biasa. Kedaulatan yang dimanfaatkan dengan bijak dapat membantu membangun negara yang kuat dan beridentitas jelas.

## **Kemandirian Politik**

Kedaulatan adalah kunci bagi kemandirian politik, yang memungkinkan negara untuk mengambil keputusan politik tanpa ketergantungan pada negara-negara lain. Ini memungkinkan negara untuk menjalankan politik luar negerinya sesuai dengan kepentingan nasional mereka.

Kemandirian politik adalah konsep penting yang berkaitan erat dengan kedaulatan. Ini merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mengambil keputusan politik tanpa terlalu tergantung pada negara-negara lain, sehingga negara dapat menjalankan politik luar negerinya sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Kedaulatan adalah kunci bagi kemandirian politik, dan ini juga mendapat perhatian dari Rousseau dan Nye. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan.

Rousseau mengemukakan bahwa kedaulatan seharusnya dimiliki oleh rakyat melalui kontrak sosial. Dalam hal ini, kemandirian politik berarti bahwa rakyat memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan politik. Mereka harus memiliki suara dalam hal-hal penting seperti kebijakan luar negeri. Dalam konteks Rousseau, penting bagi negara untuk menjalankan politik luar negeri sesuai dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit politik atau asing.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik, terutama dalam hal-hal yang berdampak pada hubungan luar negeri. Transparansi dalam kebijakan luar negeri dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, bisa memastikan bahwa kepentingan nasional diutamakan dalam politik luar negeri.

Joseph Nye melalui konsep *soft power*-nya itu, memberi catatan bagaimana pentingnya penggunaan daya tarik budaya, diplomasi, dan pengaruh internasional untuk mempromosikan kepentingan nasional. Kemandirian politik dalam pandangan Nye berarti negara mampu menggunakan sumber daya ini untuk memengaruhi dan menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara yang menguntungkan. Kekuatan

lembut, seperti budaya, teknologi, dan diplomasi yang cerdas, dapat memainkan peran penting dalam meraih tujuan politik luar negeri.

Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan kekuatan lembut, seperti diplomasi budaya, pendidikan, dan promosi budaya, dapat membantu membangun kemandirian politik. Indonesia memiliki budaya yang kaya dan beragam yang dapat digunakan untuk mempromosikan citra positif di dunia. Hal ini dapat digunakan untuk mengamankan kepentingan nasional dan memengaruhi kebijakan internasional.

Beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan Indonesia dalam konteks kemandirian politik meliputi:

- a. Keterlibatan publik: memastikan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan pengembangan kebijakan luar negeri yang bersifat transparan.
- b. Diplomasi budaya: mempromosikan budaya dan kekayaan nasional sebagai alat diplomasi yang efektif dalam mencapai tujuan politik luar negeri.
- c. Keberlanjutan: menjaga kemandirian politik sebagai prinsip yang harus dipegang teguh dan diterapkan dalam jangka panjang demi kepentingan nasional.

## **1.5. Ancaman terhadap Integritas dan Kedaulatan Negara-Bangsa**

Ancaman terhadap integritas dan kedaulatan negara-bangsa dapat berasal dari berbagai factor/sumber, termasuk konflik bersenjata, terorisme, kolonialisme, atau intervensi asing. Samuel P. Huntington, seorang ilmuwan politik yang

terkenal dengan gagasannya tentang “konflik berbasis budaya, berpendapat bahwa konflik antar peradaban atau budaya berpotensi menjadi sumber ancaman terhadap kedaulatan dan integritas negara-bangsa. Misalnya, konflik antara Barat dan dunia Islam adalah contoh konflik berbasis budaya yang pernah dia sebutkan.

Dalam konteks Indonesia, konflik berbasis budaya juga dapat menjadi ancaman terhadap integritas dan kedaulatan negara. Indonesia memiliki beragam etnis, budaya, dan agama, dan konflik berbasis budaya dapat memicu ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kerukunan antar etnis dan agama, serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pluralisme budaya.

Noam Chomsky berpendapat, bahwa intervensi asing oleh negara-negara adidaya, terutama Amerika Serikat, dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan integritas negara yang lemah. Contohnya adalah intervensi militer atau politik dalam urusan dalam negeri suatu negara.

Masalah ancaman intervensi asing juga pernah muncul dalam sejarah di Indonesia, terutama selama era kolonialisme dan perang dingin. Untuk menjaga kedaulatan dan integritas negara, Indonesia harus menjalankan kebijakan luar negeri yang mandiri dan melindungi kepentingan nasionalnya dari intervensi asing yang mungkin merugikan. Hal ini melibatkan diplomasi yang kuat dan kerja sama regional dan internasional.

Dalam kedua pandangan ini, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah berikut:

- a. Mendorong kerukunan dan toleransi antar kelompok etnis, agama, dan budaya untuk mencegah konflik berbasis budaya.

- b. Memperkuat diplomasi dan kerja sama regional untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman intervensi asing.
- c. Meningkatkan kemandirian dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia.

Selain itu, penting juga bagi Indonesia untuk berfokus pada pemeliharaan keamanan dalam negeri, termasuk memerangi terorisme dan konflik bersenjata internal yang dapat mengancam integritas negara.

Ancaman terhadap integritas dan kedaulatan negara-bangsa sebagaimana tersebut di atas, terutama yang berkaitan dengan konflik berbasis budaya dan intervensi asing, memiliki relevansi penting dengan generasi muda, termasuk Generasi Z yang kelak akan menjadi pemimpin di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan peran generasi muda dalam menghadapi ancaman tersebut:

- a. Pendidikan multikultural dan toleransi.  
Generasi muda perlu mendapatkan pendidikan yang kuat tentang multikulturalisme dan toleransi. Mereka harus memahami pentingnya kerukunan antar kelompok etnis, agama, dan budaya untuk mencegah konflik berbasis budaya. Sekolah dan lembaga pendidikan dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman.
- b. Keterlibatan dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri. Generasi muda yang tertarik dalam bidang diplomasi dan kebijakan luar negeri dapat memainkan peran dalam memperkuat diplomasi dan menjaga kedaulatan negara. Mereka dapat menjadi bagian dari tim diplo-

- matik yang mewakili Indonesia di tingkat internasional, mempromosikan hubungan yang baik dengan negara-negara lain, dan memastikan kepentingan nasional dilindungi.
- c. Kemandirian dan keberanian berbicara. Generasi muda perlu diberdayakan untuk menjadi individu yang mandiri dan berani berbicara mengenai isu-isu kedaulatan dan integritas negara. Mereka dapat menjadi suara yang berani dalam menghadapi ancaman intervensi asing atau konflik internal. Memiliki pengetahuan yang kuat tentang sejarah dan geopolitik juga penting untuk bisa berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan.
  - d. Penguatan keamanan dalam negeri. Generasi muda dapat berperan dalam memerangi terorisme dan konflik bersenjata internal dengan bekerja dalam lembaga keamanan dan penegak hukum. Mereka dapat membantu dalam menjaga keamanan dalam negeri, yang merupakan faktor penting dalam menjaga integritas negara.
  - e. Partisipasi aktif dalam organisasi internasional dan regional. Generasi muda dapat berpartisipasi dalam organisasi internasional dan regional yang mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kerja sama antar-negara. Mereka dapat memainkan peran dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan berkontribusi pada stabilitas regional.
  - f. Penggunaan teknologi untuk diplomasi dan keamanan. Generasi Z adalah generasi yang sangat terampil dalam teknologi. Mereka dapat memanfaatkan teknologi ko-

munikasi dan informasi untuk diplomasi dan keamanan. Misalnya, mereka dapat memantau perkembangan global, berpartisipasi dalam dialog internasional melalui media sosial, atau bahkan mengembangkan solusi teknologi untuk masalah keamanan.

Generasi muda memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan Indonesia, termasuk dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara. Penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan dan peluang kepada generasi muda untuk memahami, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap negara-bangsa. Dengan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang tepat, generasi muda Indonesia dapat menjadi pemimpin yang mampu menjaga dan memperkuat negara-bangsa Indonesia di era yang semakin kompleks ini.

## **1.6. Konsep Bela Negara**

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan baik antar warga negara hingga kerja sama untuk menghadapi ancaman dari pihak asing

Patriotisme dan identitas nasional menjadi daya penggerak utama dalam konsep bela negara. Rasa cinta terhadap tanah air, kebanggaan terhadap warisan budaya, dan pemahaman akan nilai-nilai nasional menjadi faktor-faktor motivasi yang mendorong warga untuk melibatkan diri dalam upaya bela negara. Semangat patriotisme ini tidak hanya memperkuat ke-

satuan dalam menghadapi ancaman, tetapi juga menciptakan fondasi bagi kohesi sosial dan kebangsaan.

Bela negara mengandung empat esensial yang perlu dibela, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai dari Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, Purnomo Yusgiantoro mendefinisikan bela negara sebagai sikap perilaku masyarakat yang dijiwai oleh kecintaan pada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Konsep bela negara ini penting dalam memahami bagaimana warga negara dapat berkontribusi terhadap pertahanan dan pembangunan negara mereka. Dalam konteks ini, bela negara bukan hanya tentang pertahanan militer, tetapi juga tentang bagaimana warga negara dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik negara mereka.

Selain itu, konsep bela negara juga mencakup ide tentang bagaimana warga negara dapat bekerja sama untuk menghadapi ancaman dari pihak asing. Dimana ancaman dapat berupa ancaman militer, tetapi juga dapat berupa ancaman ekonomi, politik, atau sosial. Oleh karena itu, bela negara adalah tentang bagaimana warga negara dapat bersatu untuk melindungi negara dan bangsa mereka dari ancaman apa pun.

Perlu dipahami, konsep bela negara tidak berarti bahwa setiap warga negara diharuskan untuk menjadi anggota militer atau untuk berpartisipasi dalam pertahanan militer negara. Sebaliknya, bela negara adalah tentang bagaimana setiap warga negara, terlepas dari profesi atau latar belakang mereka, dapat berkontribusi terhadap pertahanan dan pembangunan negara mereka.

Konsep bela negara bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring perubahan kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Keberhasilan konsep ini tergantung pada sejauh mana masyarakat dapat memahami, meresapi, dan menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari serta pada sejauh mana pemerintah dapat menciptakan kebijakan dan program yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam upaya bela negara.

Konsep bela negara juga perlu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ancaman keamanan semakin kompleks, termasuk serangan siber, terorisme, dan tantangan lingkungan global. Oleh karena itu, konsep bela negara harus mencakup strategi yang dapat mengatasi berbagai ancaman ini. Peningkatan kapasitas pertahanan siber, kerjasama internasional, dan strategi adaptasi terhadap ancaman non-militer menjadi bagian integral dari konsep bela negara yang modern.

Sebagai kesimpulan, konsep bela negara mencakup kesadaran, partisipasi aktif, dan kesiapan warga negara untuk melibatkan diri dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Pendidikan kewarganegaraan, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adalah elemen-elemen kunci yang mendukung konsep ini. Dengan memahami dan menerapkan konsep bela negara secara komprehensif, suatu negara dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan keamanan dalam dunia yang terus berubah.

## **1.7. Dasar Hukum Bela Negara**

Dasar hukum bela negara diatur dalam Pasal 9 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurut pasal tersebut, salah satunya bela negara diselenggarakan melalui pengabdian sesuai dengan profesi.

Dasar hukum ini penting karena menunjukkan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi juga tanggung jawab semua warga negara. Dengan kata lain, setiap warga negara, terlepas dari profesi atau latar belakang mereka, memiliki peran dalam bela negara. Ini mencakup berbagai profesi, mulai dari guru dan dokter hingga insinyur dan petani.

Selain itu, dasar hukum ini juga menunjukkan bahwa bela negara bukan hanya tentang pertahanan militer, tetapi juga tentang bagaimana setiap warga negara dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik negara mereka. Dengan kata lain, bela negara adalah tentang bagaimana setiap warga negara dapat menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk membantu membangun dan mempertahankan negara mereka.

Namun, penting untuk dipahami bahwa meskipun bela negara adalah tanggung jawab semua warga negara, ini tidak berarti bahwa setiap warga negara diharuskan untuk menjadi anggota militer atau untuk berpartisipasi dalam pertahanan militer negara. Sebaliknya, bela negara adalah tentang bagaimana setiap warga negara, terlepas dari profesi atau latar belakang mereka, dapat berkontribusi terhadap pertahanan dan pembangunan negara mereka.

## **1.8. Kebutuhan Bela Negara dalam Konteks Negara-Bangsa**

Bela negara sangat penting dalam konteks negara-bangsa karena merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi NKRI dan mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara.

Kebutuhan bela negara dalam konteks negara-bangsa dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif politik, bela negara adalah tentang bagaimana warga negara dapat berkontribusi terhadap stabilitas dan keamanan negara mereka. Dalam konteks ini, bela negara dapat melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari partisipasi dalam proses politik hingga kerja sama dengan pemerintah dan lembaga lain untuk menghadapi ancaman politik di Indonesia

Dari perspektif sosial, bela negara adalah tentang bagaimana warga negara dapat bekerja sama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks ini, bela negara dapat melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil hingga kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah sosial.

Dari perspektif ekonomi, bela negara adalah tentang bagaimana warga negara dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara mereka. Dalam konteks ini, bela negara dapat melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari partisipasi dalam pasar kerja hingga kerja sama dengan perusahaan dan industri untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Konsep bela negara dalam konteks negara-bangsa memegang peran yang sangat penting dalam membangun identitas bersama, memelihara kesatuan, dan mengelola keberagaman dalam masyarakat yang memiliki ciri-ciri budaya, bahasa, dan sejarah yang beragam. Negara-bangsa, sebagai entitas politik yang diidentifikasi oleh persamaan identitas di antara warganya, memerlukan strategi dan pendekatan khusus dalam mengimplementasikan konsep bela negara. Dalam kerangka ini, kebutuhan bela negara tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan militer tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan politik yang menciptakan fondasi bagi kesatuan dan keberlanjutan bangsa.

Pentingnya konsep bela negara dalam konteks negara-bangsa dapat dipahami melalui beberapa dimensi kunci. Pertama-tama, identitas nasional menjadi landasan utama dalam memahami dan mengartikulasikan bela negara. Identitas nasional ini dibangun di atas persamaan budaya, bahasa, dan sejarah yang membedakan suatu negara-bangsa dari negara-negara lain. Bela negara, dalam hal ini, adalah upaya bersama untuk mempertahankan dan memelihara identitas nasional ini sebagai dasar kesatuan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam membangun kesadaran akan identitas nasional. Dalam konteks bela negara, pendidikan bukan hanya menjadi alat untuk menyampaikan pengetahuan tetapi juga untuk membentuk nilai-nilai, sikap, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Program pendidikan kewarganegaraan harus merangkul keberagaman budaya, mendorong rasa bangga terhadap warisan budaya, dan membimbing generasi muda untuk memiliki pemahaman mendalam akan peran mereka dalam membangun dan melindungi negara-bangsa.

Perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor PKS/170/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka merupakan dasar pemikiran bela negara yang penting. Perjanjian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempromosikan bela negara melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 14 Ayat 5 huruf (g) juga menegaskan bahwa bentuk pembelajaran dapat berupa pertukaran pelajar (kebijakan MBKM). Ini menunjukkan bahwa bela negara dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan melalui berbagai cara, termasuk pertukaran pelajar.

Surat dari Kepala LLDikti Wilayah III Nomor: 4114/LL3/KM.00.02/2022 tanggal 07 September 2022 perihal undangan sosialisasi pelaksanaan pertukaran mahasiswa merdeka-pembinaan kesadaran bela negara (PMM-PKBN) juga menunjukkan upaya pemerintah dalam mempromosikan bela negara melalui pendidikan.

Partisipasi aktif masyarakat adalah elemen kunci dalam bela negara di konteks negara-bangsa. Masyarakat memiliki peran vital dalam membentuk dan memelihara identitas nasional. Partisipasi ini bisa mencakup berbagai kegiatan, seperti festival budaya, pelestarian tradisi, dukungan terhadap seni lokal, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial yang membangun kesatuan. Gotong royong dan solidaritas masyarakat adalah fondasi dari partisipasi ini, menciptakan ikatan yang kuat di antara warga negara.

Bahasa juga memainkan peran penting dalam bela negara di negara-bangsa. Bahasa nasional menjadi alat komunikasi yang menghubungkan berbagai suku dan etnis di dalam negara. Pemeliharaan dan pengembangan bahasa menjadi aspek penting dalam bela negara, bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai simbol identitas dan persatuan.

Pentingnya bela negara dalam konteks negara-bangsa juga dapat dilihat melalui semangat patriotisme dan kebanggaan nasional. Bela negara menciptakan kesadaran akan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan negara-bangsa. Semangat ini tidak hanya terbatas pada rasa cinta terhadap tanah air tetapi juga pada rasa cinta terhadap nilai-nilai, sejarah, dan warisan budaya yang membentuk identitas nasional.

Dalam konteks ini, bela negara juga membutuhkan kesiapan untuk memahami dan mengelola keberagaman. Negara-bangsa seringkali terdiri dari berbagai suku, agama, dan kelompok etnis. Oleh karena itu, bela negara mencakup kerangka kerja yang menghormati dan memelihara keberagaman ini, menciptakan ruang bagi setiap individu dan kelompok untuk merasa diakui dan dihargai sebagai bagian integral dari mosaik nasional.

Pemahaman terhadap tantangan global juga menjadi elemen penting dalam bela negara di konteks negara-bangsa. Negara-bangsa tidak dapat mengisolasi diri dari dinamika global, dan oleh karena itu, bela negara mencakup kesiapan untuk terlibat dalam diplomasi internasional, bekerjasama dengan negara lain, dan menjawab tantangan global bersama-sama. Dalam hal ini, bela negara menjadi strategi adaptasi terhadap perubahan dunia yang cepat

Selain itu, perlindungan lingkungan juga menjadi bagian integral dari bela negara di negara-bangsa. Keberlanjutan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas negara-bangsa. Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, karena kondisi lingkungan yang baik berkontribusi pada ketahanan nasional.

Dengan demikian, bela negara dalam konteks negara-bangsa mencakup upaya menyeluruh yang tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan fisik tetapi juga pada pembentukan dan pemeliharaan identitas nasional, partisipasi aktif masyarakat, dan adaptasi terhadap dinamika global. Konsep ini menjadi fondasi bagi keberlanjutan dan kesinambungan suatu negara-bangsa di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapinya. Dalam mengimplementasikan bela negara, penting untuk memahami konteks khusus negara-bangsa dan menciptakan pendekatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan uniknya.

## **1.9. Peran Bela Negara dalam Menjaga Kedaulatan dan Integritas**

Dari pandangan yang disampaikan oleh Carl von Clausewitz melalui karyanya bertajuk “*On War*” (Tentang Perang), kita dapat menarik garis hubung bagaimana peran bela negara dalam menjaga kedaulatan dan integritas. Clausewitz memahami pentingnya militer dan perang sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik. Menurutnya, perang adalah bentuk ekstrem dari politik, dan militer atau angkatan

bersenjata adalah alat yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuannya.

Peran bela negara, yang mencakup angkatan bersenjata, adalah penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara. Mereka memiliki tugas untuk melindungi negara dari ancaman eksternal dan menjaga integritas wilayah negara. Clausewitz menekankan bahwa militer harus beroperasi sesuai dengan kebijakan dan tujuan politik negara.

Menurut Clausewitz, perang adalah upaya terakhir yang harus diambil setelah semua upaya politik dan diplomasi telah digunakan. Oleh karena itu, Bela negara harus diarahkan untuk menghindari konflik bersenjata jika memungkinkan, dan hanya menggunakan kekuatan militer sebagai opsi terakhir.

Clausewitz juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan dan tujuan politik dalam menentukan sasaran perang. Angkatan bersenjata harus memahami bahwa tugas mereka adalah mendukung tujuan politik negara, dan bukan mengambil alih kendali politik.

Dalam konteks bela negara, peran intelijen militer dan diplomasi dalam mencegah konflik bersenjata dan menjaga kedaulatan juga penting. Diplomasi dapat digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan menghindari konfrontasi.

Secara keseluruhan, pandangan Clausewitz tentang peran bela negara menggarisbawahi pentingnya integrasi antara aspek militer, politik, dan diplomasi dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara. Bela negara harus menjadi instrumen yang digunakan secara bijaksana oleh negara untuk mencapai tujuan politiknya tanpa mengorbankan stabilitas dan perdamaian.

Agar generasi muda, khususnya Gen Z, lebih mudah dalam memahami konsep Carl von Clausewitz tentang peran bela negara, tentu diperlukan beberapa pendekatan yang relevan. *Pertama*, generasi muda perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya bela negara dan peran militer dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan yang mencakup sejarah militer, strategi pertahanan, dan pentingnya diplomasi dalam menghindari konflik bersenjata. Pendidikan ini dapat diselenggarakan di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

*Kedua*, generasi Z cenderung merespon lebih baik terhadap pembelajaran yang interaktif dan teknologi berbasis. Oleh karena itu, pembelajaran online, platform edukasi digital, dan aplikasi berbasis permainan dapat digunakan untuk mengajarkan konsep bela negara. Ini akan membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi mereka. *Ketiga*, menghadirkan studi kasus sejarah dan kontemporer dapat membantu generasi Z melihat bagaimana konsep Clausewitz berlaku dalam situasi nyata. Mereka dapat mempelajari konflik-konflik internasional yang melibatkan diplomasi, strategi militer, dan dampak politiknya.

*Keempat*, mendorong generasi Z untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat tentang masalah keamanan nasional dan peran bela negara dapat membantu mereka memahami berbagai perspektif. Ini juga akan melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka. *Kelima*, keterlibatan sosial dalam kegiatan yang mendukung bela negara, seperti kegiatan relawan, kampanye sosial, atau program kemanusiaan, dapat membantu generasi Z merasa terlibat secara langsung dalam mendukung kepentingan nasional.

*Keenam*, generasi Z perlu diberitahu tentang keterkaitan antara isu-isu global, konflik internasional, dan dampaknya terhadap negara. Mereka harus memahami bahwa tindakan negara dalam isu-isu internasional dapat berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara mereka. *Ketujuh*, penting juga untuk mempromosikan nilai-nilai kepemimpinan di kalangan generasi Z. Mereka harus diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka melalui program-program yang relevan.

Melalui pendekatan-pendekatan ini, generasi Z dapat dipersiapkan untuk berpartisipasi aktif dalam bela negara dan memahami peran mereka dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara. Pemahaman yang baik tentang konsep Clausewitz dan aplikasinya dalam konteks modern akan membantu mereka menjadi pemimpin masa depan yang berkomitmen pada kepentingan nasional dan perdamaian global.

## **1.10. Urgensi Bela Negara**

Peran bela negara, termasuk militer, sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas suatu negara-bangsa. Pemikiran dari Carl von Clausewitz dan doktrin-doktrin militer modern memberikan wawasan yang bermanfaat dalam konteks ini. Clausewitz mengemukakan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain, dan tujuannya adalah mencapai tujuan politik. Dalam konteks ini, peran bela negara, terutama militer, adalah menjaga kedaulatan dan integritas negara dengan mengimplementasikan instruksi politik<sup>5</sup>. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks

---

<sup>5</sup> Safril Hidayat, "Doktrin Pertahanan dalam Mewujudkan Keamanan

Indonesia berdasarkan pemikiran Clausewitz seperti diuraikan berikut.

*Penggunaan Kekuatan Sesuai Kebijakan Politik.* Militer harus beroperasi sesuai dengan panduan dan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan penggunaan kekuatan militer harus selalu mendukung tujuan politik nasional. Di sini berlaku supremasi sipil<sup>6</sup>.

*Kemampuan Berperang yang Efektif.* Militer harus memiliki kemampuan efektif untuk melindungi kedaulatan dan integritas negara. Ini termasuk pemeliharaan dan modernisasi peralatan serta pelatihan personel militer<sup>7</sup>.

*Keterlibatan Publik.* Pemikiran Clausewitz juga menggaris-bawahi pentingnya dukungan dan legitimasi dari publik terhadap tindakan militer<sup>8</sup>. Keterlibatan publik dalam keputusan militer penting untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dalam politik pertahanan. Moral dan dukungan publik memiliki

---

Maritim: Perspektif Posmodernisme,” *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 5, no. 2 (2015): 71–92, <https://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.358>.

<sup>6</sup> Gunawan, Aditya Batara. “Kontrol Sipil Atas Militer Dan Kebijakan Pertahanan Di Indonesia Pasca Orde Baru.” *Jurnal Politik*, vol. 2, no. 2, Universitas Indonesia, Directorate of Research and Public Service, Nov. 2017, p. 197. *Crossref*, <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.117>.

<sup>7</sup> Tohari, Imam, et al. “Urgensi Pemeliharaan Dan Perawatan Alutsista Guna Mendorong Modernisasi Alutsista Militer Dalam Menjaga Keamanan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 6, no. 8, Ainara, Aug. 2023, pp. 5899–902. *Crossref*, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2632>.

<sup>8</sup> Prihadi, Fierman, et al. “Interoperabilitas Dalam Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh TNI Au Dalam Menangani Pembajakan Dan Perompakan Bersenjata (Kajian Keamanan Di Selat Malaka).” *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, vol. 1, no. 2, Universitas Padjadjaran, Sept. 2022, p. 135. *Crossref*, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i2.39589>.

dampak besar pada efektivitas operasi militer. Tentara yang mendapat dukungan dan legitimasi dari publik akan lebih termotivasi dan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk berhasil dalam perang. Dalam “Total War”—di mana seluruh masyarakat, termasuk warga sipil, terlibat dalam konflik—maka dukungan dan legitimasi publik menjadi lebih krusial daripada sebelumnya, karena seluruh masyarakat terlibat dalam upaya perang. Perang bukan hanya masalah militer semata, melainkan juga masalah politik dan sosial. Dukungan publik dan legitimasi adalah faktor-faktor yang tidak boleh diabaikan dalam merencanakan dan menjalankan operasi militer, terutama dalam konteks perang modern.

Doktrin-doktrin militer modern juga mendukung peran bela negara dalam menjaga kedaulatan dan integritas. Ini termasuk konsep pertahanan terintegrasi, doktrin perang hibrid, dan strategi pertahanan nasional yang komprehensif. Dalam konteks Indonesia, doktrin-doktrin ini dapat diterapkan dengan cara berikut:

- a. Pertahanan Terintegrasi.* Melibatkan seluruh elemen pertahanan negara, termasuk militer, polisi, dan sektor intelijen, untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap kedaulatan dan integritas.
- b. Doktrin Perang Hibrid.* Menghadapi ancaman modern yang seringkali bersifat multifaset dan tidak konvensional, seperti perang siber dan propaganda. Militer dan lembaga keamanan harus siap menghadapinya.
- c. Strategi Pertahanan Nasional yang Komprehensif.* Ini mencakup kerja sama antara berbagai departemen pemerintah, termasuk diplomatik, ekonomi, dan pertahanan,

untuk mengatasi ancaman yang mengancam kedaulatan dan integritas.

Dengan menerapkan pemikiran Clausewitz dan doktrin-doktrin militer modern, serta dengan menjaga kerja sama antara elemen-elemen pertahanan nasional, Indonesia dapat memperkuat peran bela negara dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara-bangsa.

Kaitan antara pemikiran Clausewitz dan doktrin-doktrin militer modern dengan Generasi Z adalah relevansi dan aplikasi konsep-konsep ini dalam konteks perkembangan militer dan keamanan global yang sedang berlangsung, yang dapat memengaruhi generasi muda, termasuk Generasi Z. Berikut adalah beberapa cara di mana pemikiran Clausewitz dan doktrin-doktrin militer modern dapat berkaitan dengan Generasi Z:

- a. *Teknologi dan cybersecurity*. Generasi Z tumbuh di era teknologi informasi dan internet. Mereka lebih terpapar dengan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan siber dan cyber warfare. Pemikiran Clausewitz tentang perang sebagai kelanjutan dari politik dapat diaplikasikan dalam konteks konflik siber, di mana tindakan siber juga dapat menjadi bagian dari strategi politik.
- b. *Multifaset dan asimetris*. Konflik modern seringkali bersifat multifaset dan asimetris, yang mencakup aspek politik, militer, ekonomi, dan informasi. Generasi Z yang aktif dalam media sosial dan terlibat dalam diplomasi digital dapat memahami dan menerapkan pemahaman ini dalam konteks konflik modern yang kompleks.

- c. *Pentingnya keterlibatan publik.* Pemikiran Clausewitz tentang pentingnya dukungan publik dalam konflik juga relevan bagi Generasi Z yang cenderung kritis terhadap tindakan pemerintah. Mereka dapat memainkan peran dalam mempengaruhi opini publik dan memahami konflik berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika.
- d. *Pertahanan terintegrasi.* Generasi Z yang memahami pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas departemen dalam menghadapi ancaman dapat berperan dalam mempromosikan pendekatan pertahanan terintegrasi yang efektif.
- e. *Kesadaran lingkungan.* Terkait dengan doktrin-doktrin militer modern yang mencakup keberlanjutan dan dampak lingkungan, Generasi Z cenderung memiliki kesadaran lingkungan yang kuat. Mereka dapat mendorong praktik militer yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan pemahaman dan penerapan konsep-konsep ini dalam konteks Generasi Z, mereka dapat berperan dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara-bangsa di era yang semakin terkoneksi dan kompleks. Generasi Z memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dalam domain militer, keamanan, dan politik, serta meneruskan prinsip-prinsip penting yang ditemukan dalam pemikiran Clausewitz dan doktrin-doktrin militer modern.

Bela negara diperlukan untuk menjaga negara-bangsa, karena negara menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang dapat mengganggu kedaulatan, integritas, dan stabilitasnya. Ada beberapa alasan mengapa bela negara penting.

*Pertama*, bela negara melibatkan upaya untuk melindungi kedaulatan negara, yang merupakan hak eksklusif suatu negara untuk mengambil keputusan internal dan eksternal tanpa campur tangan asing. *Kedua*, bela negara adalah bagian integral dari menjaga kepentingan nasional yang mencakup pertahanan, keamanan, dan stabilitas negara.

*Ketiga*, pihak yang terlibat dalam bela negara (terutama militer) memiliki peran penting dalam menganalisis dan merespons berbagai ancaman, termasuk konflik bersenjata, terorisme, atau intervensi asing. *Keempat*, bela negara melibatkan semua elemen keamanan dan pertahanan negara, termasuk militer, kepolisian, dan pertahanan sipil. Ini memungkinkan penanganan ancaman secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Bela negara juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Peran itu di antaranya mencakup: *Pertama*, militer dan keamanan nasional menjaga negara dari ancaman fisik, termasuk konflik bersenjata, yang dapat mengganggu stabilitas politik. *Kedua*, keamanan perbatasan dan wilayah negara adalah bagian dari bela negara dan dapat mencegah invasi asing yang dapat mempengaruhi stabilitas.

*Ketiga*, selain ancaman militer, bela negara juga melibatkan perlindungan terhadap ancaman non-militer seperti terorisme dan gangguan internal. *Keempat*, dalam situasi krisis ekonomi atau sosial, militer dan lembaga keamanan dapat mendukung pemerintah dalam manajemen krisis dan pemulihan.

Bela negara memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan nasional, karena keduanya saling memengaruhi. Peran bela negara dalam pembangunan nasional meliputi: *Pertama*, mendukung adanya stabilitas dan aman untuk pembangunan.

Tanpa stabilitas dan keamanan yang cukup, pembangunan nasional sulit terwujud. Bela negara menciptakan kondisi yang aman bagi pembangunan ekonomi dan sosial. *Kedua*, TNI dan Polri juga dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, di wilayah yang masih sering terjadi gangguan keamanan, merupakan contoh yang nyata.

*Ketiga*, melalui pendidikan militer dan pelatihan, bela negara dapat membangun kapasitas manusia yang mendukung pembangunan nasional. Pengejawantahannya di kampus perguruan tinggi antara lain dengan adanya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Resimen Mahasiswa. *Keempat*, bela negara juga dapat mencegah atau meredakan konflik internal yang dapat menghambat pembangunan. Perlu dipahami, bahwa hubungan yang seimbang dan terkoordinasi antara bela negara dan pembangunan nasional sangat penting untuk mencapai tujuan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bagi suatu negara-bangsa.

### **1.11. Tantangan dan Peluang**

Tantangan utama dalam menjalankan konsep negara-bangsa adalah beragamnya etnis, budaya, dan agama di Indonesia. Tantangan ini muncul karena setiap kelompok mungkin memiliki kepentingan dan identitasnya sendiri, yang bisa menyebabkan ketegangan atau konflik.

Dalam konteks pendidikan bela negara bagi generasi Z, tantangan ini menekankan perlunya mempromosikan kerukunan, toleransi, dan pluralisme budaya. Generasi Z perlu

memahami bahwa perbedaan-perbedaan ini seharusnya menjadi sumber kekuatan dalam memperkuat negara-bangsa, bukan ancaman. Pendidikan bela negara harus memberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga stabilitas dan kedaulatan negara dengan mengelola keragaman ini secara bijak.

Tantangan lain adalah dampak globalisasi dan teknologi informasi. Generasi Z hidup dalam era di mana informasi mudah didapatkan dari seluruh dunia, dan batas-batas negara semakin kabur. Tantangan ini menekankan pentingnya memahami bahwa negara-bangsa masih memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara.

Pendidikan bela negara harus membekali generasi Z dengan pengetahuan tentang diplomasi, kebijakan luar negeri, dan kerja sama internasional. Generasi Z perlu menyadari bahwa memahami peran negara-bangsa dalam konteks global adalah kunci untuk menjaga kedaulatan negara.

Peluang bagi generasi Z dalam memperkuat negara-bangsa melalui pendidikan bela negara sangat besar. Mereka tumbuh dalam era di mana teknologi informasi memungkinkan mereka terhubung dengan sesama generasi di seluruh dunia. Hal ini dapat digunakan sebagai peluang untuk mempromosikan pemahaman tentang konsep negara-bangsa dan nilai-nilai patriotisme. Generasi Z dapat berpartisipasi dalam kampanye sosial, diskusi global, atau kegiatan lintas-budaya untuk memperkuat kesadaran akan konsep negara-bangsa.

Pendidikan bela negara juga memberi generasi Z kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung kepentingan nasional. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan memainkan peran penting

dalam memperkuat negara-bangsa. Peluang untuk membentuk opini, mengambil tindakan, dan berkontribusi pada keberhasilan negara-bangsa adalah kunci dalam pendidikan bela negara bagi generasi Z.

Sebagai contoh keberhasilan negara-bangsa dalam menghadapi ancaman dan tantangan, kita dapat merujuk pada negara-negara seperti Kanada, Norwegia, dan Finland. Kanada adalah contoh negara yang memiliki beragam etnis dan budaya namun tetap menjaga stabilitas dan kerukunan internalnya. Generasi Z perlu mempelajari bagaimana Kanada telah berhasil mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan budaya ke dalam identitas nasionalnya, menghormati hak-hak individu, dan menjaga perdamaian dalam masyarakatnya.

Negara-negara seperti Norwegia dan Finland juga merupakan contoh keberhasilan negara-bangsa dalam memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka. Generasi Z dapat memahami bagaimana negara-bangsa ini telah mengelola sumber daya mereka dengan bijak dan mempromosikan inovasi teknologi untuk kepentingan nasional.

Dalam konteks pendidikan bela negara, generasi Z dapat mempelajari bagaimana negara-negara ini menjaga kedaulatan mereka dengan memahami peran negara-bangsa dalam era globalisasi dan teknologi informasi. Mereka juga dapat mengambil inspirasi dari keberhasilan negara-negara ini dalam mempromosikan kerukunan sosial dan inklusi budaya sebagai bagian dari konsep negara-bangsa.

## **1.12. Relevansi Bela Negara dalam Konteks Global**

Relevansi bela negara dalam konteks global sangat berkaitan dengan diplomasi internasional. Bela negara bukan hanya tentang kesiapan fisik untuk pertahanan, tetapi juga tentang upaya diplomatis dalam mempromosikan kepentingan nasional di tingkat internasional.

Generasi Z, yang tumbuh dalam era globalisasi, dapat memainkan peran penting dalam diplomasi internasional dengan memahami pentingnya menjaga integritas negara dan menjalankan diplomasi yang kuat. Mereka dapat berpartisipasi dalam dialog antarbangsa, konferensi global, atau organisasi internasional untuk mempromosikan perdamaian, perdagangan, dan kerja sama global.

Contohnya, generasi Z dapat terlibat dalam isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, mengadvokasi solusi yang berkelanjutan dan mendukung kesepakatan internasional seperti Perjanjian Paris. Dengan cara ini, bela negara bukan hanya tentang perlindungan fisik negara, tetapi juga perlindungan terhadap tantangan global yang memengaruhi keberlangsungan negara-bangsa.

Relevansi bela negara dalam konteks global juga dapat dilihat dalam perbandingan dengan praktik Bela negara di negara-negara lain. Generasi Z perlu memahami berbagai model dan pendekatan yang digunakan oleh negara-negara lain dalam mengelola pertahanan dan kepentingan nasional mereka. Mereka dapat belajar dari praktik-praktik terbaik dan mengadaptasinya sesuai dengan situasi Indonesia.

Contoh perbandingan yang dapat memberikan inspirasi adalah negara-negara Skandinavia, seperti Norwegia

dan Swedia, yang berhasil mengintegrasikan pertahanan fisik dengan upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Generasi Z dapat mempertimbangkan bagaimana konsep bela negara dapat diterapkan dengan menggabungkan aspek-aspek pertahanan dengan upaya sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan.

Bela negara memiliki peran penting dalam membentuk citra dan peran Indonesia di tingkat global. Generasi Z dapat berperan dalam mempromosikan citra positif Indonesia dengan menjadi duta muda yang mampu memahami dan mengartikulasikan nilai-nilai negara-bangsa, termasuk toleransi, pluralisme, dan persatuan. Mereka dapat melalui media sosial, blog, atau partisipasi dalam pertukaran budaya untuk mengkomunikasikan pesan positif tentang Indonesia.

Selain itu, generasi Z juga dapat berperan dalam menjaga reputasi Indonesia di tingkat global dengan mendukung upaya-upaya diplomatik yang dijalankan oleh negara. Mereka dapat terlibat dalam dialog budaya, program pertukaran pelajar, atau kampanye diplomasi publik yang membantu memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Dalam konteks global, generasi Z memiliki peluang untuk memainkan peran yang signifikan dalam mempromosikan citra positif Indonesia dan mendukung peran Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam diplomasi internasional serta menjalankan konsep bela negara yang terintegrasi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa Indonesia tetap relevan dan diperhitungkan di dunia global saat mereka menjadi pemimpin masa depan.



## II

# PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNASIONAL: GLOBAL DAN REGIONAL

**P**ERUBAHAN lingkungan strategis internasional selalu memiliki dampak signifikan: dampak positif maupun negatif. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan nasional suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan lingkungan strategis internasional berkembang seiring dengan peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan antar negara di dunia. Perubahan tersebut berlangsung begitu cepat dalam berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Tak ada pilihan lain selain daya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul kemudian.

Percepatan perubahan tersebut digambarkan dalam kondisi fluktuatif dan saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, tantangan global ke depan mencerminkan kompleksitas dan perubahan yang cepat bahkan meledak. Perubahan terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi digital dan komputasi—termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*)—memiliki dampak signifikan terhadap tantangan global yang kita hadapi. Sementara itu, pandemi Covid-19 telah mempercepat perubahan tatanan kehidupan sosial dan ekonomi yang memicu perubahan pola perilaku masyarakat.

Dengan demikian kita sadar bahwa Perubahan adalah keniscayaan dan satu-satunya yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri.

Saat ini kita dihadapkan pada megatrend global yakni pola perubahan besar dan berkelanjutan, yang mempengaruhi berbagai sektor: politik, ekonomi, sosial, teknologi dan aspek kehidupan manusia lainnya. Megatrend ini saling terkait menciptakan ekspansi dan kontraksi secara global, regional, bahkan nasional. Seperti pada perubahan iklim dan kemajuan teknologi dapat menjadi faktor pendorong terjadinya polikrisis (*polycrisis*)—krisis global yang saling terkait, terjalin dan memperburuk satu sama lain. Krisis yang bersifat interkoneksi, terkait satu sama lain, diproyeksi berdampak pada krisis kemanusiaan secara global di masa datang.<sup>1</sup>

Dinamika perubahan global ini mengartikulasikan banyak krisis yang berpotongan dari dunia kontemporer umat manusia. Bencana lingkungan yang saling terkait, pandemi global, invasi Rusia ke Ukraina, konflik Israel-Palestina dan potensi konflik nuklir terjadi dalam struktur militerisasi, eksploitasi, dan ketidaksetaraan yang mengakar. Dengan kata lain, kehidupan manusia dihadapkan pada potensi bencana yang bersifat jamak. Kita hidup di tengah ancaman-ancaman yang saling terkoneksi—ketidakpastian kerja sama geo-politik, krisis ekologi, hingga volatilitas ekonomi global. Polikrisis ini menekankan pentingnya pemahaman berbagai krisis ini yang saling bersinggungan dan saling memengaruhi.

Secara mendasar, fenomena global mempengaruhi dan memberi dampak pada perubahan lingkungan strategis (*stra-*

---

<sup>1</sup> Adam Tooze, "Welcome to The World of The Polycrisis," *Financial Times*, (28 Oktober 2022), <https://www.ft.com/content/498398e7-11b1-494b-9cd3-6d669dc3de33> (Diakses 15 November 2023)

*tegic environment*), meliputi aspek lingkungan, politik, ekonomi, teknologi dan sosial. Semua fenomena ini bersifat kompleks dan saling terkait, menciptakan tantangan yang memerlukan kerja sama internasional dan adaptasi strategis untuk mengelola dampaknya. Bagian berikutnya dalam tulisan ini mencoba mengurai beberapa fenomena global tersebut.

## **2.1. Perubahan Demografi**

Perubahan demografi global memberikan pengaruh pada aspek perekonomian dan sosial dunia. Perubahan demografi global merujuk pada perubahan dalam karakteristik penduduk dunia sebagai hasil dari faktor-faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. George Friedman, seorang analis geopolitik, menyoroti peran penting perubahan demografi dalam membentuk masa depan dunia. Dalam pandangan Friedman, negara-negara yang mengalami penuaan penduduk dan penurunan jumlah penduduk cenderung menghadapi beberapa tantangan dan dampak yang dapat mengubah peta geopolitik.<sup>2</sup>

Jumlah penduduk bumi menurut laporan *World Population Prospects (2022)* mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diproyeksikan terus bertambah. Pada 2030 diprediksi akan mencapai 8,5 miliar dan terus meningkat menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050. Asia Timur dan Asia Tenggara pada 2022 menjadi wilayah dengan jumlah populasi paling padat, yakni mencapai 2,3 miliar jiwa— setara 29 persen dari total populasi global. Adapun wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Benua Afrika (2,5 persen) dan Benua

<sup>2</sup> George Friedman, *The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century*, (New York Doubleday, 2009)

Eropa menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk terendah (0,01 persen).<sup>3</sup>

Peningkatan jumlah populasi manusia di bumi memberikan tantangan pada pemenuhan kebutuhan hidup manusia dengan kondisi keterbatasan sumber daya alam dan lahan. Para ilmuwan telah memperingatkan tentang bahaya dan malapetaka yang bakal terjadi sekiranya tidak ada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. Ekonom Inggris, Thomas Robert Malthus, menjelaskan bagaimana populasi dan produksi makanan berkembang.<sup>4</sup> Dalam hukum Malthus, pertumbuhan penduduk digambarkan sebagai suatu deret ukur, yang berarti cenderung berkembang secara eksponensial. Artinya, pertumbuhan penduduk memiliki kecenderungan untuk meningkat secara geometris (1, 2, 4, 8, dst.), sementara ketersediaan sumber daya, terutama pangan, berkembang secara aritmetika (1, 2, 3, 4, dst.).<sup>5</sup> Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk memiliki kecenderungan untuk melebihi kemampuan bumi dalam menyediakan sumber pangan, energi dan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi. Jika pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa terkendali, akan menyebabkan kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan.

Berdasarkan hitungan PBB dan OECD, ambang batas angka kelahiran yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas populasi adalah 2,1 anak per perempuan. Ini dengan asumsi tidak ada migrasi dan tingkat kematian tidak berubah. Angka ini disebut sebagai Tingkat Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*/

---

<sup>3</sup> United Nation, "World Population Prospects 2022," Department of Economic and Social Affairs, No.3, (2022)

<sup>4</sup> Thomas Robert Malthus, *An Essay on the Principle of Population*, (London: J. Johnson, 1798)

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 8

TFR) pada tingkat penggantian. Jika tingkat kelahiran per perempuan tetap pada 2,1 anak atau lebih tinggi, populasi cenderung stabil atau bahkan tumbuh jika ditambahkan dengan angka migrasi yang positif. Namun, jika tingkat kelahiran turun di bawah 2,1, dan faktor-faktor lain tetap konstan, maka populasi akan cenderung menurun seiring waktu.

Sementara itu, laporan PBB mencatat adanya penurunan angka kelahiran global. Artinya, meskipun jumlah populasi manusia di bumi mengalami peningkatan, akan tetapi laju pertumbuhan penduduk secara umum mengalami pelambatan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat bahwa faktor penurunan angka kelahiran secara dramatis selama beberapa dekade terakhir adalah tertundanya pembentukan keluarga dan kelahiran anak, serta berkurangnya jumlah anggota keluarga yang diinginkan.<sup>6</sup> Statistik global juga mencatat bahwa terjadi penurunan jumlah anak per perempuan, seperti yang diukur oleh TFR, dari sekitar 3,7 anak pada tahun 1980 menjadi 2,4 anak pada 2022. Hal ini mencerminkan tren global penurunan tingkat kelahiran selama empat dekade terakhir. Pelambatan laju pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi faktor menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup manusia, serta meningkatnya level pendidikan terutama pada perempuan.

Negara-negara yang lebih maju secara ekonomi, mengalami tren demografi serupa dengan tren global, yaitu penurunan tingkat kelahiran. Korea Selatan adalah negara dengan tingkat kelahiran yang sangat rendah, yaitu sekitar 0,84 anak per perempuan, diikuti Jepang yang mencatatkan angka 1,33 kelahiran per perempuan dan China di angka 1,7

---

<sup>6</sup> OECD (2023), Fertility rates (indicator). doi: 10.1787/8272fb01-en (Accessed on 19 November 2023)

kelahiran per perempuan. Sementara itu, sejumlah negara di Uni Eropa, persentase penduduk usia mudanya menurun akibat angka kelahiran yang rendah atau migrasi keluar yang tinggi, sehingga Uni Eropa memiliki umur median penduduk tertua. Artinya, sebagian besar negara-negara maju saat ini didominasi usia penduduk 40 tahun ke atas.

Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura mencatat tingkat kelahiran di bawah dua anak per perempuan (TFR kurang dari dua) yang menunjukkan bahwa populasi suatu negara berada di bawah tingkat penggantian, yaitu tingkat yang diperlukan untuk menjaga stabilnya populasi dari generasi ke generasi tanpa bergantung pada migrasi. Sementara itu, Indonesia, Myanmar, Kamboja, dan Laos sudah mendekati *replacement level* 2,1 anak per perempuan; penduduk akan tumbuh stabil di angka yang rendah dalam 20 tahun ke depan.

Sebagai perbandingan, di beberapa wilayah dunia, khususnya di negara-negara maju, trennya adalah penurunan jumlah anak perempuan. Namun demikian, di Afrika, tingkat kelahiran rata-rata masih tinggi. Hal ini mencerminkan pemahaman umum bahwa sebagian besar peningkatan jumlah penduduk global di masa depan diperkirakan akan terjadi di benua Afrika. Dengan kata lain, proyeksi demografis menunjukkan bahwa sepanjang abad ke-21, sebagian besar peningkatan populasi dunia akan berasal dari Afrika, sementara di wilayah lain, khususnya di negara-negara maju, tingkat kelahiran cenderung menurun. Oleh karena itu, pada tahun 2050, Benua Afrika diproyeksi akan menjadi rumah bagi setidaknya 25% populasi dunia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Edward Paice, "By 2050, a quarter of the world's people will be African – this will shape our future," *The Guardian*, 20 Januari 2020,

Berdasarkan hal di atas, beberapa dekade ke depan, proyeksi demografis menunjukkan akan terjadi pergeseran konsentrasi populasi global menuju kawasan Asia dan Afrika. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kemajuan teknologi yang signifikan. Kondisi ini menempatkan mereka dalam posisi yang potensial untuk menjadi pemimpin dalam ranah teknologi dan ekonomi global.

## **2.2. Geopolitik Multipolar**

Dinamika geopolitik global dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Pergeseran kekuasaan, konflik regional, perubahan ekonomi, dan dinamika hubungan antar negara merupakan beberapa faktor yang ikut mempengaruhi. Dinamika geopolitik global juga ditandai dengan perubahan dari rivalitas ideologi. Perubahan tersebut membawa penekanan baru pada faktor-faktor yang sifatnya pragmatis, seperti kekuatan militer yang tangguh, ekonomi yang kuat, kemajuan teknologi, dan keterampilan diplomasi. Faktor-faktor ini menjadi penentu utama dalam menentukan posisi suatu negara di tingkat global. Namun demikian, bukan berarti isu-isu ideologi telah mati sama sekali. Sebagai instrumen pertarungan politik, isu ideologi politik seperti komunisme versus kapitalisme/liberalisme masih efektif, khususnya di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/20/by-2050-a-quarter-of-the-worlds-people-will-be-african-this-will-shape-our-future> (Diakses 20 November 2023)

<sup>8</sup> Lihat Hermawan Sulistyono dalam uraian mengenai “Lingkungan Yang Berubah” dalam *Democratic Policing*, (Jakarta;Pencil 324, 2017)

Dinamika geopolitik global kemudian mengalami perubahan dengan karakteristik yang bersifat multipolar, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi-politik China dan pertumbuhan negara-negara kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir.<sup>9</sup> Dalam arti ini, geopolitik multipolar merujuk pada suatu kondisi di mana dunia terbagi menjadi beberapa pusat kekuatan atau kutub, yang memiliki pengaruh besar dalam politik internasional. Dalam sistem multipolar, tidak ada satu kekuatan tunggal yang mendominasi secara mutlak. Sebaliknya, ada beberapa negara atau blok kekuatan yang memiliki peran penting dalam membentuk dinamika geopolitik global.

Fenomena geopolitik multipolar menandai era baru tatanan dunia, sekaligus menjadi anti-tesa dari analisis yang pernah dilakukan oleh Francis Fukuyama di tahun 1992. Pandangan Fukuyama mengatakan bahwa ketika Perang Dingin berakhir pada akhir abad ke-20, manusia telah mencapai titik puncak evolusi ideologis dan sejarahnya. Puncak evolusi ideologis itu ditandai dengan penerimaan ideologi demokrasi-liberal, yang mencakup perekonomian pasar bebas dan pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis kemudian dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling efektif dan diterima secara luas—sebagai model—oleh masyarakat di seluruh dunia.<sup>10</sup>

Namun demikian, dalam batas tertentu demokrasi liberal yang didambakan oleh Fukuyama telah mengalami kemunduran dalam satu dekade terakhir. Hal ini diakui

---

<sup>9</sup> Emma Ashford and Evan Cooper, “Yes, The World is Multipolar and That Isn’t Bad News For The United States,” *Foreign Policy*, 05 Oktober 2023

<sup>10</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York; Free Press, 1992).

sendiri oleh Fukuyama. Fukuyama menguraikan fenomena kemunduran liberalisme dan semakin kuatnya negara-negara otoriter seperti China dan Rusia. Pada saat bersamaan terjadi kemunduran negara-negara demokrasi liberal seperti India dan Amerika Serikat.<sup>11</sup> Dalam arti ini, negara-negara Eropa, secara umum dinilai sebagai pemain geopolitik utama dunia. Dalam kelompok ini, AS dan Eropa adalah pembela apa yang disebut “tatanan dunia demokrasi liberal”. Di pihak lain ada China dan Rusia yang dipandang penentang nilai-nilai AS dan Eropa.<sup>12</sup> Pada titik ini ketegangan AS-Eropa dengan China-Rusia membawa dampak pada persaingan negara-negara tersebut untuk memberikan pengaruh pada aliansi kerja sama ekonomi-politik yang sifatnya pragmatis pada beberapa negara di dunia.

Oleh karena itu, perubahan geopolitik global saat ini tidak sekedar mencerminkan persaingan ideologi negara yang sifatnya bipolar seperti yang terjadi selama masa Perang Dingin AS-Uni Soviet (1947–1990), pun Unipolar dengan posisi AS pasca-perang dingin sebagai kekuatan utama yang memiliki dominasi dan pengaruh signifikan atas politik dunia. Akan tetapi, dinamika geopolitik dunia saat ini mengarah pada sifat Multipolar atau Tripolar. Kekuatan dunia terbagi antara Amerika Serikat, Rusia, dan China. Inti dari pergolakan ini adalah evolusi peran yang dimainkan oleh AS dan China, serta perubahan hubungan antara kedua raksasa ekonomi ini. Pola pengaruh, kerja sama dan persaingan juga berubah di antara

---

<sup>11</sup> Francis Fukuyama, “A Country of Their Own: Liberalism Needs the Nation,” *Foreign Affairs*, Vol. 101, Issue 3 (May/June 2022), pp. 80-91

<sup>12</sup> Prince Michael of Liechtenstein, “The new geopolitical play,” GIS/Geopolitical Intelligence Services Dossier, 12 Januari 2023, <https://www.gisreportsonline.com/r/geopolitical-multipolarism/> (diakses 20 November 2023).

kelompok negara yang lebih luas yang mencakup Rusia, India, sejumlah negara di Eropa dan Timur Tengah, serta negara-negara Selatan—mencakup sebagian besar Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, dan Asia.

Dalam sejarahnya, geopolitik dunia pasca-Perang Dunia ke-2 dan Perang Dingin (1947-1990), mengalami periode bipolar dengan dua kekuatan utama, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. Persaingan antara kapitalisme yang dipimpin oleh AS dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet menciptakan struktur geopolitik yang sangat terfokus pada dua kutub kekuatan. Pasca-Uni Soviet pada akhir 1990-an, dunia melihat transisi menuju periode unipolar. Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan utama yang mendominasi di berbagai bidang, termasuk militer, ekonomi, dan politik. Perubahan ini menempatkan AS memiliki dominasi pengaruh yang sangat besar dalam menentukan dinamika geopolitik global pada akhir 1990-an.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, perkembangan geopolitik telah mengarah pada pergeseran ke arah multipolar dengan peran yang semakin signifikan dari negara-negara seperti Rusia dan China dalam arena geopolitik global. Munculnya Rusia dan China sebagai kekuatan baru menjadi pesaing Amerika Serikat dalam menentukan peta politik global. Persaingan global yang meningkat antara kekuatan-kekuatan utama, terutama AS dan China-Rusia, terjadi secara intensif. Selanjutnya melahirkan wacana baru mengenai “New Cold War”.<sup>13</sup> Perang Dingin Baru ini bisa saja lebih buruk dibandingkan yang pertama. Pasalnya, persaingan ini mencakup

---

<sup>13</sup> Seth Schindler, et.al, “The Second Cold War: US-China Competition for Centrality in Infrastructure, Digital, Production, and Finance Networks, Geopolitics,” *Geopolitics*, (2023), 1-38.

berbagai aspek, termasuk keamanan, ekonomi, teknologi, dan pengaruh geopolitik regional. Lebih dari itu, persaingan antar negara adidaya cenderung didasarkan pada keuntungan strategis, ketimbang didorong oleh perbedaan ideologi seperti yang terjadi pada masa Perang Dingin Pertama.

Pada satu dekade terakhir, dunia telah menyaksikan beberapa perubahan geopolitik secara signifikan. Perubahan tersebut telah memicu konflik-konflik regional dan perang *proxy* di beberapa wilayah, antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Perebutan kekuatan dan pengaruh negara-negara besar tersebut sering kali dimanifestasikan melalui konflik di negara-negara pihak ketiga. Negara pihak ketiga menjadi medan pertempuran atau area pengaruh. Perang di Suriah, perang di Ukraina hingga konflik Israel-Palestina adalah manifestasi dari persaingan geopolitik antara negara AS, Rusia dan China.

Perang saudara di Suriah pada tahun 2011 adalah salah satu contoh yang mencolok dari *proxy war* yang melibatkan kekuatan regional dan global. Konflik yang awalnya berakar dari dinamika internal Suriah menjadi *proxy war* dengan masuknya beberapa kelompok dan intervensi negara-negara lain. Intervensi militer dari berbagai aktor, termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan China, menciptakan Pertempuran Mosul (*Battle of Mosul*) di Suriah, menjadi konflik yang rumit dengan dampak kemanusiaan serius. Konflik di Suriah telah menjadi salah satu titik fokus dalam persaingan geopolitik antara beberapa kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan China.<sup>14</sup> Persaingan antara Amerika Serikat dan Rusia dalam konflik di Suriah mencakup berbagai aspek, termasuk

---

<sup>14</sup> Hussein Maklad, "Great Powers Competition in Syria," *Contemporary Arab Affairs*, Vol.15, Issue 3-4, (2022): 54–77.

dukungan militer, diplomasi, dan upaya untuk memengaruhi arah politik Suriah. Sementara itu, China tidak terlibat langsung dalam konflik Suriah pada tingkat yang sama seperti Amerika Serikat dan Rusia. Namun, China telah meningkatkan peran dan kehadirannya dalam geopolitik Timur Tengah secara keseluruhan, termasuk melalui investasi ekonomi dan proyek-proyek infrastruktur. Hal ini mencerminkan bagaimana berbagai kekuatan besar terlibat dalam upaya untuk memajukan kepentingan mereka di wilayah yang strategis ini.

Demikian pula Perang Rusia-Ukraina, meletus sejak 24 Februari 2022, telah mengacaukan tatanan dunia, termasuk pembentukan blok-blok baru yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menandai dimulainya krisis keamanan internasional yang parah dan memburuknya hubungan antara Moskow dan negara-negara Barat. Lebih dari itu, perang Rusia-Ukraina ini telah meningkatkan konflik dan konfrontasi, serta kecenderungan global, di mana negara-negara membentuk blok yang berpusat pada poros AS dan China.<sup>15</sup> Kemudian kawasan Asia Tengah, Kaukasus, Balkan, Afrika, dan Asia-Pasifik menjadi arena perebutan pengaruh antara negara-negara besar seperti China, Uni Eropa, Rusia, dan Turki—baik melalui pembiayaan proyek infrastruktur maupun kesepakatan perdagangan, kerja sama militer, atau diplomatik. Oleh karena itu, perang Rusia-Ukraina telah memicu kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik di berbagai kawasan lainnya, seperti Konflik Laut China Selatan, Teluk Persia, dll. Perkembangan perang Rusia-Ukraina dapat mempengaruhi kebijakan luar

---

<sup>15</sup> Christopher Zambakari, et.al, “War in Ukraine: US, Russia, China and the Return of the Multipolar World,” *The Great Power Competition in Eurasia*, Vol. 1, (Mei 2023).

negeri negara-negara lain, memicu pergeseran aliansi, dan memperkuat kewaspadaan terhadap ancaman geopolitik global secara keseluruhan.

Di luar ketegangan geopolitik di atas, ancaman geopolitik yang sifatnya laten berupa peningkatan kewaspadaan militer China dengan melakukan peningkatan kekuatan militer seolah akan menyambut momentum pergeseran geopolitik dunia. Pasalnya, Pada 2022 China memiliki pengeluaran militer yang signifikan, membuatnya menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar kedua di dunia. Laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menyebutkan China memiliki pengeluaran sebesar 292 miliar Dollar AS. Jumlah ini menempatkan China peringkat kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki pengeluaran militer tertinggi, yaitu sekitar 877 miliar Dollar AS.<sup>16</sup>

Dalam perbandingan dengan negara-negara lain yang secara tradisional dianggap memiliki kekuatan militer besar, seperti Rusia, Inggris, dan Jerman, pengeluaran militer China jauh lebih tinggi. Sebagai perbandingan, Rusia tercatat memiliki pengeluaran militer sekitar 86,4 miliar dollar AS, Inggris memiliki pengeluaran militer 68,5 miliar dollar AS dan Jerman memiliki pengeluaran militer 55,8 miliar dollar AS. Laporan SIPRI mencatat lima negara menyumbang 63 persen dari total belanja militer global pada tahun 2022 yaitu AS (39 persen), China (13 persen), Rusia (3,9 persen), India (3,6 persen) dan Arab Saudi (3,3 persen).<sup>17</sup> Invasi Rusia ke Ukraina merupakan

<sup>16</sup> Nan Tian, et.al, "Trends In World Military Expenditure 2022," Stockholm International Peace Research Institute/SIPRI, (April 2023), <https://doi.org/10.55163/CQGC9685>

<sup>17</sup> Nan Tian, et.al, "Trends In World Military Expenditure 2022," Stockholm International Peace Research Institute/SIPRI, (April 2023), <https://doi.org/10.55163/CQGC9685>

pendorong utama pertumbuhan belanja negara pada tahun 2022.

Peningkatan signifikan dalam pengeluaran militer China telah menciptakan dampak strategis dan geopolitik. Meningkatkan posisi China sebagai negara dengan kekuatan militer utama di Asia dan di tingkat global. Pengeluaran militer yang tinggi tersebut mencerminkan ambisi keamanan nasional China, seiring perkembangan ekonomi dan teknologinya yang pesat. Jumlah pengeluaran militer China di tahun 2022 meningkat 4,2 persen lebih banyak dibandingkan tahun 2021 dan 63 persen lebih banyak dibandingkan tahun 2013. Pengeluaran militer China telah meningkat selama 28 tahun berturut-turut. Periode pertumbuhan belanja terpanjang tanpa henti yang pernah dicapai oleh negara mana pun. Oleh karena itu, peningkatan kekuatan militer China telah menarik perhatian dunia internasional dan mempengaruhi dinamika keamanan regional dan global.

Pada saat yang sama, Indonesia berada di persimpangan terkait dinamika geopolitik yang melibatkan China pada kasus konflik Laut China Selatan. Indonesia yang dekat dengan kawasan Indo-Pasifik tidak menutup kemungkinan ikut terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Pasalnya, geopolitik yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik melibatkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai zona maritim. Posisi Indonesia berada pada persimpangan strategis kedua samudra ini, dan karenanya memiliki potensi terlibat secara signifikan dalam perkembangan geopolitik di zona maritim tersebut.

### **2.3. Geoekonomi: Fragmentasi Perekonomian**

Sejarah dan kajian empiris mengenai geopolitik global pada kenyataannya berpengaruh kuat terhadap perekonomian suatu negara. Dampak terhadap ekonomi yang ditimbulkan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Relevansi “bela negara” tidak hanya diuji oleh dinamika politik global, melainkan juga karena dinamika perekonomian global. Perkembangan ekonomi-politik global membawa pengaruh kuat terhadap suatu negara secara sistemik dan struktural. Dampak yang struktural dan sistemik ini perlahan-lahan mengubah sendi-sendi sosial masyarakat, pilar-pilar kebudayaan dan kebangsaan, dan bahkan norma dan aturan politik hukum. *Lantas*, bagaimana dinamika proyeksi geoekonomi global saat ini?

Setelah integrasi ekonomi global meningkat beberapa dekade, dunia menghadapi risiko fragmentasi geoekonomi yang didorong oleh kebijakan akibat dinamika geopolitik global. Laporan International Monetary Fund (IMF) menyebutkan bahwa dunia akan menghadapi potensi terjadinya perubahan model perekonomian global. Dari sistem integrasi ekonomi global menjadi fragmentasi ekonomi. Artinya, fragmentasi geoekonomi merujuk pada pembentukan blok-blok ekonomi regional. Terjadi ketegangan perdagangan antara negara-negara, yang dapat menciptakan ketidakpastian dan dampak ekonomi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Shekar Aiyar, et.al, “Goeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism,” International Monetary Fund: Staff Discussion Notes, No. 001, (2023), <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2023/01/11/Geo-Economic-Fragmentation-and-the-Future-of-Multilateralism-527266> (Diakses 20 November 2023).

Perubahan geoekonomi yang terfragmentasi dipicu oleh kebijakan perdagangan global AS-China yang semakin memburuk. Ketegangan geoekonomi-politik AS dan China semakin menguatkan skeptisisme terhadap manfaat globalisasi, sehingga melahirkan kebijakan populisme untuk memproteksi kepentingan negara-negara kawasan, bahkan kepentingan nasional suatu negara.<sup>19</sup> Terlebih lagi, fenomena Brexit, pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia semakin memperburuk hubungan kerja sama ekonomi internasional, sehingga mendorong terjadinya pergerseran ekonomi menuju fragmentasi ekonomi.

Fenomena fragmentasi geoekonomi ini sudah diprediksi oleh berbagai lembaga, seperti Global Trade Alert (GTA) yang mencatat terjadi tren yang signifikan dalam peningkatan kebijakan restriksi perdagangan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2009, GTA mencatat adanya 400 kebijakan restriksi perdagangan dan jumlahnya meningkat pada tahun 2022 menjadi 2500 kebijakan restriksi perdagangan. Demikian pula dengan laporan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mencatat telah terjadi peningkatan pembatasan perdagangan dengan kecepatan yang meningkat untuk pertama kalinya sejak 2009.<sup>20</sup> Peningkatan jumlah kebijakan restriksi perdagangan dapat mencakup tarif, kuota impor, hambatan non-tarif, dan langkah-langkah proteksionis lainnya, dapat membatasi aliran barang dan jasa antar negara. Perubahan kebijakan restriksi

---

<sup>19</sup> Gianmarco Ottaviano, Piero Stanig, Italo Colanton, "The globalisation backlash," VoxEU.org, 1 November 2021. <https://cepr.org/voxeu/columns/globalisation-backlash> (diakses 15 November 2023)

<sup>20</sup> "Report shows increase in trade restrictions amidst economic uncertainty, multiple crises," World Trade Center, (2023) [https://www.wto.org/english/news\\_e/news22\\_e/tmwto\\_06dec22\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/tmwto_06dec22_e.htm) (diakses 15 November 2023).

si perdagangan internasional dapat memiliki dampak pada integrasi ekonomi global dan dapat memicu ketidakpastian bagi pelaku bisnis internasional. Terjadi apa yang disebut dengan fenomena fragmentasi ekonomi dunia.

Pinelopi Goldberg, profesor ekonomi Universitas Yale, mantan Chief Economist Bank Dunia dengan optimis mengatakan perekonomian global tidak lagi mengarah pada sistem ekonomi global, melainkan pada kondisi yang disebut dengan *regional globalization*. Kondisi yang dimaksud seperti perekonomian Uni Eropa, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Dalam pandangan Goldberg, fenomena fragmentasi perekonomian global terjadi pada tiga gelombang: fase *pertama* dimulai pada 2016, dengan maraknya politik yang berorientasi ke dalam. Ini dilakukan oleh Inggris ketika keluar dari Uni Eropa. Kebijakan Brexit Inggris dari UE menandai Inggris beroperasi di luar struktur Uni Eropa sebagai negara yang independen.

Fase *kedua*, pandemi Covid-19 telah berdampak pada pembatasan pergerakan ekonomi internasional hingga menyebabkan gangguan rantai pasokan ekonomi global. Fase *ketiga*, perang Ukraina–Rusia yang telah mengikis kepercayaan negara-negara dan mengubah ekspektasi mengenai aliansi geopolitik, sehingga memicu seruan untuk melakukan “reshoring” atau “friend-shoring” atas nama keamanan ekonomi.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal di atas, geoekonomi global saat ini telah mengalami perubahan. Pada awalnya ada harapan bahwa in-

---

<sup>21</sup> Pinelopi Koujianou Goldberg, “What Stopped Globalization?,” Project Syndicate, 20 September 2022. <https://www.project-syndicate.org/commentary/ukraine-war-end-of-globalization-by-pinelopi-koujianou-goldberg-2022-09> (diakses 15 November 2023)

tegrasi ekonomi global dapat meningkatkan pertukaran barang dan jasa antar negara sehingga menguatkan perekonomian global yang berdampak pada ekonomi nasional suatu negara. Akan tetapi dinamika geopolitik dan pandemi Covid-19 telah mendorong terjadinya perubahan kondisi ekonomi yang mengarah pada fragmentasi atau penurunan integrasi perekonomian global.

Satu-satunya perubahan ekonomi yang tidak pernah berubah adalah fitur konstan ekonomi politik dunia, yaitu ketidakseimbangan dan ketimpangan—hanya manifestasi-manifestasinya saja yang berubah di sepanjang sejarah.<sup>22</sup> Ketidakseimbangan penguasaan ekonomi global, di mana sebagian besar kekayaan dan pengaruh dipegang oleh negara-negara dan perusahaan-perusahaan besar, merupakan isu kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Misalnya, krisis finansial tahun 2008 telah mendorong banyak negara dan perusahaan mengalami kesulitan finansial. Banyak negara menerapkan kebijakan stimulus, yang melibatkan peningkatan utang untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Jumlah total stok hutang dunia sejak tahun 2008 mengalami kenaikan sampai lebih dari 50%. Apabila 10 tahun lalu totalnya adalah 173 triliun, kini sepuluh tahun pasca krisis finansial, bukannya menurun, malah angka tersebut meroket menjadi 250 Triliun.<sup>23</sup> Sebagaimana dicatat *Trade and Development 2018: Power, Platforms and The Free Trade Delusion*,

---

<sup>22</sup> Ashwani Saith, "Inequality, Imbalance, Instability: Reflections on a Structural Crisis." *Development and Change* 42, 1, (2011): 70–86.

<sup>23</sup> Brian Chappatta, "\$250 Trillion in Debt: The World's Post-Lehman Legacy," *Bloomberg.Com*, <https://www.bloomberg.com/graphics/2018-lehman-debt/>.

UNCTAD, justru semakin memperparah volatilitas arus keuangan di dunia yang sudah “*hyperglobalised*”.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) melaporkan betapa dominasi perdagangan global masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, khususnya Amerika dan China. “Perang dagang” yang disebut-sebut mewarnai hubungan ekonomi-politik kedua negara mencoba untuk saling mengerahkan manuver fiskal dan moneterinya masing-masing. Dengan sendirinya membuat perekonomian dunia juga kena imbasnya, seperti lapangan pekerjaan yang berguguran dan harga-harga yang meningkat.<sup>24</sup> Laporan ASEAN Investment Report juga konsisten dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan ketimpangan dalam penguasaan rantai nilai oleh negara-negara di Asia Timur.

Penguasaan rantai nilai di dalam jejaring produksi global ini dilakukan melalui berbagai penanaman modal asing di kawasan oleh negara-negara industri maju (UNCTAD, *World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policy*). Kelembaman negara-negara berkembang dalam mengejar ketertinggalan akan berakibat semakin berlarut-larutnya ketidak-berimbangan ini. Pada akhirnya akan melemahkan kekuatan nasional sebuah negara relatif terhadap negara-negara lainnya dalam kancah ekonomi global.<sup>25</sup>

Dampak sosial-masyarakatnya kemudian adalah ketimpangan antara kaya dan miskin akan semakin lebar. Akibatnya,

---

<sup>24</sup> “What Are the Economic Consequences of Donald Trump’s Trade Wars?” *Financial Times*, August 17, 2018, <https://www.ft.com/content/ec8f616e-9fd9-11e8-85da-eeb7a9ce36e4>.

<sup>25</sup> Mattias Vermeiren, *Power and Imbalances in the Global Monetary System: A Comparative Capitalism Perspective*, (New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014)

kedaulatan ekonomi semakin jauh dari jangkauan masyarakat. Kekuasaan modal akan semakin tersentralisasi ke negara maju dan perusahaan besar, bahkan ke segelintir orang saja. Peringatan House of Commons Inggris mengatakan apabila kondisi ekonomi tidak mengalami reformasi struktural, maka pada 2030 nanti 2/3 kekayaan dunia akan terkonsentrasi di tangan 1% saja warga dunia.<sup>26</sup> Ketimpangan semakin melebar, dan semakin melebar; dan juga semakin mengonfirmasi adagium “yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin!”

Mereka yang miskin, akan memiliki suara yang kecil saja dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan politik ekonomi yang memiliki pengaruh langsung ke hidupnya. Contoh paling konkretnya adalah keputusan-keputusan terkait penentuan arah perkembangan teknologi industri, khususnya dalam konteks Revolusi Industri 4.0. Pekerja semakin terdesak posisinya di pasar tenaga kerja akibat tergeser oleh otomasi kerja oleh inovasi teknologi 4.0. Sebagaimana laporan orld Bank, dampak ini secara khusus menjadi sangat mengkhawatirkan bagi negara-negara yang memiliki indeks Gini yang tinggi, dan juga Indeks Modal Manusia yang rendah.<sup>27</sup>

Di atas semua itu, perubahan pada peta global dan regional dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap suatu negara. Oleh karena itu, bagaimana kontribusi “bela negara” bagi upaya untuk memitigasi dan bahkan menjawab tantangan ekonomi politik global ini? Bagaimana bela negara dapat

---

<sup>26</sup> “Richest 1% on Target to Own Two-Thirds of All Wealth by 2030,” *The Guardian*, April 7, 2018, <https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030> (diakses 20 November 2023)

<sup>27</sup> World Bank, *World Development Report (WDR) 2019: The Changing Nature of Work* (Washington: World Bank Publications, 2019).

menawarkan konsep untuk mengawal pembangunan nasional yang berorientasikan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok pemodal dan penguasa ekonomi global? Bahkan lebih kongkret lagi, bagaimana pemerintah Indonesia dapat dimampukan oleh konsep bela negara untuk memobilisasi seluruh sumber daya nasional dan potensi bangsa dalam rangka memelihara stabilitas keamanan, kesejahteraan dan keadilan masyarakat, yang tentu saja sangat ditentukan oleh situasi internasional.

Diperlukan pengetahuan dan analisis rmutakhir, juga kemampuan kritis dalam membaca gambar besar dari serpihan-serpihan peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Diharapkan konsepsi “bela negara” dapat dijelmakan ke dalam strategi-strategi aktualisasinya guna mengantisipasi dinamika politik dan ekonomi global, khususnya dalam rangka mengawal tercapainya pembangunan nasional yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas bangsa Indonesia.



### III

## LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL DAN LOKAL

KONSEP bela negara beranjak dari pemikiran klasik mengenai negara-bangsa (*nation-state*). Negara-Bangsa modern didominasi oleh ide-ide dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian Westphalia (Westphalen). Dari berbagai gagasan mengenai negara-bangsa, yang kemudian paling berpengaruh terhadap pembentukan negara-negara di dunia adalah syarat tentang keabsahan dan eksistensi sebuah negara-bangsa.

Sebuah negara baru pertama-tama harus memenuhi syarat menguasai suatu wilayah tertentu. Kemudian negara-bangsa itu baru bisa mendapatkan eksistensinya jika diakui oleh negara-negara lain. Dengan demikian, suatu *nation-state* memenuhi syarat formal secara internal dan eksternal, selain tentu harus dipenuhi berbagai syarat lain seperti adanya penduduk sebagai rakyat, pemerintahan, dan perangkat-perangkat negara sebagaimana layaknya sebuah entitas bernegara baru. Bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, mata uang dan lain sebagainya.

Kedua syarat—wilayah dan pengakuan kedaulatan dari negara lain—ini menjadi hal yang paling pokok di dalam keberlangsungan kehidupan sebuah negara-bangsa. Implikasi dari pemahaman ini berarti bahwa rakyat sebuah negara ha-

rus pertama-tama berkepentingan terhadap keberlangsungan negerinya sendiri. Seseorang atau anggota suatu masyarakat negara atau yang disebut sebagai warganegara, mau tidak mau, suka tidak suka, terkena kewajiban untuk ikut memelihara keberlangsungan eksistensi negara-bangsa. Inilah dasar pertama dari filosofi mengenai Bela Negara.

Mengapa seluruh warganegara berkepentingan dan berke-wajiban untuk Bela Negara? Karena menjadi warganegara dari suatu negara adalah keniscayaan dan keharusan dalam kehidupan bermasyarakat dan pergaulan dunia modern. Kewarganegaraan menjadi semacam gender ketiga bagi setiap orang. Seseorang tidak bisa menghilangkan pengakuan orang lain mengenai status gendernya. Begitu pula, ia tidak bisa menghilangkan status kewarganegaraan dari suatu negara tertentu. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) tidak memiliki hak hidup di manapun di dunia ini.

Dalam konteks pemikiran seperti inilah maka harus dikenali situasi dan kondisi masa depan dengan perkiraan-perkiraan yang akurat. Demi upaya-upaya untuk melanggengkan dan bahkan mengembangkan keberlangsungan NKRI. Langkah pertama adalah memberikan kerangka waktu bagi proyeksi peristiwa yang dibangun sesuai dengan sejarah yang pendek dari masa lalu dan data-data masa sekarang. PwC (Pricewaterhouse Cooper) meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia pada tahun 2050.

Proyeksi PwC sepenuhnya didasarkan pada asumsi-asumsi ekonomi secara *ceteris paribus*, bahwa faktor-faktor diluar ekonomi tidak diperhitungkan di dalam proyeksi kekuatan ekonomi tersebut. Jika dianggap bahwa asumsi PwC itu benar maka perhitungan semata-mata berdasarkan indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi

selama ini, asumsi demografi (apakah pertumbuhan penduduk merupakan bonus demografi atau justru beban baru ekonomi), cadangan sumber daya alam dan lain sebagainya. Tetapi asumsi PwC hingga 2050, padahal tahun 2050 tidak memiliki makna sosial-politik-budaya apapun bagi NKRI. Harus dicatat bahwa sejak pemilu 2024 masih akan ada pemilu 2029, 2034, 2039, 2044. Artinya akan ada faktor-faktor politik yang disruptif terhadap pertumbuhan ekonomi. Gangguan politik bisa saja merupakan hambatan yang serius bagi pertumbuhan ekonomi, meskipun bisa pula sebaliknya. Perubahan politik bisa positif, dengan lahirnya konsekuensi kebijakan-kebijakan baru dalam bidang ekonomi, yang bisa jadi justru mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian ada potensi disrupsi sekaligus pendorong ekonomi, minimal selama lima kali hingga 2045. Itu baru dari dimensi politiknya saja. Ada berbagai dimensi lain yang dapat mempengaruhi proyeksi PwC. Misalnya dislokasi sosial seperti pembelahan sosial berdasarkan agama atau afiliasi etnik. Selain itu juga kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi sumberdaya alam, pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) diperlukan bagi tercapainya posisi empat besar dunia pada dua puluh lima tahun kedepan.

Faktor lain yang perlu dicatat dan dipertimbangkan dalam proyeksi tersebut adalah perkembangan lingkungan strategis (lingstra) NKRI. Lingstra ini meliputi lingstra internasional, regional, nasional, dan lokal. Bagian ini fokus menyoroti perkembangan lingstra nasional, wilayah (regional-nasional) dan lokal, khususnya dalam bidang ekonomi politik. Lebih khusus lagi roadmap trajektori pada momen-momen lima kali pemilu pasca Pemilu 2024.

Selain perhitungan tersebut, lingstra yang akan sangat mempengaruhi apakah proyeksi PwC akan terjadi, adalah lingstra perkembangan dunia Saintek. Melihat perkembangan Saintek dalam dua puluh tahun terakhir wajah dunia menjadi berubah hanya karena faktor perkembangan teknologi komunikasi, khususnya IT. Belum menyangkut berbagai perkembangan di dunia Saintek, mulai dari teknologi kesehatan, teknologi transportasi, dan lain sebagainya.

Semenjak pecahnya apa yang disebut sebagai Arab Spring pada awal dekade 1980an, Demokrasi telah menjadi keniscayaan sejarah negara-bangsa di dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Negara-negara yang masih belum mapan memilih untuk mengadopsi sistem politik Demokrasi.

Demokrasi mengandaikan, bahwa setiap orang dilahirkan dengan hak dan kewajiban yang sama, meskipun hak itu belum dipergunakan. Seorang bayi masih tabula rasa. Setiap orang juga dilahirkan dengan hak berdaulat penuh atas dirinya sendiri. Ketika menjadi dewasa, setiap orang harus berhubungan dengan orang lain. Ia pun menjadi makhluk sosial. Sementara itu, kepentingan setiap orang tidak selalu sama. Kedaulatan individu seringkali berbenturan dengan kedaulatan individu orang lain. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan sosial yang disepakati bersama supaya tidak terjadi konflik.

Pengaturan sosial itu dilakukan oleh aktor-aktor atau orang-orang yang diberi hak dan kewenangan untuk mengatur. Seseorang atau sekelompok orang itu harus “dipinjami” kedaulatan untuk boleh atau bisa mengatur orang-orang lain. Inilah landasan kuasa mengatur yang disebut Demokrasi: demos = rakyat; kratos = pemerintahan. Jadi kedaulatan itu sumbernya berasal dari gabungan kedaulatan seluruh warga suatu masyarakat.

Proses meminjamkan (sebagian) kedaulatan individu itu harus dibatasi besaran dan waktunya, karena ada potensi disalahgunakan. Suatu kondisi yang dirumuskan secara tajam oleh Lord Acton sebagai, *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, kekuasaan yang absolut sudah pasti disalahgunakan. Di sini, inti dari kekuasaan yang korup itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Bukan semata-mata menyangkut isu finansial.

Penyerahan—atau peminjaman—kedaulatan, atau kekuasaan yang berdaulat itu dilakukan melalui proses yang disebut Pemilihan Umum, atau Pemilu. Manakala periode waktu peminjaman kedaulatan itu telah habis, maka mandat kedaulatan itu dikembalikan; untuk dilakukan pemilu berikutnya, secara periodik.

Tentu saja suatu pemilu sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategisnya (lingstra). Lingkungan strategis itu bersifat internasional, nasional dan lokal. Indonesia lebih-lebih lagi akan mengalami pengaruh lingkungan strategis tersebut, sehingga kita perlu fokus hingga Tahun Emas NKRI 2045. Suatu lingstra yang sangat kompleks dan *unpredictable*, alias sulit diperkirakan.

Situasi perekonomian dunia saat ini terpuruk, terutama pasokan dan distribusi oil & gas serta pangan. Dampak *protracted war* Ukraine-Russia ditambah Perang Gaza sangat luar biasa terhadap kondisi ekonomi-politik dunia. Tidak terkecuali bagi Indonesia. indikator yang paling mudah diamati adalah fluktuasi nilai tukar USD. Hanya dalam satu tahun terakhir, IDR terperosok dari sekitar Rp.12.000 hingga menyentuh Rp.18.000 per USD.

Meskipun perekonomian dunia belum sampai mengalami resesi, tetapi efek berantai (*contagion effect*) dari Perang Russia-Ukraina telah menyebabkan kawasan Eropa Utara mengalami stagnasi ekonomi, yang merembet hingga Eropa Barat. Pasokan minyak terganggu, menyebabkan kelangkaan pangan. Belum selesai urusan Ukraina Lalu tiba-tiba meletus perang Hamas-Israel. Keterlibatan dunia internasional pada Perang Gaza ini jauh lebih masif.

Dalam jangka pendek, perang tersebut menimbulkan dampak ekonomi-politik yang serius. Jika perhitungan ini ditarik ke depan hingga 2050—*benchmark* PwC yang terkait langsung dengan posisi Indonesia—masih sulit untuk bisa meramalkan peta jalan politik internasional yang damai. Tema ekspansi bagi setiap negara-bangsa (*nation-state*) lebih menonjol ketimbang topik kontraksi.

Roadmap serupa akan dijalani Indonesia hingga setidaknya Tahun Emas 2045—*Insyah Allah*—tetapi dengan kompleksitas kepolitikan yang jauh lebih besar. Pada level nasional, gonjang-ganjing pilpres 2024 akan berlarut hingga pemilu berikut pada 2029. Pembelahan sosial memang tidak setajam pembelahan politik kadrin-cebong pada dan pasca Pemilu 2019 tetapi justru lebih meluas di ranah sosial.

Seluruh perkembangan lingstra tersebut masih belum memperhitungkan detail kelindannya dengan perkembangan Sainstek, yang bukan sekadar mewarnai tetapi menentukan hampir segala hal dalam dunia modern. Kecepatan eksponensial kemajuan IT dan seluruh saintek terkait semakin lama semakin meningkatkan derajat kelindan dengan Dunia Baru. Tentu saja didalamnya terkandung potensi kejahatan yang secara bersamaan juga turut meningkat.

Ambil satu contoh, cryptocurrency, yang mengguncangkan sendi-sendi rezim perekonomian lama. *Benchmark* nilai mata uang bergeser dari cadangan emas, yang ditetapkan semenjak Bretton-Woods, kini digantikan oleh “sekadar” nilai kepercayaan dan kesepakatan penggunaannya. Transaksi keuangan pun tidak lagi melalui perbankan; bank telah menjadi *archaic* dan *obsolete*. Bagaimana polisi menghadapi potensi kejahatan keuangan yang tanpa melalui jasa perbankan ini?

### 3.1. Ketahanan di Dunia Baru

Setelah mengenali konteks lingstra tersebut, maka dapat disusun peta jalan (*roadmap*) perawatan dan peningkatan ketahanan nasional melalui bela negara. Upaya bela negara harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, dengan polisi sebagai ujung tombaknya. Mengapa polisi, karena polisi lah penjaga keamanan dan keteriban masyarakat melalui penegakan hukum. Keadaban masyarakat modern ditegakkan dan dikawal oleh polisi.

Pemahaman mengenai status, filosofi, fungsi dan aturan Pemilu, akan dapat dibuat roadmap lima kali pemilu hingga 2045 bagi polisi. Apa yang harus/boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri? *Dos* dan *Don'ts* yang dipandu oleh pedoman etik dan kebijakan Polri, yaitu Presisi?

Secara umum, Presisi terdiri dari tiga *policing clusters*, yaitu Pemolisian Prediktif, Transparan, dan Akuntabel yang berkeadilan.<sup>1</sup> Jika diterapkan pada pemolisian untuk pemilu,

<sup>1</sup> Teks asli Presisi adalah “Prediktif,” “Transparansi,” dan “Akuntabilitas yang berkeadilan.” Penggunaan kata adjective Prediktif kurang tepat disandingkan dengan noun Transparansi dan Akuntabilitas, meskipun substansinya sama. Jadi di sini saya gunakan Prediktif, Transparan

maka hulu dari kemampuan prediktif terletak pada fungsi Intelkam. Namun itu bukan berarti fungsi-fungsi lain tidak memiliki tanggung jawab prediktif. Tujuan dari pemolisian yang komprehensif—dalam hal ini Pemolisian Pemilu—adalah penangkalan dan pencegahan tindakan masyarakat yang disruptif terhadap ketertiban umum dan tindak kriminal. Untuk itu, fungsi Intelkam sangat membutuhkan support seluruh fungsi lain agar analisisnya akurat dan tajam sehingga saran kebijakan yang dihasilkan efektif.

### **3.2. Lingstra Daerah**

Perkembangan kewilayahan (domestik-regional) di seluruh wilayah NKRI hingga Tahun Emas 2045 akan didominasi oleh tiga persoalan besar yang menyangkut politik, ekonomi dan sosial, sebagaimana sebagian telah dibahas di atas dalam konteks dengan lingstra internasional.

alam hal lingstra politik lokal pasca Pemilu 2024 Indonesia menghadapi lima kali pemilu hingga 2045. Struktur persoalan politik tetap akan tergantung pada *clusters* sebagaimana telah dibahas. Isu-isu politik seputar kepartaian dan pengelompokan kekuatan politik lainnya, sumberdaya manusia dari pimpinan politik (terutama pendidikan dan SES). Kemudian *clusters* isu-isu ketimpangan horizontal, yaitu ketimpangan antar wilayah atau antar daerah. Pada perdebatan kasus perpindahan ibukota DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan misalnya, isu hangat muncul berkembang tentang apakah kebijakan ini justru mengundang ketimpangan sosial atau sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan pemerintah dan

---

dan Akuntabel supaya tidak terjadi *dangling modifier*.

undang-undang bahwa IKN akan menimbulkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kritik terhadap strategi kebijakan ini adalah bahwa yang akan tumbuh bukan kawasan ekonomi baru melainkan ketimpangan dengan daerah-daerah lain.

Kemudian, isu penting lainnya adalah ekspansi dan kontraksi domestik, yaitu pembentukan provinsi atau kabupaten/kota baru. Tuntutan pemekaran wilayah akan tetap mewarnai sepanjang dua puluh lima tahun kedepan. Sebuah ancaman strategi pemekaran ini sudah dimulai dengan pembentukan provinsi-provinsi baru di Papua menjadi provinsi: Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Tuntutan serupa masih tetap akan muncul dari pulau Madura, Wilayah Aceh Tengah, bahkan di Pulau Jawa seperti Cirebon dan sekitarnya. Sekalipun secara nasional isu pemekaran ini tidak terlalu signifikan dalam hal ketahanan politik namun tetap menjadi faktor *spoiler*, yang akan mengganggu jalannya pertumbuhan ekonomi sebagai faktor *non ceteris paribus*. Ketimpangan antar wilayah tetap merupakan potensi disintegrasi yang paling mengganggu linear pertumbuhan sosial ekonomi dan politik.

Dimensi lingstra kedaerahan ini bersifat horizontal, yang jika berkelindan dengan dimensi ketimpangan vertikal—kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan sebagainya—akan menjadi potensi disruptif yang serius. Dengan kata lain, potensi gangguan terhadap derajat ketahanan nasional, sehingga juga akan mempengaruhi ukuran-ukuran Bela Negara, serta strategi pembinaan dan pengembangannya.

### **3.3. Faktor Saintek**

Seluruh aspek dalam dimensi lingstra nasional hingga lokal tetap tidak bisa dipisahkan dari perkembangan lingstra internasional, khususnya dalam perkembangan tahapan saintek baru. Sayang sekali bahwa pendidikan saintek seringkali diabaikan dalam kebijakan pembangunan negara-bangsa NKRI. Pendidikan saintek pada tingkat pendidikan dasar semakin lama semakin kurang ditekankan. *Loophole* ini telah dikritik dari luar seperti oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad yang meyakini bahwa mundurnya pendidikan saintek di Indonesia akan menyebabkan Indonesia ketinggalan jauh dibandingkan Malaysia yang lebih mengutamakan pendidikan saintek. Sekarang saja misalnya, privilege untuk mendapatkan kursi di SD hingga SMA lebih banyak ditujukan bagi anak-anak yang hafal Al-Quran (*hafiz*) dibandingkan anak-anak yang berbakat dalam dunia ilmu Saintek. Di perguruan tinggi, fakultas Saintek seperti MIPA harus dilikuidasi jika mahasiswanya kurang dari 15 atau bahkan kurang dari 25 orang. Padahal dunia ilmu Saintek memang sulit menarik minat anak-anak. Alih-alih menumbuhkan minat mereka, ini malah fakultasnya ditutup.

Sementara itu, saintek internasional berkembang eksponensial hingga *quadruple*, khususnya yang sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara langsung, yaitu pertumbuhan IT. Internet bukan saja mengubah wajah dunia tetapi juga mengubah wajah pelosok-pelosok di seluruh Indonesia. Benturan kebudayaan akan terjadi pada persentuhan teknologi IT ini dengan masyarakat lokal yang terisolir. Sebagai contoh kecil, pasar tradisional di Wamena memiliki *quarter* (sudut) yang menjual macam-macam

HP bekas dengan harga sangat murah. Pembelinya banyak yang masih menggunakan koteka. Ini secara nyata memberikan etalase perbenturan budaya pada tahap pra-pertanian dengan budaya pada tahap masyarakat informasi. Perbenturan ini semakin keras manakala teknologi yang digunakan semakin jauh dari tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat lokal apalagi yang terisolir.

Saintek IT hanya satu etalase dari berbagai bidang Saintek yang jauh lebih canggih. Secara umum Saintek di dunia internasional berkembang ke arah hal-hal yang bersifat makrokosmos seperti eksplorasi luar angkasa, pencarian energi terbarukan, dan teknologi transportasi massal (kereta api cepat, pesawat-pesawat yang semakin lama, semakin besar dan aman, kapal laut yang juga semakin besar dan semakin aman). Pada arah yang lain perkembangan Saintek mengarah ke teknologi mikro seperti halnya microchips, robotika, AI, dan sebagainya. Bidang saintek ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia kesehatan khususnya dalam hal penciptaan instrumen-instrumen kesehatan yang semakin canggih dan semakin kecil.

Pada masa seperempat abad ke depan, dimensi lingstra Saintek ini di tingkat daerah di seluruh Indonesia juga akan menimbulkan berbagai dislokasi psikologis bagi masyarakat. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sudah terdapat cangkok jantung manusia dari jantung babi. Tentu hal ini menimbulkan problem etika dari sudut pandang keyakinan agama dan keyakinan sosial lainnya. Sama halnya, teknologi kloning yang semakin lama juga semakin canggih. Kloning domba "Dolly" di Inggris yang sukses pada tahun 1981 tidak tercatat lagi dalam ingatan publik kita pada dekade ketiga abad ke-21 ini. Laporan-laporan rahasia bahkan menyebut riset untuk melakukan

kloning tubuh manusia yang di Amerika Serikat harus dihentikan karena protes dari kaum agamawan di sana. Tetapi di masyarakat sekuler China upaya kloning manusia ini tidak terdeteksi dunia luar. Diperkirakan telah berkembang sangat jauh di luar batas-batas etis dan moralitas yang ada.

Berbagai Perkembangan tersebut menjadi penuntun kita dalam membangun dan mengembangkan strategi bela negara mulai dari penyusunan filosofi bela negara, penyelenggaraan program-program bela negara, dan eksekusi hasil pembinaan bela negara ini di dalam mengantisipasi dan menghadapi lingstra internasional, nasional, dan lokal.

Misalnya, apakah pengetatan sarana saluran dan konten teknologi informasi akan memperkuat Ketahanan Nasional sebagai strategi Bela Negara, atau justru sebaliknya. Kebijakan ini akan melemahkan Ketahanan Nasional karena masyarakat bukan dibenturkan dengan perkembangan lingstra internasional yang terjadi, melainkan menarik diri (rekursif) seperti katak dalam tempurung.

Sebagai perbandingan strategi membuka diri diterapkan oleh Tiongkok sementara strategi menutup dan menarik diri diterapkan oleh Korea Utara. Keduanya sama sama memiliki keuntungan dan kelemahannya, Indonesia harus bisa menarik pelajaran dari kasus lingstra internasional seperti itu.

Lingstra nasional, sekali lagi, sangat dipengaruhi oleh situasi politik nasional. Setiap kali pemilu, isu-isu yang akan berulang antara lain; maraknya hoax; terbelahnya afinitas sosial dengan adanya isu politik identitas; dan politik uang yang merusak ketahanan ekonomi masyarakat. Belakangan muncul pengaruh dari berkembangnya teknologi IT, khususnya dalam aspek AI (Artificial Intelligent). Perkembangan ini se-

sungguhnya bisa sangat positif bagi pendidikan masyarakat secara keseluruhan (*public education*) namun yang terjadi adalah sifat destruktif AI karena dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan kekuasaan politik.

Pemerintah secara khusus dan masyarakat pada umumnya harus mengenali jalan perkembangan dan pertumbuhan Sainstek hingga 2045 yang bermanfaat bagi bangsa ini. Secara lebih spesifik, manfaat seperti itu dapat diterapkan melalui Bela Negara hingga 2045. Polri dan TNI sebagai komponen utama Bela Negara sesungguhnya dapat meningkatkan perannya, dari ranah Keamanan dan Pertahanan ke ranah Ketahanan Bangsa, yang menjadi landasan bagi Bela Negara. Dan wahana terbaik dalam proses transformasi ini adalah pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi.



## IV

### ANCAMAN DAN RESPON NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**P**ERANG dingin akhirnya pecah pada akhir 1980an. Konstelasi ancaman kepada negara pun berubah secara drastis di era hubungan internasional dan politik global.<sup>1</sup> Perubahan yang terjadi bersifat mendasar dan tiba-tiba, menjadi menonjol oleh keruntuhan dari hampir seluruh kebijakan keamanan militer-politik, agenda yang telah mendominasi dunia selama lebih dari empat puluh tahun. Uni Soviet untuk kali pertama menarik tantangan militer dan ideologinya, menjadi alasan politik-militer dari pengamanan dalam sistem Perang Dingin perlahan bertransformasi.

Konfrontasi ideologis pun terjadi dalam sejarah, kekuatan nuklir tiba-tiba tidak dapat dicegah,—bersifat konvensional dan tidak banyak kekuatan yang bisa membendungnya. Namun perkembangan positifnya adalah hilangnya kepentingan bersama yang selama ini menopang perekonomian kapitalis bersama-sama, meskipun mereka bersaing. Gambaran “kekacauan dunia baru” mulai mendominasi persepsi tentang masa depan, membawa serta persepsi baru agenda keamanan paska Perang Dingin.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Indah Pangestu Amaritasari, “Keamanan Nasional Dalam Konteks Isu-Isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional,” *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 1 (2017): 109–32.

<sup>2</sup> Barry Buzan, “Rethinking Security after the Cold War,” *Cooperation*

Konsepsi keamanan tradisional bagi para tradisionalist adalah hal yang mudah karena keamanan diasosiasikan dengan kekuatan militer dan menjadi hal yang diterima saat Perang Dingin dan sebelumnya. Sektor militer lebih mudah menerima argumentasi entitas yang dilindungi dalam sektor keamanan negara—dikenal dengan ‘*referent object*’.<sup>3</sup> Namun demikian, pandangan ini ditantang oleh pemikir *Copenhagen School* yang melihat *referent object* lebih luas, di antaranya mencakup isu kemanusiaan.

## 4.1. Ancaman

### *Referent object* dalam keamanan internasional

Dalam konteks studi keamanan internasional, “*referent object*” merujuk kepada entitas atau objek yang menjadi fokus analisis dalam memahami ancaman, kebijakan keamanan, dan dinamika keamanan. Pendekatan keamanan tradisional terutama menganggap negara sebagai satu-satunya objek rujukan keamanan dan menolak segala upaya untuk memperluas konsep keamanan. Pemahaman ini dikenal dengan pendekatan realis. Namun pendekatan ini ditentang oleh *Copenhagen School*, *Welsh School*, dan pendekatan keamanan manusia.

Mazhab Kopenhagen berasumsi bahwa kini ada dualitas keamanan: keamanan negara dan keamanan masyarakat. Namun, baik Aliran Welsh maupun keamanan manusia memandang individu sebagai satu-satunya objek rujukan keamanan. Dengan beragamnya pemikiran keamanan maka *referent object* bisa berupa negara, kelompok etnis, agama, individu, wilayah

---

*and Conflict* 32, no. 1 (Maret 1997): 5–28.

<sup>3</sup> Buzan.

geografis, atau bahkan objek non-negara seperti lingkungan atau keamanan energi.

Dalam teori keamanan internasional, terdapat beberapa perspektif yang berbeda dalam menentukan *referent object*:<sup>4</sup> Pertama, negara-centric (negara sebagai *referent object*). Dalam tradisi realisme, negara sering kali dianggap sebagai *referent object* utama. Keamanan negara, kedaulatan, dan integritas teritorial menjadi fokus utama analisis.

Negara sebagai *referent object*, orientasinya kepada keamanan negara yang meliputi integritas teritorial, keamanan militer, keamanan politik dan stabilitas pemerintahan, ekonomi dan keamanan sosial, keamanan siber, keamanan lingkungan dan sumber daya alam, keamanan terhadap ancaman non-negara dan peran negara dalam sistem internasional. Negara sebagai *referent object* mencerminkan pendekatan tradisional dalam studi keamanan internasional. Namun, penting untuk diingat dalam era globalisasi, konsep keamanan juga telah berkembang mencakup ancaman non-militer dan keamanan individu.

Cakupan *referent object* melibatkan aktor dan entitas yang lebih luas dalam analisis keamanan global. Terdapat risiko dalam penggunaan perspektif Negara-Centric pada era globalisasi dengan dinamika transnasional. Sifat keamanan transnasional/lintas batas ini menantang pandangan tradisional kita mengenai keamanan nasional yang bercirikan dimensi militer berbasis negara.<sup>5</sup> Kalkulus keamanan non-tradisional muncul sebagai bagian dari lanskap keamanan, seringkali mempunyai dampak keamanan nasional yang signifikan melalui implikasi

---

<sup>4</sup> Hawre Hasan Hama, "State Security, Societal Security, and Human Security," *Jadavpur Journal of International Relations* 21, no. 1 (Juni 2017).

<sup>5</sup> Anthony J. Masys, "Non-Traditional Security: A Risk-Centric View," in *Handbook of Security Science* (Berlin: Springer, 2020).

yang terkait dengan risiko sistemik. Karya ilmiah yang luar biasa telah dipresentasikan mengenai topik keamanan non-tradisional melalui kacamata Hubungan Internasional dan Studi Keamanan Kontemporer.<sup>6</sup>

Kedua, *human Security* (individu dan masyarakat sebagai *referent object*). Pendekatan *human security* menekankan keamanan individu dan masyarakat. *Referent object* dalam hal ini adalah individu dan kelompok manusia, dan fokusnya termasuk keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan ekonomi, dan hak asasi manusia. Konsep keamanan manusia dikembangkan oleh PBB dimana memposisikan individu dan komunitas manusia sebagai fokus utama dalam memahami dan merancang kebijakan keamanan. Konsep ini bertolak dari pemahaman bahwa keamanan tidak hanya mencakup ancaman militer dan konflik antarnegara, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Pada tahun 1994, PBB meluncurkan Laporan Pembangunan Manusia Pertama yang mengenalkan konsep Keamanan Manusia (*Human Security*).<sup>7</sup>

Dalam konsep Keamanan Manusia, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketidaksetaraan menjadi prinsip utama. Pendekatan ini menekankan bahwa keamanan yang berkelanjutan dan mantap tidak hanya diukur dari ketiadaan konflik bersenjata, tetapi juga dari kehidupan yang aman, sehat, dan layak bagi semua individu. Penerapan konsep Keamanan Manusia mencerminkan komitmen global untuk memprioritaskan kesejahteraan manusia dalam konteks kebijakan

---

<sup>6</sup> Alan Collins, *Contemporary Security Studies* (New York: Oxford University Press, 2007).

<sup>7</sup> Taylor Owen, *Human Security* (London: SAGE Publication, 2013).

keamanan dan pembangunan. Pendekatan ini mendorong kerja sama internasional, dukungan lintas batas, dan upaya bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan perdamaian dunia.

Ketiga, *environmental security* (lingkungan sebagai *referent object*). Lingkungan—dalam konteks perubahan iklim dan kerusakan lingkungan—sering dianggap sebagai *referent object*. Fokusnya pada keberlanjutan lingkungan, keamanan sumber daya alam, dan dampak perubahan iklim terhadap keamanan. Konsep “lingkungan sebagai *referent object*” merujuk pada pendekatan dalam studi keamanan internasional, di mana lingkungan alam (atau sumber daya alam secara umum) menjadi fokus analisis dalam memahami keamanan dan kebijakan keamanan.

Dalam konteks ini, aspek-aspek lingkungan—air, udara, tanah, keberlanjutan sumber daya alam, dan dampak perubahan iklim—dianggap sebagai faktor-faktor penting yang mempengaruhi keamanan suatu negara atau wilayah. Faktor-faktor penting tersebut meliputi: keberlanjutan lingkungan, perubahan iklim dan bencana alam, air dan sumber daya air, pangan dan pertanian, bahan bakar fosil dan energi terbarukan, kehidupan laut dan konservasi kelautan, perlindungan lingkungan dan konflik sumber daya.

Pendekatan Lingkungan sebagai *referent object* menekankan perlunya menjaga keberlanjutan lingkungan alam sebagai prasyarat untuk keamanan jangka panjang dan kesejahteraan manusia. Dengan memahami pentingnya lingkungan sebagai *referent object*, kebijakan-kebijakan keamanan dan pembangunan berkelanjutan dapat dirancang untuk melindungi dan mendukung ekosistem alam yang mendukung kehidupan manusia.

Keempat, *societal security* (kelompok masyarakat sebagai *referent object*). Teori *societal security* menyoroti keamanan kelompok etnis, agama, atau budaya. *Referent object*-nya adalah kelompok-kelompok ini dengan fokus analisis pada konflik etnis, konflik budaya, atau konflik agama yang dapat mengancam keamanan kelompok. Kelompok masyarakat sebagai *referent object* adalah konsep dalam studi keamanan internasional yang menekankan perlunya mempertimbangkan keberagaman kelompok masyarakat. Keragaman dimaksud mencakup suku, etnis, agama, atau kelompok budaya lainnya, sebagai fokus analisis dalam memahami keamanan dan merancang kebijakan keamanan.

Dalam pendekatan ini, keberagaman kelompok masyarakat dilihat sebagai sumber kekayaan budaya dan sebagai aset yang harus dilindungi dan dihormati. Aspek dari konsep Kelompok masyarakat sebagai *referent object* meliputi perlindungan identitas budaya, konflik etnis dan keamanan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan HAM, pencegahan konflik dan radikalisme, pengetasan diskriminasi dan intoleransi, dan diversitas/ pluralisme dan inklusi.

Dengan memahami kelompok masyarakat sebagai *referent object*, kebijakan keamanan dapat dirancang dengan lebih sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan demikian menciptakan lingkungan yang lebih damai, adil, dan inklusif. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya membangun keamanan berbasis dialog, kerjasama, dan penghargaan terhadap keragaman budaya dan sosial di dalam masyarakat.

Kelima, *global security* (kesejahteraan global sebagai *referent object*). Perspektif ini menganggap kesejahteraan global sebagai *referent object*. *Global security* fokus pada isu-isu seperti

perdamaian global, perdagangan yang adil, dan keberlanjutan ekonomi global.

Pemilihan *referent object* akan mempengaruhi bagaimana ancaman dan tantangan didefinisikan, serta arah kebijakan keamanan yang diambil. Seiring dengan perubahan dinamika global dan konsepsi keamanan, penggunaan *referent object* yang lebih luas dan inklusif menjadi penting dalam mengatasi tantangan keamanan yang semakin kompleks dan lintas batas.

### **Keamanan non-tradisional: risiko, ancaman non-militer, paska perang dingin dan era *post truth***

Keamanan non-tradisional berpusat pada risiko. Keamanan non-tradisional mengeksplorasi gagasan risiko sistemik, sebagai bagian dari kalkulus keamanan. COVID-19 merupakan salah satu contoh ilustratifnya.<sup>8</sup> Laporan Risiko Global (*Global Risk Report*) memetakan risiko saat ini (sampai 2 tahun), dan jangka Panjang (10 tahun). Risiko yang akan dijumpai sama, terkait lingkungan, masyarakat, geopolitik dan teknologi.

Risiko iklim dan lingkungan hidup adalah fokus utama dari persepsi risiko global selama dekade mendatang. Risiko yang kita anggap paling tidak siap menghadapinya. Kurangnya kemajuan yang mendalam dan terpadu dalam mencapai target iklim telah memperlihatkan perbedaan antara apa yang secara ilmiah diperlukan untuk mencapai net zero dan apa yang secara politik layak dilakukan. Meningkatnya permintaan terhadap sumber daya sektor publik dan swasta akibat krisis lainnya akan mengurangi kecepatan dan skala upaya mitigasi selama dua tahun ke depan, serta tidak adanya kemajuan dalam men-

---

<sup>8</sup> Anthony J. Masys, "Non-Traditional Security: A Risk-Centric View."

dukung adaptasi yang diperlukan bagi masyarakat dan negara-negara yang semakin terkena dampak perubahan iklim.

Ancaman seringkali dihubungkan dengan keamanan. Konteks keamanan saat ini berbeda dengan konteks Perang Dingin. Konteks keamanan saat ini diidentifikasi sebagai keamanan non-tradisional. Masalah keamanan non-tradisional adalah tantangan terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dan negara bagian yang muncul terutama dari sumber non-militer. Masalah keamanan yang muncul, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit menular, bencana alam, migrasi tidak teratur, kekurangan makanan, penyelundupan orang, perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional. Bahaya ini seringkali bersifat transnasional, menentang solusi sepihak dan membutuhkan tanggapan yang komprehensif—politik, ekonomi, sosial, serta penggunaan kekuatan militer secara kemanusiaan.

Ketika krisis saat ini mengalihkan sumber daya dari risiko yang timbul dalam jangka menengah dan panjang, maka timbullah beban pada ekosistem alami, akan tumbuh jika masih ada peran yang diremehkan dalam perekonomian global dan kesehatan planet secara keseluruhan. Hilangnya alam dan perubahan iklim pada hakikatnya saling terkait—sebuah kegagalan dalam satu bidang akan mengalir ke yang lain. Tanpa perubahan kebijakan atau investasi yang signifikan, keterkaitan antara dampak perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, ketahanan pangan dan konsumsi sumber daya alam akan mempercepat keruntuhan ekosistem, mengancam pasokan pangan dan mata pencaharian di negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim, memperbesar dampak bencana alam, dan membatasi kemajuan lebih lanjut. tentang mitigasi iklim.

Krisis yang semakin parah kini berdampak luas pada masyarakat. Berdampak pada kehidupan masyarakat sebagai bagian dari populasi, dan semakin membuat tidak stabil perekonomian dunia, dibandingkan yang biasanya dialami masyarakat rentan dan negara-negara rapuh. Selain risiko-risiko serius yang diperkirakan akan berdampak pada tahun 2023, seperti “krisis pasokan energi”, “meningkatnya inflasi”, dan “krisis pasokan pangan”, krisis biaya hidup global sudah mulai terasa. Dampak ekonomi dapat dilindungi oleh negara-negara yang mampu, namun banyak negara-negara berpendapatan rendah menghadapi berbagai krisis: utang, perubahan iklim, dan ketahanan pangan. Selanjutnya, tekanan sisi pasokan berisiko mengubah biaya saat ini menjadi krisis kemanusiaan yang lebih luas di dalam negeri dua tahun ke depan di banyak pasar yang bergantung pada impor.<sup>9</sup>

Dalam laporan risiko global 2023 menunjukkan bawa pemerintah dan sektor bisnis memiliki risiko terkait “krisis utang”, “kegagalan menstabilkan harga lintasan”, “Kegagalan dalam mitigasi perubahan iklim” dan “Kegagalan adaptasi perubahan iklim”, isu berikutnya yang lebih menonjol pada pemerintah adalah risiko terkait “Kejahatan dunia maya dan ketidakamanan dunia maya yang meluas” sementara pada sektor bisnis adalah “Insiden kerusakan lingkungan berskala besar”.<sup>10</sup> Risiko global yang diperkirakan banyak orang akan terjadi dua tahun ke depan, dalam konteks peningkatan tersebut dampak dan kendala yang dikenakan oleh banyak krisis yang dirasakan saat ini. Risiko tersebut adalah: biaya hidup krisis,

---

<sup>9</sup> World Economic Forum, *The Global Risk Report 2023* (Geneva: World Economic Forum, 2023), <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/>.

<sup>10</sup> World Economic Forum.

kemerosotan ekonomi, perang geoekonomi, jeda aksi iklim dan polarisasi masyarakat.<sup>11</sup>

Krisis biaya hidup dirasakan yang secara puncaknya tingkat keparahannya dalam dua tahun ke depan dan mereda kemudian. Namun masih adanya dampak biaya global krisis hidup dapat mengakibatkan peningkatan proporsi kelompok masyarakat yang paling rentan tidak diberi akses terhadap kebutuhan dasar, sehingga memicu kerusuhan dan ketidakstabilan politik. Gangguan rantai pasokan yang berkelanjutan dapat menyebabkan inflasi inti yang kaku, khususnya pada sektor pangan dan energi. Hal ini dapat memicu kenaikan suku bunga lebih lanjut, meningkatkan risiko kesulitan utang, kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan, dan lingkaran setan dalam perencanaan fiskal.<sup>12</sup>

“Inflasi yang cepat dan/atau berkelanjutan” juga disorot sebagai lima risiko teratas selama dua tahun ke depan sebagai ancaman utama di sejumlah negara G20 – termasuk Brazil, Korea Selatan dan Meksiko – meskipun tekanan inflasi telah mempengaruhi negara maju dan negara-negara berkembang. “Inflasi yang cepat dan/atau berkelanjutan” juga disorot sebagai lima risiko teratas selama dua tahun ke depan sebagai ancaman utama di sejumlah negara G20 meskipun tekanan inflasi telah mempengaruhi negara maju dan negara-negara berkembang.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> World Economic Forum.

<sup>12</sup> IMF, “World Economic Outlook Report October 2022: Countering the Cost-of-Living Crisis,” Oktober 2022, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022>.

<sup>13</sup> World Economic Forum, *The Global Risk Report 2023*.

Hal ini akan meningkatkan pengaruh kreditur secara global negara dan meningkatkan kerapuhan negara sebagai kapasitasnya untuk mengatasi krisis pangan dan energi yang terjadi secara bersamaan akan terbatas.<sup>14</sup> Beberapa negara tidak akan mampu melakukannya menahan guncangan di masa depan, berinvestasi pada pertumbuhan di masa depan, dan teknologi hijau atau membangun ketahanan masa depan pendidikan, kesehatan dan sistem ekologi, dengan dampak yang diperburuk oleh pihak yang paling kuat dan ditanggung secara tidak proporsional.

Selanjutnya terkait perang geoekonomi, tren perang geoekonomi berisiko menimbulkan dampak buruk yang meluas. Penerapan kekuatan ekonomi yang lebih luas untuk mencapai tujuan geopolitik berisiko menimbulkan lingkaran ketidakpercayaan yang tajam dan semakin meningkat.<sup>15</sup> Dampak finansial dan teknologi dapat menyoroiti kerentanan lebih lanjut, yang menyebabkan negara-negara secara proaktif menghentikan saling ketergantungan demi keamanan dan ketahanan nasional selama dua tahun ke depan. Hal ini dapat memicu hasil yang berlawanan dengan tujuan yang diharapkan, menurunkan ketahanan dan pertumbuhan produktivitas, serta menandai berakhirnya era ekonomi yang ditandai dengan modal,

---

<sup>14</sup> Isabel Schnabel, "A new age of energy inflation: climateflation, fossilflation and greenflation," in *Monetary Policy and Climate Change at The ECB and its Watchers XXII Conference* (Frankfurt am Main: European Central Bank, 2022), [https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317\\_2~dbb3582f0a.en.html](https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317_2~dbb3582f0a.en.html).

<sup>15</sup> Qianer Liu, Kathrin Hille, dan Yuan Yang, "World's Top Chip Equipment Suppliers Halt Business with China," *Financial Times*, 13 Oktober 2022, <https://www.ft.com/content/51f9ec46-ec9e-43a1-ba64-45e0e6e6da71>.

tenaga kerja, komoditas, dan barang yang lebih murah dan mengglobal.

Sementara itu terkait kohesi sosial menjadi semakin tererosi terutama pada tahun terkahir.<sup>16</sup> Esrosi kohesi sosial didefinisikan sebagai hilangnya modal sosial dan keretakan komunitas menyebabkan menurunnya stabilitas sosial, individu dan kesejahteraan kolektif dan produktivitas ekonomi, itu menduduki peringkat kelima risiko global terparah yang dihadapi jangka pendek dalam laporan *The Global Risk Report 2023*. Itu juga dipandang sebagai salah satu risiko yang paling terpengaruh di jaringan global, dipicu oleh banyak hal lainnya totensi risiko jangka pendek dan jangka panjang—termasuk krisis utang dan ketidakstabilan negara, krisis biaya hidup dan inflasi, kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan dan migrasi iklim. Kesenjangan yang semakin besar dalam nilai-nilai dan kesetaraan menimbulkan tantangan nyata bagi sistem otokratis dan demokratis, karena kesenjangan ekonomi dan sosial diterjemahkan ke dalam kesenjangan politik. Polarisasi dalam isu-isu seperti imigrasi, gender, hak reproduksi, etnis, agama, iklim dan bahkan pemisahan diri dan anarkisme.<sup>17</sup>

Risiko yang sama dihadapi 2 tahun dan 10 tahun kedepan adalah persoalan mengenai lingkungan yaitu terkait: kegagalan untuk memitigasi perubahan iklim, kegagalan untuk beradaptasi pada perubahan iklim, kerusakan alam dan cuaca ekstrem, kehilangan *biodiversity* dan hancurnya ekosistem, krisis sumber daya alam, dan insiden kerusakan hidup besar-besaran.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> World Economic Forum, *The Global Risk Report 2023*.

<sup>17</sup> Janan Ganesh, "Anarchy is a likelier future for the west than tyranny," *Financial Times*, 21 Juni 2022, <https://www.ft.com/content/38dfc217-742e-4d7e-b926-0fdc937f9be4>.

<sup>18</sup> World Economic Forum, *The Global Risk Report 2023*.

Risiko lainnya selain lingkungan, pada 10 tahun kedepan, adalah kesehatan, keamanan manusia, hak digital, dan stabilitas ekonomi.

Ketika beban penyakit bertambah dan inovasi meluas khususnya terkait pengobatan maka permintaan akan layanan kesehatan menghadapi tantangan kapasitas yang kronik semakin meningkat. Pandemi COVID-19 mengganggu pemberian layanan pencegahan dan pengobatan, sehingga mengakibatkan penumpukan layanan di rumah sakit dan komunitas yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Ditambah dengan sistem kesehatan yang rapuh, terdapat risiko dari meningkatnya “sindemik”: serangkaian masalah kesehatan yang terjadi secara bersamaan dan saling memperburuk yang berdampak pada status kesehatan suatu populasi secara keseluruhan, dalam konteks lingkungan politik, struktural atau sosial.<sup>19</sup>

Konsep ini telah lama diterapkan pada penelitian HIV. Baru-baru ini, hal ini juga dipertimbangkan dalam konteks pandemi COVID-19 dan beban penyakit kronis, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan dan kematian di kalangan masyarakat yang kurang beruntung secara sosial.<sup>20</sup> Pola serupa kini dapat terjadi pada tingkat yang sistemik: memburuknya kondisi sosial, konteks ekonomi dan politik akan berkontribusi terhadap penyakit endemik dan menyebabkan hasil kesehatan yang lebih buruk bagi masyarakat tertentu.

---

<sup>19</sup> Merrill Singer, “A dose of drugs, a touch of violence, a case of AIDS: Conceptualizing the Sava Syndemic,” *Free Inquiry in Creative Sociology* 24, no. 2 (Mei 1996), <https://ojs.library.okstate.edu/osu/index.php/FICS/article/view/1346>.

<sup>20</sup> Indah Pangestu Amaritasari, “The Study on the Coronavirus Pandemic Using Human Rights and Human Security Approach,” *Jurnal HAM* 13, no. 2 (Agustus 2022): 215–34, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.215-234>.

Ketimpangan dan konflik dalam nilai-nilai sosial dapat memicu perubahan peraturan mengenai pendidikan, pekerjaan, perumahan, gender, imigrasi dan lingkungan hidup, yang beberapa di antaranya dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap penyakit-penyakit tertentu.

Terkait keamanan manusia, konflik dan senjata baru memunculkan pengaruh terhadap keamanan manusia khususnya dalam hubungannya dengan teknologi dan munculnya negara-negara yang tidak mau bekerjasama. Sektor swasta akan semakin mendorong hal ini pengembangan teknologi militer, menghasilkan kemajuan dalam manufaktur semikonduktor, AI, komputasi kuantum, bioteknologi dan bahkan fusi nuklir, dan teknologi lainnya.<sup>21</sup>

Banyak di antaranya bersifat tujuan umum dengan sipil aplikasi, tetapi juga merupakan pengganda kekuatan militer kekuasaan, meningkatkan kemampuan otonom terkait senjata, perang dunia maya, dan kemampuan pertahanan. Teknologi yang sedang berkembang akan semakin menjadi subjek dengan batasan yang diberlakukan negara terhadap arus lintas batas negara bakat, kekayaan intelektual, data, dan teknologi yang mendasarinya (seperti sebagai peralatan litografi ultra-violet ekstrim) dan sumber daya (seperti logam dan mineral penting), untuk membatasi kebangkitan komparatif pesaing asing. Peningkatan fokus dan investasi akan mendorong inovasi – pengeluaran penelitian dan pengembangan global mencapai 2,63% pada tahun 2021, yang tertinggi dalam beberapa dekade.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> James Jay Carafano, “Rapid advancements in military tech,” Geopolitical Intelligence Services, 19 Januari 2022, <https://www.gisreportsonline.com/r/military-technology/>

<sup>22</sup> United Nations Education Scientific Culture Organization (UNES-

Keamanan non-tradisional berfokus pada ancaman non-militer dengan karakteristik umum ini:<sup>23</sup>

- Ancaman bersifat transnasional sehubungan dengan asal-usul, konsepsi, dan efeknya.
- Mereka tidak berasal dari persaingan antar negara bagian atau pergeseran keseimbangan kekuasaan, tetapi sering didefinisikan dalam istilah politik dan sosial ekonomi.
- Masalah keamanan non-tradisional seperti kelangkaan sumber daya dan migrasi tidak teratur menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik dan karenanya menjadi ancaman bagi keamanan.
- Ancaman lain seperti perubahan iklim sering disebabkan oleh gangguan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan alam yang rapuh dengan konsekuensi yang mengerikan bagi negara dan masyarakat yang seringkali sulit untuk dibalik atau diperbaiki.
- Solusi nasional seringkali tidak memadai dan dengan demikian pada dasarnya akan membutuhkan kerja sama regional dan multilateral.
- Referensi keamanan tidak lagi hanya negara (kedaulatan negara atau integritas teritorial), tetapi juga rakyat (kelangsungan hidup, kesejahteraan, martabat) baik di tingkat individu maupun masyarakat.

---

CO), "Launch of the 2022 Survey of Research and Experimental Development Statistics for SDG 9.5," UNESCO Institute of Statistics, 9 Juni 2022, <https://uis.unesco.org/en/news/launch-2022-survey-research-and-experimental-development-statistics-sdg-9-5>.

<sup>23</sup> Mely Caballero-Anthony, *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach* (London: SAGE Publication, 2016).

Berakhirnya Perang Dingin menyaksikan perubahan paradigma tidak hanya dalam lingkungan internasional tetapi juga dalam bidang kajian yang berkaitan dengan isu keamanan. Hubungan internasional pada masa Perang Dingin, baik teori maupun praktik, didominasi oleh paradigma realis yang menekankan pada gagasan menjaga negara dari ancaman yang berasal dari luar. Konsepsi seperti ini tidak tepat sasaran dan mempersempit analisis isu-isu internasional dan keamanan. Selama dekade terakhir, khususnya pada era pasca-Perang Dingin, berbagai upaya dilakukan untuk memperluas agenda keamanan dengan memasukkan isu-isu sektor lain, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan ekologi, selain sektor militer.

Istilah keamanan, seperti halnya pada konteks transnasional, yang diambil dari berbagai aliran teori, tidak hanya untuk memberikan kejelasan terhadap istilah tersebut tetapi juga untuk memungkinkan menempatkan konsep tersebut dalam kerangka acuan yang tepat, yaitu untuk mengkaji konsep keamanan dengan fokus pada perubahan agenda keamanan internasional yang tidak hanya memerlukan pemikiran ulang namun juga peninjauan ulang terhadap isu-isu keamanan yang selalu ada.<sup>24</sup>

Keamanan non-tradisional tidak menyangkal pentingnya proposisi realis yang berpendapat bahwa menjaga integritas teritorial, kedaulatan politik, kelangsungan ekonomi, dan kohe-  
sisi sosial negara adalah langkah-langkah kunci keamanan. Namun, konsepsi ini juga mengakui ancaman-ancaman yang tidak selalu terkait dengan pelaksanaan kekuasaan negara atau kelangsungan hidup negara. Konsep keamanan harus

---

<sup>24</sup> Ningthoujam Koiremba Singh dan William Nunes, "Nontraditional Security: Redefining State-Centric Outlook," *SAGE Publication* 20, no. 1 (2016): 1–23.

diperluas hingga mencakup biosfer, yang menopang seluruh kehidupan, dan terlepas dari struktur yang menentukan dan memberi makna pada keberadaan kita sebagai makhluk politik.

Ancaman lingkungan tidak selalu berasal dari pergeseran keseimbangan kekuasaan atau persaingan antar negara, namun dari gangguan terhadap rapuhnya keseimbangan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Degradasi lingkungan dapat berdampak buruk terhadap masyarakat dan negara dengan mempengaruhi kualitas hidup. Degradasi lingkungan sebesar ini mungkin juga akan lebih sulit untuk diperbaiki atau diperbaiki, seperti yang diilustrasikan oleh pemanasan global dan penipisan lapisan ozon.<sup>25</sup>

Keamanan juga perlu diperluas untuk mencakup aktor-aktor non-negara yang menantang negara dari dalam dan luar. Gagasan tentang keamanan non-tradisional paling baik digambarkan sebagai pergeseran paradigma keamanan dibandingkan transformasi, karena unsur-unsur penting dari paradigma lama masih tetap ada. Dari diskusi tersebut terlihat jelas bahwa persoalan keamanan tidak hanya berpusat dan berakhir pada negara, namun melampaui negara. Keamanan dapat dan tidak lagi harus dilihat hanya dari segi kerentanan atau ancaman yang berasal dari sumber eksternal pada khususnya. Konsep keamanan non-tradisional memperluas konsep tersebut dengan melampaui model realis yang berpusat pada negara dan mempertimbangkan semua permasalahan yang mempengaruhi kehidupan manusia.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Singh dan Nunes.

<sup>26</sup> Caballero-Anthony, *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*.

Konteks ancaman menjadi semakin kompleks pada era yang diidentifikasi sebagai *post truth*.<sup>27</sup> Definisi *post-truth* pada dasarnya berhubungan dengan kondisi dimana emosi menjadi lebih penting daripada fakta objektif dalam membentuk keyakinan pribadi dan perdebatan publik. Kedua, *post-truth* mencakup relativisasi kebenaran; gagasan bahwa pernyataan politik, dan bahkan posisi ilmiah yang didasarkan pada empiris, dapat dimanipulasi oleh produsen pengetahuan.<sup>28</sup> Sejalan dengan itu, para politisi tampaknya bisa membantah pernyataan mereka sebelumnya tanpa menimbulkan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, karakteristik ketiga dari *post-truth* adalah berkurangnya rasa malu ketika seseorang terungkap melakukan kesalahan faktual atau dicurigai melakukan penipuan.<sup>29</sup>

Keempat, fenomena ini nampaknya disertai dengan kecenderungan polarisasi pandangan. Terakhir, manipulasi pengetahuan dan polarisasi pandangan cenderung memicu teori ‘konspirasi’. Pasca-kebenaran (*Post-truth*) umumnya dipandang sebagai suatu hal yang lahir dari kekhawatiran mengenai hilangnya kebenaran.<sup>30</sup> Potensi pembalikan kemajuan modernis dalam produksi pengetahuan yang dominan sejak revolusi ilmiah pada masa Renaisans dan Pencerahan mengancam akan melemahkan kendali manusia atas ‘masalah’ sosial dan ilmiah. Pasca-kebenaran telah dikaitkan dengan meningkatnya

---

<sup>27</sup> Indah Pangestu Amaritasari, “Post Truth and ROle of International Relation Study,” *Journal of Social Political Sciences* 1, no. 2 (Mei 2020): 117–28, <http://e-journal.unas.ac.id/index.php/jsps/article/view/15>.

<sup>28</sup> Stewart Lockie, “Post-Truth Politics and the Social Sciences,” *Environmental Sociology* 3, no. 1 (2017): 1–5.

<sup>29</sup> S. Blackburn, *On Truth* (Oxford: Oxford University Press, 2018).

<sup>30</sup> L. McIntyre, *Post-Truth* (Boston: MIT Press, 2018).

otoritarianisme, tumpulnya gerakan-gerakan progresif sosial, dan menurunnya pengawasan terhadap demokrasi.<sup>31</sup>

Dilihat melalui lensa ini, maka dapat dikatakan bahwa *post-truth* sangat berhubungan dengansebelumnya dengan peran media sosial dalam kebangkitan post-truth.<sup>32</sup> Namun, kaitan yang lazim dengan kemunduran media tradisional adalah salah arah, sebagian karena pembedaan media sosial/arus utama mengembalikan kita pada dikotomi kebenaran/kepaluan yang problematis dan sebagian lagi karena media tersebut secara biasanya dianggap menjunjung kebenaran televisi dan surat kabar. Postman<sup>33</sup>, misalnya, berpendapat bahwa pada tahun 1980-an televisi telah menormalisasi diskontinuitas dan fragmentasi sehingga ‘menjadikan [orang Amerika] tidak peka terhadap kontradiksi’.<sup>34</sup>

Sebaliknya, media sosial penting karena melahirkan bentuk-bentuk simbol emansipasi yang lebih kompleks. Meskipun komunikasi telah berkembang dari bentuk fisik dan lisan, menjadi gambar dan teks, dan terakhir kombinasi gambar bergerak, suara dan teks (yaitu film), media sosial memperluas perkembangan progresif bentuk ekspresi manusia dalam tiga cara.

---

<sup>31</sup> Harry Collins, Martin Weinel, dan Robert Evans, “The politics and policy of the Third Wave: new technologies and society,” *Critical Policy Studies* 4, no. 2 (28 Juli 2010): 185–201, <https://doi.org/10.1080/19460171.2010.490642>.

<sup>32</sup> S. Fuller, *Post Truth: Knowledge as a Power Game* (London: Anthem Press, 2018).

<sup>33</sup> N. Postman, *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business* (New York: Penguin, 1985).

<sup>34</sup> J. Hannan, “Trolling Ourselves to Death? Social Media and Post-Truth Politics,” *European Journal of Communication* 33, no. 2 (2018): 214–26.

Pertama, penggunaan filter dan hashtag memberikan ringkasan singkat tentang rangkaian ide yang berpotensi lebih kompleks, dan telah terbukti membantu membangun ‘filter bubble’ atau ‘echo chamber’; ‘publik “ad-hoc”—ruang di mana keragaman pengalaman dan keahlian dapat hidup berdampingan seputar topik yang menjadi kepentingan bersama.<sup>35</sup> Demikian pula, *hyperlinking* dipahami telah mengubah komunikasi secara mendasar, membantu menyusun dan memperluas jaringan manusia dan ‘sarat dengan kekuatan simbolis dan sosial.<sup>36</sup> Ketiga, emotikon, yang sebagian besar digunakan untuk mengekspresikan emosi, humor, atau untuk penekanan,<sup>37</sup> menunjukkan bahwa emosi terlibat di dalam bentuk komunikasi dan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan.

Media sosial juga memperluas penggunaan komunikasi bergambar/film melalui meme, tanaman merambat, dan gif. Van Dijck<sup>38</sup> (berpendapat bahwa fungsi utama fotografi telah bergeser dari representasi ke presentasi diri dan komunikasi sosial; mulai dari berbagi benda hingga berbagi pengalaman. Munculnya istilah ‘*selfie*’ telah mendemokratisasi pergeseran perpaduan antara keterlibatan dan ketidakterikatan karena

---

<sup>35</sup> Jessica Gall Myrick et al., “#Stupidcancer: Exploring a Typology of Social Support and the Role of Emotional Expression in a Social Media Community,” *Health Communication* 31, no. 5 (3 Mei 2016): 596–605, <https://doi.org/10.1080/10410236.2014.981664>.

<sup>36</sup> Juliette De Maeyer, “Towards a hyperlinked society: A critical review of link studies,” *New Media & Society* 15, no. 5 (Desember 2013): 737–51, <https://doi.org/10.1177/1461444812462851>.

<sup>37</sup> D. Derks, A. Bos, dan J. Grumbkow, “Emoticons in Computer-Mediated Communication: Social Motives and Social Context,” *CyberPsychology & Behaviour* 11, no. 1 (2008): 99–101.

<sup>38</sup> José van Dijck, “Digital photography: communication, identity, memory,” *Visual Communication* 7, no. 1 (Februari 2008): 57–76, <https://doi.org/10.1177/1470357207084865>.

kamera ponsel memungkinkan penempatan diri berulang kali dalam konteks sosial dan membangkitkan refleksi diri. Van Dijck<sup>39</sup> mengutip contoh foto yang dipasang oleh militer AS di penjara Abu Ghraib untuk mengilustrasikan bagaimana alat komunikasi baru secara eksplisit melahirkan bentuk komunikasi yang lebih berorientasi emosional dan mencirikan *post-truth*. Oleh karena itu, media sosial penting bagi *post-truth* karena media ini mewakili tahap emansipasi simbol yang baru muncul dan lebih kompleks.

Ciri khas perkembangan kontemporer adalah sejauh mana media sosial mempunyai kapasitas untuk menciptakan konfigurasi audiens atau komunitas tertentu. Meskipun beberapa platform memungkinkan individu untuk menentukan siapa yang menerima konten yang mereka hasilkan (Facebook dan WhatsApp), platform lainnya menciptakan jangkauan audiens yang relatif terbuka dan tidak dapat diprediksi (Twitter dan Instagram).<sup>40</sup> Misalnya, me-retweet memperluas dampak komunikasi kita ke populasi yang sebelumnya tidak dikenal (anggaplah istilah ‘menjadi viral’).

Demikian pula, media sosial telah menghadirkan makna baru dan spesifik secara kontekstual untuk istilah-istilah seperti teman (Facebook) dan pengikut (Twitter). Karena banyak pengguna Facebook yang memiliki ratusan ‘teman’, ikatan sosial yang relatif lemah cenderung mendominasi<sup>41</sup> dan mereka

---

<sup>39</sup> van Dijck.

<sup>40</sup> Dominic Malcolm, “Post-Truth Society? An Eliasian Sociological Analysis of Knowledge in the 21st Century,” *SAGE Journals* 55, no. 6 (Desember 2021): 1063–1079.

<sup>41</sup> Alistair G. Sutcliffe, Jens F. Binder, dan Robin I.M. Dunbar, “Activity in Social Media and Intimacy in Social Relationships,” *Computers in Human Behavior* 85 (Agustus 2018): 227–235, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.050>.

yang memiliki jaringan lebih besar cenderung ‘kurang dekat secara emosional dengan setiap anggota jaringan’.<sup>42</sup> Demikian pula, meskipun banyak ‘pengikut’ yang termotivasi oleh keterarikan dan kekaguman, ‘pengikut palsu’ cukup lazim sehingga memerlukan pelarangan dan sanksi oleh Twitter.<sup>43</sup>

Pilar-pilar identitas komunitas yang ada sebelumnya—yaitu jaringan hubungan lokal yang sudah mapan, rasa memiliki yang berakar pada suatu tempat, dan rasa status yang ditanamkan melalui sosialisasi<sup>44</sup>—pasti terkikis seiring dengan beralihnya dunia sosial ke dunia online. Oleh karena itu, hal penting mengenai kebangkitan media sosial dibandingkan dengan *post-truth* adalah bahwa teknologi-teknologi baru ini memungkinkan perpanjangan ikatan saling ketergantungan yang membentuk produksi dan konsumsi pengetahuan, dan dengan demikian mengkonfigurasi ulang jenis dan ruang lingkup hubungan antarmanusia.

Ancaman “post-truth” merujuk pada fenomena di mana opini dan perasaan publik sering kali lebih berpengaruh dalam membentuk pandangan daripada fakta atau kebenaran objektif. Ini menciptakan suasana di mana informasi yang ti-

---

<sup>42</sup>Thomas V Pollet, Sam G.B Roberts, dan Robin I.M Dunbar, “Use of Social Network Sites and Instant Messaging Does Not Lead to Increased Offline Social Network Size, or to Emotionally Closer Relationships with Offline Network Members,” *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 14, no. 4 (April 2011): 253–58, <https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0161>.

<sup>43</sup>Ashraf Khalil, Hassan Hajjdiab, dan Nabeel Al-Qirim, “Detecting Fake Followers in Twitter: A Machine Learning Approach,” *International Journal of Machine Learning and Computing* 7, no. 6 (Desember 2017): 198–202, <https://doi.org/10.18178/ijmlc.2017.7.6.646>.

<sup>44</sup>Graham Crow dan Maggie Laidlaw, “Norbert Elias’s extended theory of community: From established/outsider relations to the gendered we–I balance,” *The Sociological Review* 67, no. 3 (7 Mei 2019): 568–84, <https://doi.org/10.1177/0038026119829772>.

dak terverifikasi atau palsu dapat dengan mudah menyebar dan diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ancaman post-truth bisa memiliki beberapa dampak:

1. Pembentukan opini publik yang tidak akurat: jika masyarakat lebih cenderung menerima informasi berdasarkan emosi atau kecenderungan politik daripada fakta yang terverifikasi, hal ini dapat menyebabkan pembentukan opini publik yang tidak akurat atau bahkan kontrafaktual.
2. Kehilangan kepercayaan pada lembaga dan media tradisional: jika informasi yang dipublikasikan oleh lembaga dan media tradisional disalahartikan atau dianggap tidak akurat, bisa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga tersebut.
3. Polarisasi dan konflik sosial: penyebaran informasi yang tidak akurat atau tendensius dapat memperkuat pembagian dan polarisasi masyarakat, bahkan memicu konflik sosial antar-kelompok dengan pandangan yang berbeda.
4. Kurangnya kepedulian terhadap fakta dan kebenaran: post-truth dapat mengurangi perhatian pada kebenaran dan fakta yang sesungguhnya, mengarah pada kehilangan nilai pentingnya informasi yang benar dan terverifikasi.
5. Meningkatnya pengaruh desinformasi: adanya desinformasi yang disebarluaskan secara luas dapat memengaruhi proses demokrasi, termasuk pemilihan umum, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam hal-hal yang bersifat kebenaran dan keadilan.

Untuk menghadapi ancaman *post-truth*, pendekatan pencegahan harus melibatkan peningkatan literasi informasi di kalangan masyarakat, mengajarkan keterampilan kritis untuk mengevaluasi sumber informasi, dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya fakta dan kebenaran objektif dalam pembentukan opini dan keputusan. Upaya ini juga harus didukung oleh lembaga-lembaga media, pendidikan, dan pemerintah dalam menyebarkan informasi yang akurat dan terverifikasi.

Hal ini diperparah dengan risiko yang dihadapi Indonesia 2–10 tahun ke depan. Dalam laporan the Global Risk Report, risiko yang dihadapi Indonesia diantaranya adalah *economic downturn*, misinformasi dan disinformasi, kerusakan alam khususnya akibat nikel, krisis hutang, konflik interstate, inflasi, ketidakmerataan digital khususnya literasi digital, dan kontestasi geopolitik terkait sumberdaya.<sup>45</sup>

## **4.2. Respon Negara Republik Indonesia**

Indonesia memiliki sejumlah ancaman yang berkembang, mulai dari keamanan konvensional hingga ancaman non-konvensional seperti ekstremisme, terorisme, konflik sosial, keamanan siber, dan tantangan lingkungan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman ini dalam konteks bela negara adalah:

1. Penguatan pertahanan: fokus pada penguatan angkatan bersenjata, keamanan dalam negeri, dan pertahanan siber. Investasi dalam teknologi dan keahlian yang

---

<sup>45</sup> World Economic Forum, *The Global Risk Report 2023*.

diperlukan untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman dalam dan luar negeri.

2. Pendidikan dan literasi: melalui sistem pendidikan, mengintegrasikan pemahaman akan bela negara, keberagaman, dan nilai-nilai kebangsaan. Literasi informasi dan pendidikan karakter juga penting untuk membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan negara.
3. Pemberdayaan masyarakat: melalui partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pemberdayaan lokal, peningkatan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang membangun persatuan dan kesatuan.
4. Penegakan hukum: memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum, terutama dalam menghadapi terorisme, ekstremisme kekerasan, korupsi, dan kejahatan lainnya yang dapat mengganggu kedaulatan negara.
5. Kolaborasi internasional: kerja sama dengan negara-negara lain dan lembaga internasional untuk memerangi terorisme, kejahatan lintas negara, dan tantangan global lainnya yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.
6. Inovasi teknologi: mendorong dan mengadopsi inovasi teknologi dalam berbagai bidang termasuk keamanan siber, pertahanan, dan pemantauan terhadap ancaman yang berkembang.
7. Kesadaran lingkungan: menghadapi ancaman lingkungan yang dapat berdampak pada keamanan nasional, seperti perubahan iklim dan bencana alam. Upaya untuk melindungi lingkungan juga bagian dari bela

negara karena lingkungan yang sehat berkontribusi pada keamanan dan kestabilan.

Pentingnya keseimbangan antara aspek militer dan non-militer dalam menghadapi ancaman masa kini dan masa depan juga perlu menjadi fokus. Itu juga berarti membangun kesadaran kolektif, memperkuat struktur sosial, dan membangun sistem yang inklusif untuk menghadapi ancaman yang beragam di berbagai bidang kehidupan.

### **Respon saat ini**

Indonesia saat ini menuju era yang disebut sebagai Indonesia emas. “Indonesia Emas” adalah visi jangka panjang yang menekankan pencapaian kemajuan dan kemakmuran bagi Indonesia. Biasanya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan masa depan di mana Indonesia menjadi negara yang maju secara ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah Indonesia sering mengusung gagasan “Indonesia Emas” sebagai cita-cita jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional.<sup>46</sup>

Visi “Indonesia Emas” ini biasanya mencakup berbagai bidang, seperti:<sup>47</sup>

1. Perekonomian yang Kuat: Fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan investasi,

---

<sup>46</sup> Kementerian PPN/ Bappenas, *Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur* (Jakarta: Kementerian PPN/ Bappenas, 2019).

<sup>47</sup> Kementerian PPN/ Bappenas.

penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

2. Pendidikan Berkualitas: Menekankan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi, dengan fokus pada pengembangan SDM yang berkualitas.
3. Infrastruktur yang Maju: Pembangunan infrastruktur yang kuat dan terintegrasi, seperti jalan, jembatan, bandara, dan sistem transportasi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
4. Kesehatan dan Kesejahteraan: Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan akses terhadap keadilan sosial.
6. Keberlanjutan Lingkungan: Menjaga lingkungan dan sumber daya alam Indonesia melalui pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Visi “Indonesia Emas” berfungsi sebagai tujuan ambisius yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaya di tingkat nasional dan internasional. Khusus untuk pemberdayaan masyarakat, maka konteks bela negara menjadi penting. Bela negara dan pemberdayaan masyarakat adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks pembangunan nasional.

1. Bela Negara: Konsep bela negara berkaitan dengan kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan, melindungi, dan melayani negara. Ini tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup kesiapan dalam segala aspek kehidupan. Ini termasuk kesadaran akan bahaya terhadap negara, kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan kewaspadaan terhadap ancaman terhadap keselamatan dan keamanan negara.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan kesempatan kepada masyarakat agar mereka dapat menjadi lebih mandiri, aktif secara sosial, ekonomi, dan politik. Ini melibatkan pendidikan, pelatihan, akses terhadap sumber daya, inklusi sosial, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Kedua konsep ini saling terkait karena:

1. Kesiapan masyarakat: pemberdayaan masyarakat mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang tangguh. Ketika masyarakat teredukasi, memiliki akses yang sama terhadap peluang, dan diberdayakan, mereka lebih mampu memenuhi tugas mereka dalam bela negara.
2. Partisipasi aktif: pemberdayaan masyarakat juga mencakup keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat yang aktif berkontribusi dalam pembangunan nasional dan menjadi lebih peka terhadap ancaman terhadap negara.

3. Keamanan dan kedaulatan: masyarakat yang sadar akan bela negara cenderung lebih proaktif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Mereka lebih siap dan berdaya dalam mengatasi ancaman, baik dari dalam maupun dari luar.

Pemberdayaan masyarakat dan konsep bela negara saling melengkapi. Pemberdayaan mempersiapkan individu untuk berperan aktif dalam pembangunan dan melindungi negara, sementara bela negara memberikan makna pada pemberdayaan dengan memotivasi individu untuk mengambil bagian dalam pembelaan negara.

Berbagai pemberdayaan masyarakat berwawasan bela negara sudah dilakukan seperti berikut ini:

*Pertama*, pendidikan. Pada sektor pendidikan ada materi MBKM bela negara. MBKM program bela negara adalah salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditujukan untuk mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk saling bertukar wawasan baru, mendapat banyak pengalaman dan toleransi sesama individu sambil mengikuti perkuliahan. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara LLDikti Wilayah III (yang merupakan inisiator) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (BADIKLAT Kemenhan) dalam mensinergikan PMM dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).

Yang mana inovasi bela negara secara nyata saat ini adalah dengan menjadi generasi bertalenta dan cakap digital menangkal hoax. Selain itu, adanya program ini juga menjadi upaya penguatan literasi digital di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

MBKM program bela negara yang diluncurkan sejak tahun 2022 ini menjadi salah satu program unggulan yang cukup banyak diminati oleh mahasiswa. Karena lewat program ini, mereka mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak belajarnya di luar program studi dan perguruan tinggi asal. Selain itu, melalui program kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang tertuang dalam kesepakatan yang tertuang pada nomor: 293/e/ks.06.02/2022 dan nomor PKS/170/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, juga memiliki tujuan seperti:

1. Membantu mengeksplor dan mempelajari keberagaman pelaksanaan Tri Dharma di perguruan tinggi mitra;
2. Berteman dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mitra. Kesempatan belajar di perguruan tinggi mitra, bertukar sementara bermakna selamanya.
3. Mendorong pemulihan pasca pandemi dan membantu Indonesia menyongsong masa depan.
4. Meningkatkan kesadaran bela negara, menciptakan mahasiswa berkarakter bela negara, dan memiliki kompetensi profesi digital.

Pendidikan bela negara dilakukan tidak hanya di lingkungan pendidikan dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetapi juga Kementerian Agama dengan pondok pesantren.<sup>48</sup> Peran santri dalam menjaga keutuhan NKRI sudah tidak diragukan lagi tidak sedikit para pejuang dan tokoh-tokoh

---

<sup>48</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Pemberdayaan SDM Komponen Pendukung Pertahanan Negara,” April 10, 2019, <https://www.kemhan.go.id/poahan/2019/04/10/pemberdayaan-sdm-komponen->

nasional berasal dari pondok pesantren. Dengan kedudukan dan fungsinya yang khas, pondok pesantren menjadi salah satu wahana pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan sekaligus sebagai pusat pengembangan yang berorientasi terutama nilai-nilai keagamaan.

*Kedua*, kesehatan. Bela negara pada sektor kesehatan dilakukan melalui, diantaranya, pemberdayaan tenaga kesehatan masyarakat berwawasan bela negara. Bela negara yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan berhubungan dengan 10 pelayanan esensial kesehatan masyarakat:<sup>49</sup>

1. Memantau status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat
2. Mendiagnosis dan menyelidiki masalah kesehatan dan bahaya kesehatan dalam masyarakat
3. Menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan penduduk seputar masalah kesehatan
4. Menggerakkan kemitraan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan
5. Mengembangkan kebijakan dan rencana yang mendukung upaya kesehatan individual dan masyarakat
6. Menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan
7. Menghubungkan penduduk dengan layanan kesehatan yang dibutuhkan dan menjamin pemberian layanan kesehatan yang dalam kondisi lain tidak tersedia

---

pendukung-pertahanan-negara.html.

<sup>49</sup> Novita Dwi Istanti, "Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Masyarakat Berwawasan Bela Negara," UPN Veteran Health Research Institute, Desember 2022, <https://upnveri.com/news/show/1912202232-pemberdayaan-tenaga-kesehatan-masyarakat-berwawasan-bela-negara>.

8. Menjamin tenaga kerja layanan kesehatan personal dan kesehatan masyarakat yang kompeten
9. Mengevaluasi keefektifan, keterjangkauan, dan mutu layanan kesehatan berbasis penduduk dan individu
10. Melakukan penelitian untuk mencari pengetahuan, wawasan baru dan solusi yang inovatif terhadap masalah kesehatan.

*Ketiga*, komunikasi. Pada sektor komunikasi, adanya Forum komunikasi Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) menjadi wadah paling strategis dalam menyosialisasikan pesan pemerintah. Salah satu pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah tentang kecintaan NKRI dan bela negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017, kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumberdaya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara, dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

### **Respon inovatif yang diperlukan**

Bela negara saat ini masih ditujukan pada isu komponen cadangan yang berhubungan dengan, seumumnya, pelatihan fisik kemiliteran. Akan tetapi, bela negara dalam kosepsi kesadaran, kritis-analis berfikir yang inovatif belum banyak terlihat khususnya di wilayah pesisir. Indonesia adalah negara kelautan sehingga penting untuk memperhatikan konteks daerah pesisir untuk membangun kesadaran bela negara yang sesuai dengan keberadaan daerah pesisir tersebut. Satu penelitian yang dilakukan mengenai bela negara di daerah pesisir menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat da-

lam meningkatkan kesadaran bela negara di wilayah pesisir, yang sebagian besar merupakan wilayah memiliki persoalan kesejahteraan, adalah belum berhasil.<sup>50</sup> Oleh karena itu penting konteks bela negara pada masyarakat pesisir memperhatikan isu peningkatan kesejahteraan yang juga dapat memanfaatkan teknologi.<sup>51</sup>

Menuju Inodnesia Emas, persoalan teknologi tidak hanya perlu diperhatikan pada sektor kesejahteraan khususnya daerah pesisir yang berhubungan dengan bela negara, tetapi juga pada sektor pendidikan. Kesadaran sosial masyarakat perlu mengintegrasikan kepercayaan setempat seperti pendidikan agama dengan bela negara yang berkolaborasi dengan berbagai elemen lintas sektor.<sup>52</sup> Keberadaan teknologi dibutuhkan dalam hubungannya dengan *open science* khususnya sektor pendidikan dalam konteks bela negara.

Dengan beragamnya kompleksitas ancaman maka ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang tepat khususnya berbasis sains menjadi kunci dalam merespon tantangan ancaman yang ada. Hal ini dapat direspon melalui pembangunan

---

<sup>50</sup> Achmad Bastari, Suhirwan Suhirwan, dan TSL Toruan, “Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara di Kabupaten Tangerang, Banten (Studi di Lantamal III/ JKT),” *Jurnal Strategi Perang Semesta* 4, no. 3 (Desember 2018): 19–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.56555/sps.v4i3.290>.

<sup>51</sup> I Wayan Yuliarta dan Hayatul Khairul Rahmat, “Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Teknologi Sebagai Upaya Memperkuat Keamanan Maritim di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 180–189, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.3228>.

<sup>52</sup> Riyal Faraby Thahir, Colle M. Said, dan Muh. Rizal Masdul, “Implementasi Usaha Bela Negara terhadap Kesadaran Sosial Masyarakat di Desa Modo dalam Tinjauan Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (September 2019): 803–12, <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.732>.

rezim sains dengan kerjasama internasional khususnya melalui *open science*.

*Open science* (sains terbuka) merupakan hal yang wajib bagi kerja sama sains internasional untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030 dan memerangi krisis global. Namun, kesalahpahaman terhadap paradigma Ilmu Pengetahuan Terbuka, serta hambatan kelembagaan dan permodalan, menyebabkan kebijakan dan pola pikir yang terdiferensiasi dan tidak terpenuhi dalam pembuatan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Nasionalisme ilmu pengetahuan dan pengambilan keuntungan dari ilmu pengetahuan menyebabkan penerapan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda, di setiap negara dan wilayah, sehingga menghambat kerja sama menuju Agenda 2030 dan memerangi krisis global. Berpikir dalam batasan negara-bangsa (nasionalisme metodologis) menghambat imajinasi para pembuat kebijakan untuk membangun rezim kerja sama sains internasional yang dapat mendorong inovasi ilmiah menuju kebaikan bersama regional dan global.

Konteks *Open Science* di Indonesia menjadi perhatian khusus. Dengan jumlah Jurnal Akses Terbuka terbesar di dunia dan terus memanfaatkan ekonomi teknologi yang sedang berkembang, Indonesia sudah siap untuk melakukan kebangkitan ilmu pengetahuan dan berbagi pengetahuan. Dalam lima tahun terakhir, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan telah dikonsolidasikan menjadi satu “entitas super”, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menggugah imajinasi untuk sistem akses terbuka terpusat dan didanai publik untuk pengindeksan, penyimpanan, dan berbagi penelitian ilmiah, data dan hasil.

Selain itu, setelah Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia juga memegang Presidensi ASEAN pada tahun 2023, yang memberikan kewenangan untuk menentukan agenda kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi regional. *Open science*, dan juga agenda pembangunan berkelanjutan global, mempunyai potensi besar untuk diutamakan dalam wacana pembuatan kebijakan di Indonesia. Namun kenyataannya justru sebaliknya—sejauh ini. Sebuah penelitian yang dilakukan CSIS menunjukkan bahwa ada tiga tantangan umum dalam penerapan kebijakan Sains Terbuka dan pola pikir Sains Terbuka: 1) rendahnya literasi digital, 2) defisit dalam akses terbuka dan berbagi data terbuka, dan 3) keraguan terhadap kepemimpinan regional dalam kerja sama sains internasional.<sup>53</sup>

*Open Science* perlu diiringi dengan literasi terhadap digital khususnya dalam menghadapi era *post-truth*. Dalam era *post-truth*, di mana fakta tidak lagi menjadi landasan tunggal dalam pembentukan opini dan pandangan, respon inovatif menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini. Beberapa respon yang dapat dianggap inovatif konteks bela negara adalah:

1. Literasi informasi: fokus pada pendidikan dan literasi informasi yang lebih baik bagi masyarakat. Ini mencakup pendidikan media, keterampilan kritis, dan analisis yang lebih baik terhadap sumber informasi. Inovasi dalam metode pengajaran dan pendekatan kreatif untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana informasi diproduksi dan disebar.

---

<sup>53</sup> Benjamin Stewart, “A Case For Open Science In Indonesia: Advancing Digital Literacy, Scientific Infrastructure, and Leadership,” *Research on Digitalisation* (Jakarta, 2023), <https://www.csis.or.id/publication/a-case-for-open-science-in-indonesia-advancing-digital-literacy-scientific-infrastructure-and-leadership/>.

2. Teknologi verifikasi fakta: pengembangan dan penerapan teknologi untuk memverifikasi fakta secara cepat dan efisien. Inovasi dalam algoritma, kecerdasan buatan, dan perangkat lunak yang dapat mendeteksi informasi palsu atau meragukan secara otomatis.
3. Transparansi informasi: inovasi dalam mendorong transparansi informasi dari sumber-sumber resmi. Peningkatan akses publik terhadap data dan informasi yang dapat diverifikasi secara terbuka untuk mencegah manipulasi informasi.
4. Pemberdayaan komunitas digital: pengembangan platform dan komunitas online yang mendukung diskusi dan pertukaran informasi yang berbasis bukti. Forum-forum ini dapat mempromosikan pengetahuan bersama dan keterlibatan aktif dalam memeriksa kebenaran informasi.
5. Penelitian dan inovasi media: media tradisional dan digital dapat mengembangkan standar baru dalam melaporkan berita dan mengelola informasi. Pendekatan inovatif dalam penyajian berita yang lebih terbuka, jujur, dan diverifikasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan.
6. Kolaborasi antarbidang: kolaborasi antara akademisi, praktisi media, teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan solusi inovatif dalam menanggapi tantangan post-truth. Gabungan pengetahuan dari berbagai bidang dapat menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif.
7. Advokasi dan kampanye edukatif: inovasi dalam pendekatan kampanye komunikasi yang dapat mengu-

bah perilaku dan sikap masyarakat terhadap informasi yang tidak valid. Strategi kreatif dan kampanye edukatif yang efektif dapat membantu mengatasi dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak benar.

Inovasi dalam menghadapi post-truth tidak hanya memerlukan solusi teknologi, tetapi juga pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, perubahan perilaku, dan kerja sama lintas sektor untuk membangun lingkungan informasi yang lebih sehat.

Dalam konteks lingkungan, Bela Negara adalah konsep yang melibatkan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk melaksanakan Bela Negara dalam konteks lingkungan di Indonesia meliputi:

1. Konservasi sumber daya alam: melindungi hutan, lahan basah, sumber air, dan keanekaragaman hayati adalah bagian penting dari Bela Negara dalam konteks lingkungan. Ini melibatkan kebijakan yang ketat terkait penebangan liar, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, serta perlindungan terhadap spesies yang terancam punah.
2. Penyuluhan dan pendidikan lingkungan: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan sumber daya alam adalah aspek kunci dari Bela Negara. Pendidikan lingkungan yang menyeluruh di sekolah-sekolah dan kampanye penyuluhan untuk masyarakat umum sangat diperlukan.
3. Penerapan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan: pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan, termasuk

pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, serta perlindungan terhadap lingkungan dari pencemaran.

4. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil: kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil sangat penting. Ini mencakup program-program kerja sama untuk pelestarian lingkungan, program reboisasi, pengurangan limbah plastik, dan inisiatif lainnya yang dapat mendukung perlindungan lingkungan.
5. Penegakan hukum yang kuat: mengadopsi undang-undang yang kuat dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan penting untuk melindungi sumber daya alam. Ini juga memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan sistem peradilan yang adil dalam menangani kasus-kasus pelanggaran lingkungan.
6. Pengembangan inovasi teknologi ramah lingkungan: mendorong dan mendukung penelitian serta pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah yang inovatif, dan teknologi ramah lingkungan lainnya adalah bagian penting dari Bela Negara di bidang lingkungan.

Keseluruhan, Bela Negara dalam konteks lingkungan mengharuskan semua pihak, mulai dari individu hingga pemerintah, bekerja sama untuk melestarikan dan melindungi lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama dan masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia.

## V

# IMPLEMENTASI BELA NEGARA DI PERGURUAN TINGGI

**B**ELA negara adalah konsep yang mencakup serangkaian nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Konsepsi ini memungkinkan setiap warga negara untuk aktif berperan dalam menjaga, melindungi, dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan dengan segenap potensi yang dimiliki oleh anak bangsa<sup>1</sup>. Secara komprehensif bela negara terwujud dalam berbagai aktifitas produktif untuk mengisi semua sisi pembangunan bersama masyarakat, sehingga tercipta tertib dan harmoni sosial menuju masyarakat sejahtera.

Amanat Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan bela negara diselenggarakan melalui pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Kemudian MoU antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. II/V/NK/2021 tentang Penyelenggaraan Bela Negara di Lingkungan Perguruan Tinggi, telah memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk menganyamnya dalam Tridharma. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah

---

<sup>1</sup> Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji, "Pendidikan Bela Negara Sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi: Civic Defense Education as a Course in University," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 8, no. 3 (Desember 2018): 1

menambah satu komponen dalam MBKM (komponen ke-9), yaitu bela negara.

Konteks Bela Negara ini sangat penting dalam mendorong dan menjaga ketertiban sosial dan harmoni sosial. Mahasiswa dan seluruh sivitas akademika diajak untuk lebih memfokuskan diri dalam menjalankan aktifitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengacu langsung pada perbaikan kesejahteraan sosial yang secara akumulatif akan memperbaiki ketahanan nasional. Peran kampus kemudian diperluas menjadi institusi pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan perubahan sosial ekonomi dan budaya yang lebih baik. Upaya untuk menjembatani antara dunia kerja dan dunia industri maka dihubungkan dengan program MBKM di mana salah satu komponennya adalah bela negara.

Pendidikan karakter Bela Negara menjadi aspek yang sangat esensial dalam kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan karakter, sesuai dengan ketentuan konstitusional, memiliki dasar yang kukuh. Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila memberikan fondasi yang mendasar, teguh, dan menyeluruh. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (lihat UU RI No. 17 Tahun 2007), misi utama pembangunan nasional adalah mewujudkan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berlandaskan Pancasila. Karakter ini dicirikan oleh sifat dan perilaku manusia yang beriman, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga diharapkan punya moralitas tinggi, toleransi, semangat gotong royong, jiwa patriotik, berkembang secara dinamis, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perguruan tinggi bukan hanya merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan pengetahuan akademis saja,

tetapi juga merupakan lingkungan di mana nilai-nilai kebangsaan dapat disemaikan dan dikuatkan. Artinya, pendidikan tinggi bukan sekadar tempat untuk memperoleh keterampilan teknis dan pengetahuan spesifik, melainkan juga sebagai tempat dan medium yang sangat baik untuk membentuk individu. Individu yang memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Individu yang dapat mengabdikan ilmu pengetahuan dan keahliannya untuk membangun negara dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat.

Bab ini akan membahas peran bela negara secara konkret yang dapat ditumbuh-kembangkan melalui pelaksanaan Tridharma di kampus. Lebih spesifiknya perguruan tinggi harus mengambil peran strategis, yang secara aktif membentuk dan membangun generasi muda. Dengan demikian akan terbangun generasi yang berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan yang siap menghadapi berbagai tantangan global. Generasi yang siap menghadapi berbagai ancaman—dalam dan luar negeri—yang bisa merusak masa depan kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam dinamika global saat ini, tantangan kebangsaan semakin kompleks. Globalisasi membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ini, melibatkan mahasiswa dalam pemahaman serta penyelesaian berbagai tantangan. Konsep bela negara menjadi landasan yang relevan, sebab melalui implementasinya, perguruan tinggi dapat menjadi pionir dalam membentuk generasi muda, yang memiliki semangat cinta tanah air, dan siap berkontribusi pada pembangunan nasional, melalui keahlian yang dimiliki di bidang masing-masing.

Pentingnya implementasi konsep bela negara di perguruan tinggi terletak pada fakta bahwa mahasiswa adalah agen

perubahan masa depan. Mereka tidak hanya akan menjadi pemimpin di berbagai sektor masyarakat, tetapi juga menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Oleh karena itu, membangun kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab terhadap negara merupakan bagian integral dari pendidikan tinggi. Mahasiswa yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan akan lebih mampu menghadapi tantangan global dengan sikap yang positif dan solutif.

Melalui bab ini, akan dijelaskan secara rinci bagaimana perguruan tinggi dapat mengambil peran aktif pengimplementasian konsep bela negara dalam kurikulum. Pelibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat rasa cinta tanah air, termasuk strategi-strategi yang mendukung pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan mahasiswa. Dengan demikian, bab ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perguruan tinggi menjadi garda terdepan dalam mendukung keberlanjutan dan kemajuan bangsa di era global.

Penerapan bela negara di perguruan tinggi merupakan salah satu jawaban terhadap berbagai ancaman yang ada. Ancaman dengan skala yang berbeda-beda pada masing-masing aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta keselamatan dan keamanan. Dunia pendidikan tinggi perlu menjawab ancaman tersebut dengan melaksanakan pendidikan bela negara, baik dalam pengajaran, penelitian maupun dalam pengabdian mereka kepada masyarakat.

## **5.1. Bela Negara dalam Konteks Pendidikan**

Perguruan tinggi—khususnya di Indonesia—menem-  
pati posisi strategis. Lembaga pendidikan tinggi bertanggung  
jawab tidak hanya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan,  
tetapi juga terhadap pembentukan karakter bangsa. Meng-  
ingat peran mahasiswa sebagai intelektual muda yang akan  
menjadi pemimpin di berbagai sektor masyarakat, peng-  
integrasian konsep bela negara menjadi landasan utama dalam  
membangun keberlanjutan dan keberdayaan bangsa. Pen-  
didikan bela negara menjadi aspek yang sangat esensial dalam  
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan karakter, sesuai dengan ketentuan konstitu-  
sional, memiliki dasar yang kokoh. Pembukaan UUD 1945  
dan Pancasila memberikan fondasi yang mendasar, teguh, dan  
menyeluruh. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
Nasional tahun 2005-2025 (UU RI No. 17 Tahun 2007), misi  
utama pembangunan nasional adalah mewujudkan karakter  
bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan ber-  
moral berlandaskan Pancasila. Karakter ini dicirikan oleh  
sifat dan perilaku manusia yang beriman, dan taqwa kepada  
Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga diharapkan punya moral-  
itas tinggi, toleransi, semangat gotong royong, jiwa patriotik,  
berkembang secara dinamis, dan berorientasi pada ilmu peng-  
etahuan dan teknologi<sup>2</sup>.

Perguruan tinggi bukan hanya menjadi tempat penyeleng-  
garaan pendidikan tinggi, tetapi juga lembaga strategis yang  
memiliki peran sentral dalam membentuk arah dan tujuan

---

<sup>2</sup> Aniek Irawatie, Iswahyuni, Tsabdany Tzarauliarany Anagusti, dan  
Hesty Fazar Afriani, “Analisis Konten Pembelajaran Mata Kuliah Wajib  
Universitas Berbasis Karakter Bela Negara,” *Jurnal IKRA-ITTH Humaniora*,  
vol. 5, no. 1, Maret 2021.

pembangunan nasional. Lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada penyampaian materi akademis, namun juga mencakup pembentukan karakter, nilai-nilai kebangsaan, dan sikap tanggung jawab sosial.

Pada satu sisi, perguruan tinggi merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sisi lainnya—perlu juga digarisbawahi—sama sekali tidak bisa diabaikan bahwa pembentukan karakter bangsa memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Integrasi antara pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter melalui nilai-nilai kebangsaan menjadi kunci dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan dan keberdayaan bangsa.

Mahasiswa memiliki peran kunci sebagai agen perubahan dan pemimpin masa depan. Mereka akan menjadi tokoh-tokoh yang berperan di berbagai sektor: ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, pembentukan karakter mahasiswa tidak hanya berdampak pada individu itu sendiri, tetapi juga pada arah dan masa depan pembangunan bangsa.

Dalam kaitan hal tersebut di atas, penting mengintegrasikan konsep bela negara dalam konteks pendidikan tinggi. Bela negara bukan sekadar slogan, melainkan sebuah konsep yang mencakup rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab terhadap pembangunan nasional. Dengan mengintegrasikan konsep ini, perguruan tinggi bertanggung jawab membentuk karakter mahasiswa. Karakter yang memiliki kepekaan terhadap realitas kebangsaan dan menjadi pilar-pilar kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Pendidikan bela negara di perguruan tinggi dapat dilaksanakan sebagai mata kuliah tersendiri maupun menginteg-

rasikan nilai-nilai bela negara kedalam mata kuliah. Selain itu, juga dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan penerapan konsep bela negara. Misalnya, dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan kepemimpinan, pelatihan pertahanan sipil, atau partisipasi dalam program-program kewirausahaan terkait keamanan.

Hal penting lainnya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan nasional, pertahanan, dan strategi keamanan. Mahasiswa dapat terlibat dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu keamanan.

Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait, guna memberikan mahasiswa pengalaman praktis dan pemahaman yang lebih nyata terkait dengan isu-isu bela negara dan keamanan nasional. Dengan menerapkan konsep bela negara dalam pendidikan tinggi, diharapkan mahasiswa tidak hanya memiliki keahlian akademis, tetapi juga kesadaran dan komitmen untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

## **5.2. Tanggung Jawab terhadap Pembentukan Karakter Bangsa**

Pembentukan karakter bangsa melalui lembaga pendidikan tinggi, tidak hanya berupa pencapaian tujuan akademis, melainkan juga penguatan nilai-nilai kebangsaan. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melibatkan mahasiswa dalam pemahaman akan sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan memahami akar sejarah dan budaya, mahasiswa dapat menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang melekat dalam identitas mereka. Proses pembelajarannya tidak hanya terbatas

pada ruang kelas, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan kegiatan lain. kegiatan yang menumbuhkan kesadaran identitas nasional. Ini sekaligus menciptakan pengalaman belajar secara holistik di luar kurikulum formal.

Pendidikan tinggi berperan dalam membentuk kesadaran identitas nasional mahasiswa. Dengan demikian mahasiswa dapat mengenali peran mereka dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sebagai bagian dari satu bangsa.

Pada gilirannya pendidikan berbasis kesadaran nilai kebangsaan diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan komitmen mahasiswa terhadap pencapaian prestasi akademis. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual tetapi juga menjadi individu yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negara.

Kegiatan ekstrakurikuler, organisasi mahasiswa, dan kegiatan pemberdayaan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam tindakan nyata. Dengan terlibat aktif dalam kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Perguruan tinggi, melalui berbagai pendekatan dan kegiatan, tidak hanya menjadikan mahasiswa unggul secara akademis tetapi juga bertanggung jawab terhadap identitas dan karakter kebangsaan. Dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik, perguruan tinggi memastikan bahwa mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan, menjadikan mereka agen perubahan yang terinformasi dan berkomitmen terhadap keberlanjutan dan kemajuan bangsa.

### **5.3. Peran Mahasiswa sebagai Intelektual Muda**

Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan, pemimpin di berbagai sektor masyarakat. Keberhasilan suatu bangsa di masa depan sangat tergantung pada bagaimana mahasiswanya menjalani peran mereka—membangun dan mengisi peran di masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu mengarahkan mahasiswanya untuk mencapai keunggulan akademis sekaligus menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan. Hal itu menjadi fondasi kemajuan dan keberlanjutan negara.

Mahasiswa sebagai intelektual muda memiliki energi, semangat, dan pandangan yang inovatif. Keberhasilan suatu bangsa secara signifikan tergantung pada bagaimana mahasiswa mengembangkan dan menerapkan potensi kepemimpinan mereka di berbagai sektor masyarakat.

Mahasiswa bukan hanya sekadar penerima informasi di ruang kelas, tetapi juga aktor yang aktif dalam membangun dan mengisi peran di masyarakat. Dengan keterampilan akademis dan pengetahuan yang dimiliki, mereka memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam isu-isu yang memengaruhi masyarakat, seperti pembangunan, keberlanjutan, dan pemberdayaan sosial. Mahasiswa, sebagai individu, juga menjalani proses perkembangan karakter. Lembaga pendidikan tinggi memberikan perhatian khusus pada pengembangan karakter mahasiswanya, termasuk nilai-nilai tanggung jawab, kepemimpinan, kreativitas, dan semangat kebangsaan.

Dengan potensi intelektualnya, mahasiswa memiliki kapasitas untuk menjadi pencipta solusi inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Perguruan tinggi harus mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan menghasilkan solusi yang memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar.

Mahasiswa, jika dibimbing dengan baik, dapat berperan penting dalam menciptakan keberlanjutan dan kemajuan negara. Mereka membawa energi segar, pemikiran baru, dan semangat perubahan yang diperlukan untuk memandu bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk membimbing mahasiswa agar dapat memahami dan menginternalisasi identitas kebangsaan. Hal ini mencakup rasa cinta tanah air, penghargaan terhadap keragaman budaya, dan kesiapan untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Dengan memahami peran mahasiswa, perguruan tinggi dapat membentuk lingkungan pendidikan yang memberdayakan mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan, mendorong inovasi, dan berperan aktif dalam memajukan masyarakat dan negara.

#### **5.4. Pengintegrasian Konsep Bela Negara**

Pengintegrasian konsep bela negara menjadi landasan utama dalam membangun keberlanjutan dan keberdayaan bangsa melalui pendidikan tinggi. Konsep ini bukan hanya sebagai wacana retorika. Suatu pendekatan holistik yang mencakup sikap patriotisme, semangat pengabdian, dan tanggung jawab terhadap kepentingan nasional. Pengintegrasian konsep bela negara ke dalam kurikulum pendidikan tinggi menjadikan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral.

Bagaimana pengintegrasian konsep bela negara sebagai landasan utama dalam pendidikan tinggi? Dalam perjalanan pembentukan karakter mahasiswa, konsep bela negara bukan hanya dipandang sebagai satu-satunya pembicaraan yang

se-remonial. Sebaliknya, dipahami sebagai fondasi utama yang diperlukan untuk membangun keberlanjutan dan keberdayaan bangsa melalui pendidikan tinggi.

Pertama, konsep bela negara diakui sebagai dasar utama untuk keberlanjutan bangsa. Perguruan tinggi menganggapnya sebagai fondasi yang tidak hanya berkaitan dengan kemajuan ekonomi atau teknologi, tetapi juga menyangkut ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, patriotik, dan bertanggung jawab. Dengan memahami hal ini, perguruan tinggi berkomitmen untuk membentuk mahasiswa menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif untuk keberlanjutan bangsa.

Kemudian, nilai-nilai bela negara—patriotisme, semangat pengabdian, tanggung jawab terhadap kepentingan nasional—sebagai elemen integral dalam membentuk generasi muda. Generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan moral dan sosial, tetapi juga mampu menjaga identitas nasional yang kuat.

Integrasi konsep bela negara melalui kurikulum pendidikan tinggi menempatkan konsep ini ke dalam konteks yang lebih luas. Mata kuliah yang membahas bela negara diintegrasikan ke dalam struktur kurikulum yang menyeluruh, memberikan pemahaman mendalam pada mahasiswa tentang pentingnya konsep ini dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Selain itu, praktik pendidikan tinggi tidak hanya terbatas pada kegiatan akademis. Mahasiswa didorong untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, pengabdian masyarakat, dan praktik lapangan. Ini bertujuan untuk membentuk karakter dan nilai-nilai Bela Negara pada mahasiswa secara langsung, memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik.

Pentingnya pengalaman praktis juga ditekankan, tidak hanya membatasi mahasiswa pada pemahaman teoretis semata. Mahasiswa diajak untuk terlibat dalam proyek-proyek yang menekankan pengabdian pada masyarakat atau kegiatan lain yang memperkuat rasa cinta tanah air. Hal ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan dan sikap yang relevan dengan pembentukan karakter yang diinginkan.

Lebih dari sekadar respons terhadap perkembangan global dan lokal, konsep bela negara dijadikan dasar utama sebagai tanggapan terhadap tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh bangsa. Pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap menghadapi tantangan tersebut, tetapi juga memahami bahwa keberlanjutan bangsa harus menjadi fokus utama dalam setiap tindakan dan keputusan mereka.

Terakhir, melalui integrasi konsep bela negara, pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam pemupukan dan penguatan identitas nasional. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki rasa kebangsaan yang kuat, tetapi juga mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep bela negara sebagai landasan utama, pendidikan tinggi berusaha menciptakan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan patriotisme yang kuat, sesuai dengan visi keberlanjutan dan keberdayaan bangsa.

## **5.5. Tantangan Global dan Peran Perguruan Tinggi**

Tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan konflik bersenjata mengharuskan perguruan tinggi

tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat dan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam era globalisasi ini, mahasiswa perlu dilatih untuk menjadi individu yang berpandangan luas, namun tetap memiliki identitas dan rasa cinta terhadap tanah air.

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, peran perguruan tinggi tidak lagi hanya terbatas pada penyampaian pengetahuan akademis, tetapi juga memainkan peran sentral dalam membentuk karakter dan semangat kebangsaan mahasiswa. Perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan konflik bersenjata menjadi tantangan kritis yang membutuhkan respons holistik, dan perguruan tinggi dihadapkan pada tanggung jawab untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi dunia yang terus berubah.

Dalam konteks tantangan global seperti perubahan iklim, perguruan tinggi diharapkan mampu melibatkan mahasiswa dalam pemahaman mendalam tentang dampak perubahan iklim serta memberikan solusi yang inovatif. Pendidikan tinggi membentuk mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan, siap berkontribusi dalam upaya mitigasi, dan memiliki pemahaman yang luas terhadap isu-isu global.

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi menjadi tantangan serius lainnya yang perlu dihadapi oleh mahasiswa dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengajarkan konsep-konsep keadilan sosial, merangsang pemikiran kritis terhadap ketidaksetaraan, dan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam upaya mengurangi kesenjangan tersebut.

Konflik bersenjata, baik di tingkat lokal maupun global, menunjukkan perlunya perguruan tinggi menjadi pusat untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi. Mahasiswa perlu diberdayakan untuk menjadi agen perubahan yang memahami

dampak negatif konflik bersenjata dan bekerja menuju solusi yang berkelanjutan.

Dalam era globalisasi ini, perguruan tinggi juga dihadapkan pada tugas untuk melatih mahasiswa menjadi individu yang berpandangan luas. Mahasiswa perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dinamika global, termasuk kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren global lainnya. Pendidikan tinggi harus menciptakan atmosfer yang merangsang pertukaran ide dan pandangan yang beragam, menjadikan mahasiswa yang beroperasi dalam konteks global dengan baik.

Di tengah pandangan yang luas terhadap dunia, peran perguruan tinggi juga menggarisbawahi pentingnya mempertahankan identitas dan rasa cinta tanah air. Mahasiswa perlu diberdayakan untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal, sekaligus mampu berkontribusi secara positif pada tingkat nasional. Perguruan tinggi harus menciptakan lingkungan yang memupuk semangat kebangsaan, bukan untuk membatasi pandangan, tetapi untuk memberikan fondasi kuat bagi mahasiswa agar dapat berperan sebagai warga global yang produktif dan bertanggung jawab.

Perpaduan fokus aspek akademis, pembentukan karakter yang kuat, dan semangat kebangsaan yang tinggi, perguruan tinggi dapat memainkan peran kunci dalam membekali mahasiswa untuk menghadapi tantangan global—tanggap terhadap perubahan.

## **5.6. Universitas dapat Membentuk Pusat Kajian Bela Negara yang Dinamis**

Agar dapat mengupdate sekaligus memperdalam substansi telaah dalam bela negara, maka universitas dapat secara aktif membentuk sebuah pusat kajian (Puska) yang spesifik, dengan mempertimbangkan beberapa faktor strategis sebagai berikut:

1. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban sosial, terutama di kalangan pemuda. Akibat dari itu, adanya kekhawatiran lunturnya rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan akibat terdapatnya kasus intoleransi, international effect of lifestyle and global market, terrorism, dinamika regionalism serta berbagai pengaruh global lainnya. Terbukanya komunikasi internasional dan penggunaan digitalisasi massif dan tidak bertanggung jawab memang perlu diwaspadai.
2. Lansekap Indonesia sebagai negara maritim kepulauan, menjadikan keterpenuhan transportasi dan komunikasi menjadi tantangan besar serta ancaman disintegrasi. Koonsep bela negara perlu dirumuskan dalam cara-cara lebih partisipatoris, agar integrasi wilayah tetap terjaga.
3. Gugus kepulauan yang tersebar luas dengan komposisi penduduk yang tidak seimbang, sehingga menjadi penting membangun konsep bela negara dalam perspektif non-tradisional. Cara-cara sosial membangun kerjasama antar warga menjadi kata kunci bela negara yang sejati.
4. Pelayanan yang setara dan merata serta penegakan hukum yang adil menjadi kunci keberhasilan dalam dimensi bela negara. Aspek pendidikan menjadi sangat

strategis untuk memulai perjalanan dalam bela negara. Pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang bela negara menjadi landasan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung upaya negara dalam pertahanan dan keamanan. Pendidikan akan menanamkan rasa cinta terhadap bangsa, tanah air beserta upaya untuk merawatnya.

5. Sivitas akademika perguruan tinggi adalah komponen yang sangat strategis untuk memulai langkah bela negara yang sejati. Pencarian penelitian yang kemudian diabdikan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat serta mengangkatnya menjadi materi pemebajaran yang transformatif. Mahasiswa perlu memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga ketertiban sosial dalam kerangka bela negara.
6. Setiap lini perkembangan suatu bangsa dan negara akan membawa perubahan yang berujung pada transformasi dan perubahan. Bela Negara akan menegaskan bahwa perubahan tersebut akan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemajuan bangsa negara tanpa terjadi gejolak sosial maupun perpecahan di dalam masyarakat.

### **5.7. Beberapa Arena Strategis Pusat Kajian Bela Negara di Perguruan Tinggi**

Dalam upaya membangun kerangka strategis yang akan dihadapi oleh pusat kajian bela negara, ada beberapa hal yang akan menjadi tema kajian yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pusat kajian bela negara harus sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi serta penjabaran

ditarik ke dalam Tridharma. Adapun dalam jangka panjang yang harus dikerjakan Pusat kajian bela negara adalah:

1. Membangun dan menjabarkan visi misi universitas dan diterjemahkannya dalam dimensi faktual bela negara, sesuai dengan perkembangan geopolitik negara dan perkembangan keilmuan. Selanjutnya diturunkan menjadi tema-tema pokok dalam penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pembelajaran pokok kurikulum.
2. Melakukan serangkaian seminar, diskusi ahli, debat publik berkenaan dengan bentuk-bentuk bela negara yang tepat dan signifikan dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan serta geopolitik di Indonesia serta keperluan turunannya yang strategis.
3. Membuat analisis dan trajektori atas perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) negara.
4. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap status keamanan partisipatif kewilayahannya serta mempublikasikan dan memberikan rekomendasi strategis pada pimpinan wilayah dan pimpinan nasional.
5. Melakukan studi-studi kasus terpilih berdasarkan trajektori maupun permintaan para pihak yang sejalan dengan visi dan misi universitas. Studi kontemporer bela negara dapat dilakukan dan dirancang untuk mengantisipasi even-even tertentu yang bersifat strategis, baik dalam skala nasional, regional maupun lokal.
6. Melakukan ToT bela negara sehingga menjadi *pull of expert* bela negara yang dapat digunakan untuk mereview dan merivisi bahan ajar maupun membuat konten-konten pendidikan publik populer.

7. Melakukan kerja sama dengan lembaga dan institusi negara dan publik, yang memerlukan pengkayaan materi-materi bela negara, berbagi pengalaman, pertukaran tenaga dosen dan pengajar serta kurikulum pelatihan bela negara.
8. Menyelenggarakan pelatihan bela negara untuk kelompok-kelompok strategis dalam Masyarakat maupun organisasi profesi.
9. Memfasilitasi penelitian dan kajian terkait tema-tema bela negara. Pusat kajian bela negara dapat menginisiasi, mendukung dan memfasilitasi penelitian yang relevan dengan isu-isu bela negara. Penelitian yang mencakup analisis tentang potensi ancaman, kebijakan keamanan, serta strategi keamanan yang melibatkan warga.
10. Pelatihan dan pengembangan keterampilan mahasiswa. Pusat kajian bela negara dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus tentang bela negara untuk mahasiswa. Mencakup pelatihan kepemimpinan, latihan simulasi, dan pengenalan pada aspek praktis keamanan nasional, terutama bila menghadapi bencana sosial maupun bencana alam.
11. Melakukan kerja sama dan kolaborasi strategis dengan pihak eksternal. Universitas dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, lembaga *think tank*, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki minat dalam isu-isu bela negara. Hal ini dapat memperluas jaringan pengetahuan dan memungkinkan universitas untuk berperan lebih aktif dalam diskusi publik tentang bela negara.

12. Kampanye pendidikan publik untuk bela negara. Pusat kajian bela negara dapat melibatkan diri dalam kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bela negara. Khususnya bila negara berada dalam kondisi darurat sosial. Hal itu dapat mencakup penyediaan informasi melalui media sosial, penyelenggaraan seminar terbuka, atau kampanye penyuluhan.
13. Mengusulkan dan memberikan *award* (penghargaan) terhadap personal dan tokoh masyarakat, kelompok warga maupun organisasi yang memiliki karya konkret dalam perspektif bela negara, yang dapat menjadi benefit pada warga lokal di sekitarnya. Langkah ini untuk menebarkan benih bela negara secara konkret di berbagai daerah.

Dengan implementasi langkah-langkah di atas, tujuan pembentukan pusat kajian bela negara untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang bela negara. Mahasiswa nantinya ketika keluar dari universitas memiliki pengetahuan tentang peran mereka dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga memberikan kontribusi positif pada visi universitas sebagai lembaga pendidikan berwawasan kebangsaan dan berkomitmen untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

### **5.8. Relevansi Perguruan Tinggi Membangun Pusat Kajian Bela Negara**

Perguruan tinggi dengan visinya dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pendalaman pada konsep keamanan non-tradisional dan memberikan konteks atas perkem-

bangun politik kenegaraan. Keterkaitan antara keamanan non-tradisional dan konsep bela negara serta hubungannya dengan visi perguruan tinggi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap keamanan: sebagai lembaga pendidikan tinggi, kampus memainkan peran penting dalam menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Misalnya, pemimpin yang mampu menjawab tantangan keamanan non-tradisional. Pusat kajian bela negara dapat melatih mahasiswa untuk memahami dan menghadapi ancaman seperti terorisme, kejahatan siber, bencana alam, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan keamanan.
2. Aktualisasi konsep keamanan tradisional dan non-tradisional. Konsep bela negara tidak hanya melibatkan keamanan fisik tradisional, tetapi juga melibatkan aspek-aspek keamanan non-tradisional. Pusat kajian bela negara dapat berperan sebagai jembatan antara pemahaman tentang keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional (seperti keamanan siber, kesehatan, lingkungan, pengembangan wilayah).
3. Mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dalam lini perkembangan visi kontemporer. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang bela negara, sivitas akademika dapat lebih memahami dan mengaktualisasikan fungsi profesional dalam bingkai dan kontur kebangsaan. Sehingga identitas keindonesiaan tetap melekat dalam perkembangan zaman dan tetap bertanggung jawab sebagai warga negara, dan pentingnya menjaga keamanan serta integritas wilayah negara.
- Sumber daya manusia unggul. Dalam konteks visi perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berperilaku baik, pemahaman tentang bela negara adalah penting. Maha-

siswa yang dilatih melalui pusat kajian bela negara akan menjadi lulusan yang lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada keamanan dan kedaulatan negara.

5. Mampu menyambut perubahan cepat. Keamanan non-tradisional seringkali berkaitan dengan perubahan cepat dalam lingkungan global dan nasional. Universitas berkomitmen untuk menghadapi tantangan jaman yang berkembang sangat cepat, disertai pemahaman yang memadai tentang dinamika tersebut. Pusat kajian bela negara dapat menjadi pusat pengetahuan yang relevan dalam merespons setiap perubahan.

## **5.9. Manfaat dan Dampak Pusat Kajian Bela Negara untuk Universitas**

Dengan dibentuknya sebuah pusat kajian bela negara di Universitas maka dapat diharapkan memberikan berbagai manfaat dan dampak positif, baik bagi universitas maupun bagi masyarakat umum. Berikut beberapa manfaat dan dampak yang dapat diperoleh dari pembentukan pusat kajian bela negara:

- Mengangkat profil universitas. Pusat kajian bela negara dapat membantu mengangkat profil universitas sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen pada pengembangan pemahaman dan penelitian tentang bela negara. Ini dapat meningkatkan citra universitas di mata masyarakat.
- Pengembangan keahlian dan peningkatan akademik spesifik keamanan. Ini dapat menjadi keunggulan dalam studi bela negara, menarik peneliti dan akademisi yang berminat di bidang ini. Selain itu, dapat memberi-

kan kesempatan untuk mengembangkan program akademik dan kursus-kursus yang relevan.

- Peluang kolaborasi. Pusat kajian bela negara dapat menjadi platform kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, kepolisian, dan organisasi terkait bela negara. Ini membuka pintu untuk berbagai peluang kerja sama dalam penelitian, pelatihan, dan proyek-proyek bersama.
- Penelitian dan publikasi. Ini dapat mendukung penelitian dalam bidang bela negara, yang dapat menghasilkan publikasi ilmiah yang bergengsi dan mendukung reputasi universitas dalam dunia penelitian.
- Pendidikan mahasiswa. Mahasiswa akan mendapatkan akses ke pengetahuan dan pengalaman yang lebih mendalam tentang bela negara melalui program-program yang diselenggarakan oleh pusat kajian. Ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh universitas.

## **5.10. Manfaat untuk Mahasiswa**

Pusat kajian bela negara di Universitas dapat memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh mahasiswa melalui keberadaan pusat kajian bela negara:

- Pemahaman yang komprehensif dan kontemporer bagi mahasiswa yang akan selalu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep bela negara, peran mereka sebagai warga negara dalam menjaga kedaulatan, dan pentingnya keamanan pengembangan keterampilan dan kreativitas

kepemimpinan. Pusat kajian dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti seminar, workshop, dan pelatihan, yang dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan kepemimpinan, analisis kebijakan, dan pemecahan masalah.

- Peluang praktik kebangsaan dan kontribusi pada riset. Mahasiswa yang tertarik dalam penelitian dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek penelitian kebangsaan yang dilakukan oleh pusat kajian bela negara. Ini memberi mereka pengalaman penelitian yang berharga dan meningkatkan kualitas akademis mereka. Selain itu dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang metode penelitian dan topik terkait bela negara.
- Kolaborasi dan jaringan. Melalui pusat kajian, mahasiswa dapat membangun jaringan dengan sesama mahasiswa, akademisi, dan praktisi di bidang bela negara. Ini dapat membuka peluang untuk kerja sama dalam proyek-proyek atau penelitian bersama.
- Peluang magang. Pusat kajian dapat membantu mahasiswa menemukan peluang magang atau kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait bela negara, seperti pemerintah, militer, atau organisasi non-pemerintah yang berfokus pada keamanan nasional.
- Peningkatan kualifikasi. Mahasiswa yang aktif terlibat dalam kegiatan pusat kajian bela negara dapat memperoleh sertifikat atau penghargaan yang dapat meningkatkan kualifikasi mereka dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan studi.
- Pendidikan karakter. Aktivitas yang terkait dengan bela negara, seperti disiplin, tanggung jawab, dan patriot-

isme, dapat membantu dalam pembentukan karakter mahasiswa dan menjadi warga negara yang baik.

- Pengalaman praktis. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis yang berkaitan dengan bela negara, seperti berpartisipasi dalam pelatihan keamanan atau bantuan kemanusiaan dalam konteks pertahanan nasional.

### **5.11. Dampak pada Masyarakat dan Negara**

- Peningkatan kesadaran bela negara. Pusat kajian bela negara berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bela negara. Ini dapat meningkatkan kesadaran warga negara tentang kewajiban untuk melindungi kedaulatan negara.
- Kontribusi pada kebijakan publik. Hasil penelitian dan pemikiran yang dihasilkan oleh pusat kajian dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam perumusan kebijakan publik terkait bela negara dan pertahanan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pusat kajian dapat berkontribusi pada pembentukan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berkomitmen pada bidang keamanan dan pertahanan.
- Peningkatan keamanan nasional. Melalui penelitian, pelatihan, dan pemikiran yang lebih baik tentang bela negara, pusat kajian dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan nasional dan ketahanan negara.
- Peningkatan daya saing bangsa. Dengan membekali warga negara dengan pemahaman yang lebih baik ten-

tang bela negara, universitas dapat membantu meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan internasional.

Penerapan konsep bela negara di perguruan tinggi tidak hanya bertujuan mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga lulusan yang memiliki tanggung jawab sosial dan kesiapan menghadapi berbagai ancaman terhadap keberlanjutan bangsa. Implementasi bela negara di perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan mahasiswa yang memiliki semangat kebangsaan, profesionalisme, dan integritas. Tujuan utama bukan hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter yang kokoh dan siap bertanggung jawab terhadap kepentingan nasional.

Konsep bela negara di perguruan tinggi memiliki sasaran untuk menciptakan mahasiswa yang tidak hanya terampil dalam bidang akademis, tetapi juga memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Mereka diarahkan untuk mengembangkan rasa memiliki terhadap tanah air, menjadikan kepentingan nasional sebagai prioritas, dan siap berkontribusi dalam upaya memajukan bangsa.

Sasaran implementasi bela negara juga melibatkan pembentukan mahasiswa yang profesional dan berintegritas. Perguruan tinggi bertujuan menciptakan lulusan yang memahami nilai-nilai profesionalisme, mencakup etika kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi mereka dalam masyarakat. Mahasiswa yang dilatih dengan konsep bela negara diharapkan dapat membawa dampak positif pada aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian masalah sosial dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Lebih jauh, implementasi bela negara di perguruan tinggi dapat memberikan manfaat dalam membangun karakter kepemimpinan. Mahasiswa tidak hanya diajarkan untuk menjadi pengikut yang cerdas, tetapi juga diberdayakan untuk

menjadi pemimpin beretika, bijaksana, dan peduli terhadap kepentingan bersama.

Secara keseluruhan, sasaran dan manfaat implementasi bela negara di perguruan tinggi menciptakan landasan untuk mencetak lulusan yang unggul secara akademis, memiliki kepedulian sosial, semangat kebangsaan, profesionalisme, dan berintegritas. Dengan cara ini, perguruan tinggi berkontribusi tidak hanya pada perkembangan individu mahasiswa, tetapi juga pada pembangunan dan keberlanjutan bangsa secara keseluruhan.

Perluasan dan implementasi konsep bela negara di perguruan tinggi tidak hanya berbicara tentang retorika kosong; sebaliknya, keberhasilannya perlu diukur dan dievaluasi melalui standar tertentu. Standar evaluasi ini memberikan panduan bagi perguruan tinggi untuk memastikan bahwa konsep tersebut tidak hanya menjadi topik diskusi, tetapi juga menjadi kenyataan yang memberikan dampak nyata pada perkembangan mahasiswa dan kontribusi perguruan tinggi pada kepentingan nasional.

Evaluasi ini dimulai dengan mengukur sejauh mana konsep bela negara diintegrasikan ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Evaluasi ini tidak hanya mengevaluasi pengajaran teori bela negara, tetapi juga melibatkan penerapan praktis dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsep tersebut tidak hanya tinggal di dalam kelas, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata mahasiswa.

Standar evaluasi juga memerhatikan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan yang mencerminkan semangat kebangsaan. Ini mencakup keterlibatan dalam kegiatan upacara bendera, kegiatan sosial, dan inisiatif yang mendukung kepentingan nasional. Evaluasi tersebut juga mempertimbangkan pengaruh

konsep bela negara terhadap perkembangan sikap, nilai, dan tindakan mahasiswa.

Pentingnya nilai-nilai moral dan karakter juga ditekankan dalam standar evaluasi. Evaluasi mencakup penilaian terhadap perkembangan integritas, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Hal ini memberikan gambaran tentang sejauh mana konsep bela negara berhasil membentuk karakter mahasiswa.

Lebih dari itu, evaluasi juga memonitor perubahan dan penyesuaian yang diperlukan dalam penerapan konsep bela negara. Hal ini membantu perguruan tinggi untuk tetap responsif terhadap tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi, memastikan bahwa konsep tersebut tetap relevan dalam konteks pendidikan tinggi.

Standar evaluasi memberikan kerangka kerja yang mendukung akuntabilitas perguruan tinggi. Evaluasi yang sistematis membantu menciptakan transparansi, memungkinkan pihak eksternal untuk menilai sejauh mana perguruan tinggi benar-benar berkontribusi pada pembentukan karakter dan semangat kebangsaan mahasiswa.

Terakhir, evaluasi membantu mengukur keterlibatan perguruan tinggi dalam kepentingan nasional. Evaluasi mencakup kolaborasi dengan pihak eksternal, partisipasi dalam proyek-proyek strategis, dan kontribusi nyata terhadap tingkat nasional. Ini menciptakan pemantauan jangka panjang terhadap pencapaian tujuan nasional yang terkait dengan konsep bela negara.

Dengan adanya standar evaluasi, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa implementasi konsep bela negara bukan hanya wacana, tetapi sebuah upaya nyata dalam membentuk

generasi mahasiswa yang cerdas dan bertanggung jawab serta memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.

Standar evaluasi keberhasilan bela negara di perguruan tinggi diperlukan sebagai panduan untuk menilai sejauh mana hal ini telah diintegrasikan dan berhasil diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan tinggi. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan komitmen perguruan tinggi dalam membentuk karakter, semangat kebangsaan, dan kesadaran sosial mahasiswa. Berikut adalah beberapa standar evaluasi yang dapat dijadikan acuan.

1. Perguruan tinggi diharapkan mengintegrasikan konsep bela negara dalam kurikulumnya secara menyeluruh. Standar evaluasi dapat mencakup sejauh mana mata kuliah terkait bela negara telah diperkenalkan dan diimplementasikan di berbagai program studi.
2. Evaluasi mencakup penilaian terhadap praktik pendidikan tinggi yang mendukung konsep bela negara. Hal ini melibatkan peninjauan terhadap kegiatan ekstrakurikuler, program pengabdian masyarakat, dan proyek-proyek khusus yang melibatkan mahasiswa dalam konteks pengembangan nilai-nilai bela negara.
3. Keberhasilan bela negara dapat diukur melalui tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan yang menunjukkan semangat kebangsaan, seperti upacara bendera, kegiatan sosial, atau kegiatan yang mendukung kepentingan nasional.
4. Pengembangan sikap dan karakter. Evaluasi harus mencakup perkembangan sikap dan karakter mahasiswa sebagai hasil dari penerapan konsep bela negara. Standar ini dapat mencakup nilai-nilai seperti patriot-

isme, semangat pengabdian, dan tanggung jawab terhadap kepentingan nasional.

5. Standar evaluasi juga dapat melibatkan analisis dampak konsep bela negara terhadap pemikiran dan tindakan mahasiswa. Ini dapat mencakup penilaian terhadap keputusan dan tindakan mahasiswa dalam konteks nilai-nilai bela negara.
6. Evaluasi tidak hanya fokus pada pencapaian jangka pendek, melainkan juga melibatkan pemantauan dampak jangka panjang dari penerapan konsep bela negara. Hal ini mencakup kontribusi mahasiswa sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab.
7. Standar evaluasi dapat mencakup sejauh mana perguruan tinggi memberdayakan mahasiswa untuk aktif berkontribusi pada pembangunan nasional. Ini melibatkan pengembangan keterampilan kepemimpinan, kewirausahaan, dan partisipasi dalam inisiatif sosial yang mendukung kepentingan nasional.
8. Evaluasi dapat memperhitungkan sejauh mana perguruan tinggi terlibat dengan pihak eksternal, termasuk kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, atau instansi lain yang mendukung konsep bela negara.

Dengan mengacu pada standar-standar evaluasi ini, perguruan tinggi dapat secara sistematis mengevaluasi keberhasilan implementasi konsep bela negara dan melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi yang holistik dan berkelanjutan dapat membantu menjaga kualitas dan relevansi konsep bela negara dalam konteks pendidikan tinggi.

## **5.12. Bela Negara dan Pengembangan Kurikulum**

Berpikir kritis dan analitis adalah dua keterampilan kognitif yang penting dan sering kali saling terkait. Meskipun memiliki perbedaan, keduanya sering digunakan bersama-sama dalam konteks analisis informasi dan pengambilan keputusan. Berpikir kritis melibatkan penilaian dan evaluasi yang cermat terhadap informasi, argumen, atau situasi. Sementara itu, berpikir analitis melibatkan pemecahan informasi atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur dasarnya. Kedua keterampilan ini sering diperlukan saat seseorang membuat keputusan secara hati-hati. Berpikir analitis dapat memberikan dasar yang kokoh bagi berfikir kritis.

Dengan memahami struktur dan pola data atau informasi melalui berpikir analitis, seseorang memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi dan menilai informasi tersebut secara kritis. Seseorang mungkin mulai dengan berpikir analitis untuk memahami informasi secara mendalam. Setelah memahami komponen-komponen informasi dengan baik, berpikir kritis terlibat dalam mengevaluasi relevansi, keabsahan, dan implikasi dari informasi tersebut. Berpikir analitis melibatkan proses merinci informasi atau data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren. Berpikir analitis digunakan ketika seseorang mencari struktur mendasar dari informasi untuk memahami konteksnya. Sementara itu, berpikir kritis, mengedepankan penilaian terhadap keabsahan argumen, kualitas bukti, dan relevansi informasi. Berpikir kritis digunakan ketika seseorang menilai informasi terhadap standar kebenaran, keandalan, atau kepentingan.

Dalam praktiknya, berpikir analitis dapat membantu membangun dasar pemahaman yang kuat. Selanjutnya, berpikir

kritis terlibat dalam menilai dan menggunakan pemahaman tersebut untuk mengambil keputusan yang informasional dan logis. Dengan kata lain, berpikir analitis memberikan dasar untuk berpikir kritis, membantu mengidentifikasi apa yang perlu dinilai dan apa-apa saja yang relevan. Dalam konteks pengambilan keputusan dan analisis informasi, kedua keterampilan ini sering diterapkan bersama-sama. Oleh karenanya metode berfikir tersebut menjadi penting dalam konteks bela negara. Bela negara adalah konsep yang mendalam tentang cinta dan dedikasi terhadap negara—sering diterjemahkan sebagai “defending the nation.” Konsep ini berkaitan dengan rasa tanggung jawab setiap warga negara terhadap keberlanjutan dan keamanan negaranya. Terdapat isu yang disorot dalam bela negara yaitu persoalan nasionalisme, bentuk pengabdian, kesiapan menghadapi ancaman, pendidikan dan kesadaran, patriotisme dan solidaritas. Beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan metode berpikir kritis-analisis pada konteks keamanan non-tradisional antara *nation-state* dan *borderless* adalah:

- Apakah seorang Indonesia yang menjadi residen temporer di negara lain menjadi lebih memiliki nasionalisme dan/atau patriotisme lebih rendah?
- Apakah seorang yang bekerja di perusahaan asing memiliki nasionalisme dan/atau patriotisme lebih rendah?
- Apa yang menjadi ukuran bela negara?
- Bagaimana dengan yang tidak menjadi residen di negara lain atau tidak bekerja di perusahaan asing tetapi mereka simpatisan ekstremisme kekerasan dan kemudian melakukan tindakan terorisme? Terdapat juga ASN dan mahasiswa dalam negeri yang terlibat ini.
- Apa ukuran ancaman?

- Bagaimana dengan korupsi yang sudah merusak bangsa? Seseorang tidak menjadi residen di negara lain atau tidak bekerja di perusahaan asing dan tidak melakukan korupsi.

Penting untuk dicatat bahwa konsep bela negara dapat berbeda di tiap negara. Tiap negara memiliki cara dan program pendekatan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai nasional mereka. Pada esensinya, bela negara mencerminkan semangat kesetiaan, pengabdian, dan tanggung jawab setiap warga negara. Di Indonesia, bela negara adalah bagian penting dari kurikulum pendidikan nasional. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bela negara dan bersedia memberikan pengabdian kepada negara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya sebuah Universitas memiliki beberapa bidang keilmuan, seperti: hukum, teknik, ekonomi dan bisnis, ilmu ekonomi, psikologi, ilmu pendidikan, dan ilmu komputer.

Konsep bela negara yang dipaparkan dalam buku ini adalah untuk mempedomani pelaksanaan bela negara dalam konteks umum dan khusus, yang berhubungan dengan bidang keilmuan tersebut dan isu-isu kontemporer. Hal ini akan diemban oleh associate pusat kajian bela negara untuk mendampingi masing-masing fakultas. Associate internal akan memfokuskan pada bidang yang diemban fakultas tersebut sementara associate eksternal akan membantu konteks kontemporer. Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan komitmen warga negara Indonesia terhadap negara dan bangsa. Tujuan dan Manfaat pendidikan bela negara adalah:

1. Membangun kesadaran nasionalisme  
Pendidikan Bela Negara bertujuan untuk membangun rasa nasionalisme, kesetiaan terhadap Pancasila dan

UUD 1945, serta kesadaran akan pentingnya mempertahankan kedaulatan negara.

2. Meningkatkan kesiapsiagaan

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keberanian warga negara dalam menghadapi potensi ancaman terhadap negara.

Pendidikan bela negara di Indonesia diarahkan untuk mempersiapkan warga negara dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi secara positif terhadap bangsa dan negara. Masyarakat diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan dan keamanan negara.

### **5.13. Bela Negara dalam Pengembangan Ilmu dan Bidang Hukum**

Pada sektor hukum, konsep bela negara dapat mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memastikan kedaulatan hukum, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa poin tentang bela negara dalam konteks sektor hukum:

1. Penegakan hukum

Pendidikan bela negara dalam sektor hukum melibatkan upaya memastikan ketertiban hukum. Ini mencakup penegakan hukum yang adil, transparan, dan merata bagi semua warga negara.

2. Kepatuhan terhadap hukum

Bela negara dalam konteks hukum melibatkan penanaman kesadaran hukum dalam masyarakat. Warga negara didorong untuk memahami dan mematuhi hukum, serta menghormati hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku.

3. **Pemeliharaan kedaulatan hukum**  
Bela negara melibatkan perlindungan terhadap kedaulatan hukum negara. Ini termasuk melawan ancaman terhadap hukum dan peraturan yang mengancam integritas sistem hukum nasional.
4. **Pengembangan hukum nasional**  
Bela negara di sektor hukum juga melibatkan pengembangan dan peningkatan sistem hukum nasional. Ini mencakup reformasi hukum dan kebijakan, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan aksesibilitas sistem hukum.
5. **Perlindungan hak asasi manusia**  
Hukum bela negara juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pemerintah dan sistem hukum diberdayakan untuk melindungi hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional.
6. **Penanggulangan korupsi dan kejahatan**  
Bagian dari bela negara dalam sektor hukum melibatkan penanggulangan korupsi. Sistem hukum bertujuan untuk memerangi korupsi dan kejahatan lainnya yang dapat merongrong integritas dan keamanan negara.
7. **Kesadaran hukum masyarakat**  
Program bela negara di sektor hukum juga dapat mencakup pendidikan hukum bagi masyarakat. Ini membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, memungkinkan mereka untuk memahami hak-hak mereka dan berpartisipasi secara positif dalam sistem hukum.

8. Pemeliharaan kedaulatan maritim dan batas wilayah  
Di negara-negara dengan wilayah maritim yang luas, bela negara juga mencakup pemeliharaan kedaulatan maritim dan penegakan hukum di perbatasan negara.

#### **5.14. Bela Negara dalam Bidang Ilmu dan Bidang Teknik**

Dalam konteks sektor teknik, konsep bela negara mencakup berbagai upaya dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan guna mendukung pertahanan dan keamanan negara. Berikut adalah beberapa aspek tentang bela negara dalam sektor teknik:

1. Pengembangan teknologi ketahanan  
Upaya Bela Negara melibatkan penelitian dan pengembangan teknologi ketahanan, termasuk teknologi ketahanan energi, pangan dan lainnya.
2. Infrastruktur ketahanan  
Sistem infrastruktur ketahanan, seperti ketahanan komunitas, komunikasi di komunitas, sistem deteksi dini, dan lainnya.
3. Pendidikan dan pelatihan teknis  
Program pendidikan teknis dan kejuruan didorong untuk menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang teknik, terutama dalam konteks keamanan dan ketahanan.
4. Keamanan siber  
Meningkatkan kapabilitas keamanan siber untuk melindungi infrastruktur penting, data pemerintah, dan sistem komunikasi militer dari serangan cyber.

5. Penerapan teknologi canggih  
Penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), analisis big data, dan teknologi jaringan untuk meningkatkan pemahaman situasi dan mendukung pengambilan keputusan di bidang ketahanan.
6. Kerjasama dengan industri teknologi  
Kerja sama antara pemerintah dan industri teknologi untuk mengembangkan solusi pertahanan terkini, mengadopsi teknologi terbaru, dan meningkatkan kapabilitas pertahanan negara.
7. Keamanan energi dan sumber daya  
Mengembangkan teknologi terbarukan dan efisiensi energi untuk memastikan keberlanjutan energi yang kritis bagi infrastruktur pertahanan dan keamanan. Dukungan pusat penelitian ilmiah dan akademik untuk mengembangkan pengetahuan teknis yang relevan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Upaya bela negara dalam sektor teknik sangat penting karena kemajuan teknologi memiliki dampak besar terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam mengembangkan dan memperkuat kapabilitas teknologi negara guna melindungi kedaulatan dan keamanan negara dari berbagai ancaman.

### **5.15. Bela Negara dalam Ilmu dan Bidang Ekonomi dan Bisnis**

Upaya bela negara dalam bidang Ekonomi dan Bisnis, adalah membawa mahasiswa dan sivitas akademika mendalami ilmu ekonomi secara benar, jujur dan sah dan mempraktikkan semua ajaran ilmu tersebut tanpa manipulasi.

Misalnya dalam Ilmu ekonomi diajarkan soal keseimbangan pasar, karena adanya dinamika *supply and demand* yang bebas dari intervensi yang membuat distorsi pasar. Distorsi pasar dalam bentuk monopoli, monopsoni adalah perilaku ekonomi yang merusak mekanisme pasar. Misalnya pedagang besar melakukan monopoli dengan menimbun semua komoditas sehingga permintaan tinggi, harga meningkat dan ia mengeruk keuntungan dengan cara tidak wajar. Contoh yang lain, terjadi pada masa kolonial Belanda di Indonesia, di mana VOC melakukan politik tanam paksa pada masyarakat di Nusantara tanpa memperdulikan nasib dan keuntungan petani. Jadi, dalam ilmu ekonomi dan bisnis yang harus dilakukan adalah mengajarkan cara-cara berusaha, berdagang dan berbisnis secara terbuka, jujur, tidak melakukan kecurangan-kecurangan, tidak melakukan pemaksaan.

Dalam konteks bela negara, sivitas akademika dapat melakukan penelitian untuk dapat mencari cara-cara terbaru dalam perdagangan, pengembangan usaha—memproduksi, mendistribusikan dan mengakumulasi kekayaan—dengan cara yang baik, merata, adil dan makmur serta bertanggung jawab. Bingkai negara dalam perdagangan global adalah memberikan keuntungan dan kemajuan pada negara melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan dapat membawa kesejahteraan hidup bagi segenap warga negara. Cara-cara berproduksi yang sesuai dengan kapasitas dan keberlangsungan hidup yang tidak mengeksploitasi manusia. Kelestarian alam dan berkelanjutan adalah cara-cara produksi dalam perspektif bela negara—menyediakan ruang dan kondisi alam yang baik bagi generasi mendatang.

Undang-undang Dasar negara kita sudah menetapkan pada pasal 28 UUD 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebe-

sar-besarnya kepentingan rakyat”. UUD negara kita sudah sangat tegas menentukan arah bahwa negara kita adalah negara kesejahteraan, di mana rakyat sangat diutamakan untuk menjadi warga negara yang Sejahtera.

## **5.16. Bela Negara dalam Bidang Ilmu Komunikasi**

Dalam bidang ilmu komunikasi, bela negara dapat diwujudkan dengan memproduksi jalur, sistem komunikasi yang tidak terdistorsi, jujur dan mendidik. Produk komunikasi yang dapat menggugah rasa memiliki sebuah negara dengan argumentasi baru. Mencintai tanah, air dan sumber-sumber daya yang ada di dalamnya adalah bahan-bahan kajian komunikasi di masa mendatang. Kajian ilmu komunikasi yang makin dapat mempererat rasa persaudaraan dan kemanusiaan, makin menghargai sebagai sesama warga negara, serta dapat memupuk tali persahabatan internasional. Memproduksi berita, narasi maupun informasi yang edukatif, kreatif dan tidak menggunakan bahan-bahan sampah seperti pornografi, hoaks maupun bahan-bahan yang dapat memicu dsintegrasi bangsa.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dituntut dapat mengkomuniaksikan semua agenda pembangunan dengan baik dan *promotive*. Indonesia sangat membutuhkan pendekatan ilmu komunikasi yang dapat menarik perhatian warga dunia, tinggal bersama dan berinteraksi dengan berbagai suku dan sub kultur di Indonesia. Negara ini sangat kaya dan eksotik dalam ragam kebudayaan, bahasa serta budaya. Semua itu harus dibungkus dan dikomunikasikan secara aktif dan kreatif. Banyak konten-konten kebangsaan dan kebudayaan Indonesia yang dapat menjadi sumber pemasukan, baik dalam bentuk lagu, presentasi budaya, film maupun segudang informasi yang dapat menjadi komoditas baru yang dapat diciptakan dan dikreasikan.

Di satu sisi, negara ini juga sangat rentan terhadap perpecahan akibat kesalahan komunikasi yang saling meniadakan akibat keberagaman yang ada di Indonesia. Tantangan yang paling besar adalah bagaimana menciptakan kreasi baru yang dapat dikomunikasikan secara kreatif dan intensi serta dapat menggunakan kemajuan teknologi komunikasi yang makin berkembang dewasa ini.

### **5.17. Bela Negara dalam Ilmu dan Bidang Psikologi**

Bidang ilmu psikologi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konsep bela negara. Ilmu psikologi banyak membantu sektor keamanan negara dan juga berkontribusi bagi keamanan secara keseluruhan. Bagi personel kepolisian misalnya, kontribusi ilmu psikologi dapat dilihat pada fase rekrutmen anggota baru, peningkatan pendidikan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, memberikan nasihat psikologi pada evaluasi personel di lapangan. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk rekrutmen anggota TNI dan juga semua ASN. Secara partikular, ilmu psikologi dapat membantu proses pengambilan keputusan publik, baik di pemerintahan maupun di swasta.

Ilmu psikologi juga digunakan dalam program deradikalisasi, khususnya pada proses rekrutmen calon pegawai. Metode seleksi dipadukan dengan tindakan preemtif untuk memberikan pertimbangan psikologis bagi program deradikalisasi. Banyak pendekatan, modul dan tatacara perlakuan manusiawi yang dapat dipakai oleh instansi sosial untuk mengembalikan perilaku yang menyimpang dari warga negara.

Dalam situasi darurat, baik karena bencana alam maupun bencana sosial, ilmu psikologi dapat memberikan perspektif

bela negara, untuk dapat memberikan dukungan dalam pemulihan mental para korban. Lebih jauh, dapat mengembalikan rasa percaya diri bagi masyarakat yang terkena bencana.

### **5.18. Bela Negara dalam Bidang Ilmu Pendidikan**

Dimensi dan perspektif bela negara dalam ilmu pendidikan adalah hal yang sangat langsung dapat dilihat. Konten pendidikan yang mengandung pembelaan dan kebanggaan bernegara dapat segera dimasukkan pada setiap dimensi pembentukan kurikulum pendidikan. Pada ilmu pendidikan, hampir semua mata kuliah dan mata pelajaran secara kontekstual dapat memasukan unsur bela negara. Kegunaan dari mata kuliah dan mata pelajaran untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman warga negara pada semua dimensi keilmuan. memberikan peta jalan pembangunan negara berdasarkan sains and teknologi yang pada ujungnya dapat mengubah dan mengangkat peradaban bangsa.

Ilmu pendidikan juga akan mendorong aspek etika, ahlak dan prilaku anak didik. Penyusunan kurikulum demikian dapat membangun kesadaran baru tentang perbedaaan di antara anak didik—menghargai perbedaan dan saling tolong menolong. Selanjutnya terbangun cita rasa kebangsaaan yang dapat menjadi ciri dan identitas bangsa. Secara lebih makro, ilmu pendidikan juga dapat mempromosikan keanekaragaman hayati, budaya, kultur di Nusantara.

### **5.19. Bela Negara dalam Bidang Ilmu Komputer**

Ilmu komputer merupakan bidang ilmu baru yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi. Ilmu kom-

puter merupakan bagian tak terelakan dalam transformasi peradaban dunia yang membuat dunia seperti sebuah “desa”, di mana masing-masing penghuninya dapat berhubungan setiap saat, dapat bertukar apapun tanpa jeda. Perkembangan tersebut membuat dunia menjadi terkoneksi satu dengan lainnya, tanpa batas dan membuat arus barang dan jasa dapat berjalan tanpa hambatan.

Dalam konteks global tersebut, dimensi bela negara menjadi perlu diperjelas. Pertama, negara tetap menjadi entitas yang harus terus dibela, dibangun maupun dilindungi dari berbagai potensi ancaman dan gangguan. Ilmu komputer dapat berkontribusi terhadap proses tersebut melalui penguasaan berbagai teknik dan aplikasi yang dapat menguntungkan negara dan bangsa. Penguasaan komputer sebagai alat bantu manusia, sangat membantu dalam hal penyimpanan data penting, pengendalian instrumen-instrumen pengawasan negara, pengendalian drone, maupun pengawasan lalu lintas udara, darat dan laut. Ilmu komputer yang berbasis pada bela negara adalah pengembangan alat bantu untuk semua disiplin ilmu yang mendorong kemajuan bangsa.

## **Penutup**

Bela negara merupakan tonggak peradaban, tonggak patriotisme bagi segenap warga negara. Generasi muda adalah aset dalam membangun bangsa (modal pembangunan). Upaya membangun sikap bela negara pada mahasiswa melalui pendidikan di perguruan tinggi adalah penting, mengingat adanya globalisasi. Keberadaan *local wisdom* adalah alternatif dalam pendidikan di era globalisasi (Hidayah, 2019). Membangun sikap bela negara adalah pekerjaan yang tidak selesai hanya dari satu elemen, namun memerlukan kesinambungan dan pelak-

sanaan yang sistematis, agar tercapai sikap bela negara bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu Winarno (2013) mengungkapkan warga negara Republik Indonesia memiliki kewajiban bela negara sebagai upaya menangkal ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Bela negara diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Definisi bela negara dikaitkan dengan kearifan lokal, perkembangan ilmu pengetahuan tentang isu-isu terkini yang menjamur di masyarakat. Pembentukan karakter adalah bagian dari sikap bela negara, harus dilakukan sedini mungkin, dengan cara memupuk kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara—menghayati dan mengamalkan Pancasila. Generasi muda diharapkan memiliki jiwa rela berkorban dan memiliki karakter dan mental yang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Salah satu upaya pembentukan karakter sikap bela negara yang demokratis adalah melalui kegiatan pembinaan terhadap ketahanan masyarakat melalui pendidikan kebangsaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiyar, Shekhar, Jiaqian Chen, Christian H Ebeke, Roberto Garcia-Saltos, Tryggvi Gudmundsson, Anna Ilyina, Alvar Kangur, et al. "Goeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism." Staff Discussion Notes No. 2023/001, International Monetary Fund, 2023. <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2023/01/11/Geo-Economic-Fragmentation-and-the-Future-of-Multilateralism-527266>.
- Amaritasari, Indah Pangestu. "Post Truth and ROle of International Relation Study." *Journal of Social Political Sciences* 1, no. 2 (Mei 2020): 117–28. <http://e-journal.unas.ac.id/index.php/jsp/article/view/15>.
- Amaritasari, Indah Pangestu. "The Study on the Coronavirus Pandemic Using Human Rights and Human Security Approach." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (Agustus 2022): 215–34. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.215-234>.
- Amaritasari, Indah Pangestu. "Keamanan Nasional Dalam Konteks Isu-Isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional." *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 1 (2017): 109–32.

- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Revised. London - New York: Verso, 1991.
- Ashford, Emma, dan Evan Cooper. "Yes, The World is Multipolar and That Isn't Bad News For The United States." *Foreign Policy*, 5 Oktober 2023.
- Bastari, Achmad, Suhirwan Suhirwan, dan TSL Toruan. "Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Di Kabupaten Tangerang, Banten (Studi di Lantamal III/JKT)." *Strategi Perang Semesta* 4, no. 3 (2018): 19–36.
- Bastari, Achmad, Suhirwan Suhirwan, dan TSL Toruan. "Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara di Kabupaten Tangerang, Banten (Studi di Lantamal III/JKT)." *Jurnal Strategi Perang Semesta* 4, no. 3 (Desember 2018): 19–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.56555/sps.v4i3.290>.
- Blackburn, S. *On Truth*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Buzan, Barry. "Rethinking Security after the Cold War." *Cooperation and Conflict* 32, no. 1 (Maret 1997): 5–28.
- Caballero-Anthony, Mely. *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*. London: SAGE Publication, 2016.
- Carafano, James Jay. "Rapid advancements in military tech." Geopolitical Intelligence Services, 19 Januari 2022. <https://www.gisreportsonline.com/r/military-technology/>.
- Chappatta, Brian. "\$250 Trillion in Debt: The World's Post-Lehman Legacy." Bloomberg, 13 September 2018.

- <https://www.bloomberg.com/graphics/2018-lehman-debt/>.
- Colantone, Gianmarco, Ottaviano Italo, dan Piero Stanig. “The globalisation backlash.” Center for Economic Policy Research, 1 November 2021. <https://cepr.org/voxeu/columns/globalisation-backlash>.
- Collins, Alan. *Contemporary Security Studies*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Collins, Harry, Martin Weinel, dan Robert Evans. “The politics and policy of the Third Wave: new technologies and society.” *Critical Policy Studies* 4, no. 2 (28 Juli 2010): 185–201. <https://doi.org/10.1080/19460171.2010.490642>.
- Cribb, Robert. “The Historical Roots of Indonesia’s New Order: Beyond the Colonial Comparison.” In *Soebarto’s New Order and its Legacy: Essays in honour of Harold Crouch*, diedit oleh Edward Aspinall dan Greg Fealy, 67–80. Canberra Australia: ANU ePress, 2010.
- Cribb, Robert, dan Audrey Kahin. *Historical Dictionary of Indonesia*. Second Edi. Lanham, Maryland-Toronto-Oxford: Scarecrow Press, 2004.
- Crow, Graham, dan Maggie Laidlaw. “Norbert Elias’s extended theory of community: From established/outsider relations to the gendered we–I balance.” *The Sociological Review* 67, no. 3 (7 Mei 2019): 568–84. <https://doi.org/10.1177/0038026119829772>.
- Maeyer, Juliette De. “Towards a hyperlinked society: A critical review of link studies.” *New Media & Society* 15, no. 5 (Desember 2013): 737–51. <https://doi.org/10.1177/1461444812462851>.

- Derks, D., A. Bos, dan J. Grumbkow. "Emoticons in Computer-Mediated Communication: Social Motives and Social Context." *CyberPsychology & Behaviour* 11, no. 1 (2008): 99–101.
- Financial Times. "What Are the Economic Consequences of Donald Trump's Trade Wars?" *Financial Times*, 17 Agustus 2018. <https://www.ft.com/content/ec8f616e-9fd9-11e8-85da-ccb7a9ce36e4>.
- Friedman, George. *The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century*. New York: Doubleday, 2009.
- Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press, 1992.
- Fukuyama, Francis. "A Country of Their Own: Liberalism Needs the Nation." *Foreign Affairs* 101, no. 3 (Juni 2022): 80–91.
- Fuller, S. *Post Truth: Knowledge as a Power Game*. London: Anthem Press, 2018.
- Ganesh, Janan. "Anarchy is a likelier future for the west than tyranny." *Financial Times*, 21 Juni 2022. <https://www.ft.com/content/38dfc217-742e-4d7e-b926-0fdc937f9be4>.
- Goldberg, Pinelopi Koujianou. "What Stopped Globalization?," 20 September 2022. <https://www.project-syndicate.org/commentary/ukraine-war-end-of-globalization-by-pinelopi-koujianou-goldberg-2022-09?barrier=accesspaylog>.
- Gunawan, Aditya Batara. "Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Politik* 2, no. 2 (Februari 2017): 197–230. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.117>.

- Hama, Hawre Hasan. “State Security, Societal Security, and Human Security.” *Jadavpur Journal of International Relations* 21, no. 1 (Juni 2017).
- Hannan, J. “Trolling Ourselves to Death? Social Media and Post-Truth Politics.” *European Journal of Communication* 33, no. 2 (2018): 214–226.
- Hidayat, Safril. “Doktrin Pertahanan dalam Mewujudkan Keamanan Maritim: Perspektif Posmodernisme.” *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 5, no. 2 (2015): 71–92. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/358/0>.
- IMF. “World Economic Outlook Report October 2022: Countering the Cost-of-Living Crisis,” Oktober 2022. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022>.
- Indrawan, Jerry, dan M. Prakoso Aji. “Pendidikan Bela Negara sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 8, no. 3 (18 Desember 2018). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.437>.
- Irawatie, Aniek, Iswahyuni Iswahyuni, Tsabdany Tzarauliarany Anagusti, dan Hesty Fazar Afriani. “Analisis Konten Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Universitas Berbasis Karakter Bela Negara.” *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (Maret 2021): 128–39. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/930>.
- Istanti, Novita Dwi. “Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Masyarakat Berwawasan Bela Negara.” UPN Veteran Health Research Institute, Desember 2022. <https://upnveri.com/news/show/1912202232-pemberdayaan-tenaga-kesehatan-masyarakat-berwawasan-bela-negara>.

- Karnavian, Tito, dan Hermawan Sulistyو. *Democratic Policing*. Jakarta: Pensil-324, 2017.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Pemberdayaan SDM Komponen Pendukung Pertahanan Negara,” 10 April 2019. <https://www.kemhan.go.id/poathan/2019/04/10/pemberdayaan-sdm-komponen-pendukung-pertahanan-negara.html>.
- Kementerian PPN/ Bappenas. *Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur*. Jakarta: Kementerian PPN/ Bappenas, 2019.
- Khalil, Ashraf, Hassan Hajjdiab, dan Nabeel Al-Qirim. “Detecting Fake Followers in Twitter: A Machine Learning Approach.” *International Journal of Machine Learning and Computing* 7, no. 6 (Desember 2017): 198–202. <https://doi.org/10.18178/ijmlc.2017.7.6.646>.
- Liu, Qianer, Kathrin Hille, dan Yuan Yang. “World’s Top Chip Equipment Suppliers Halt Business with Chin.” *Financial Times*, 13 Oktober 2022. <https://www.ft.com/content/51f9ec46-ec9e-43a1-ba64-45e0e6e6da71>.
- Lockie, S. “Post-Truth Politics and the Social Sciences.” *Environmental Sociology* 3, no. 1 (2017): 1–5.
- Maklad, Hussein. “Great Powers Competition in Syria.” *Contemporary Arab Affairs* 15, no. 3–4 (2022): 54–77.
- Malcolm, Dominic. “Post-Truth Society? An Eliasian Sociological Analysis of Knowledge in the 21st Century.” *SAGE Journals* 55, no. 6 (Desember 2021): 1063–1079.
- Malthus, Thomas Robert. *An Essay on the Principle of Population*. London: J. Johnson, 1798.

- Masys, Anthony J. “Non-Traditional Security: A Risk-Centric View.” In *Handbook of Security Science*. Berlin: Springer, 2020.
- McIntyre, L. *Post-Truth*. Boston: MIT Press, 2018.
- Myrick, Jessica Gall, Avery E. Holton, Itai Himelboim, dan Brad Love. “#Stupidcancer: Exploring a Typology of Social Support and the Role of Emotional Expression in a Social Media Community.” *Health Communication* 31, no. 5 (3 Mei 2016): 596–605. <https://doi.org/10.1080/10410236.2014.981664>.
- OECD. “Fertility rates (indicator),” 2023. <https://doi.org/10.1787/8272fb01-en>.
- Owen, Taylor. *Human Security*. London: SAGE Publication, 2013.
- Paice, Edward. “By 2050, a quarter of the world’s people will be African – this will shape our future.” *The Guardian*, 20 Januari 2022. <https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/20/by-2050-a-quarter-of-the-worlds-people-will-be-african-this-will-shape-our-future>.
- Pollet, Thomas V, Sam G.B Roberts, dan Robin I.M Dunbar. “Use of Social Network Sites and Instant Messaging Does Not Lead to Increased Offline Social Network Size, or to Emotionally Closer Relationships with Offline Network Members.” *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 14, no. 4 (April 2011): 253–58. <https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0161>.
- Postman, N. *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*. New York: Penguin, 1985.

- Prasetyo, A. “Karakter Mahasiswa dan Tantangan Bela Negara di Era Global.” *Jurnal Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Karakter* 5, no. 1 (2019): 45–58.
- Prasetyo, A. “Karakter Mahasiswa dan Tantangan Bela Negara di Era Global.” *Jurnal Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Karakter* 5, no. 1 (2019): 45–58.
- Prihadi, Fierman, Yusa Djuyandi, dan Ari Ganjar Herdiansah. “Interoperabilitas dalam Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh TNI AU dalam Menangani Pembajakan dan Perompakan Bersenjata (Kajian Keamanan di Selat Malaka).” *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2022): 135–43. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i2.39589>.
- Prince Michael of Liechtenstein. “The new geopolitical play.” Geopolitical Intelligence Services, 12 Januari 2023. <https://www.gisreportsonline.com/r/geopolitical-multipolarism/>.
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia since c.1200*. Third Edit. Palgrave, 2001.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Diterjemahkan oleh Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Saith, Ashwani. “Inequality, Imbalance, Instability: Reflections on a Structural Crisis.” *Development and Change* 42, no. 1 (2011): 70–86.
- Schindlera, Seth, Ilias Alamib, Jessica DiCarloc, Nicholas Jepsona, Steve Rolfd, Mustafa Kemal Bayırbağe, Louis Cyuzuzoa, et al. “The Second Cold War: US-China Competition for Centrality in Infrastructure, Digital, Production, and Finance Networks.” *Geopolitics*,

- September 2023. <https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2253432>.
- Schnabel, Isabel. "A new age of energy inflation: climateflation, fossilflation and greenflation." In *Monetary Policy and Climate Change at The ECB and its Watchers XXII Conference*. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2022. [https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317\\_2~dbb3582f0a.en.html](https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317_2~dbb3582f0a.en.html).
- Singer, Merrill. "A dose of drugs, a touch of violence, a case of AIDS: Conceptualizing the Sava Syndemic." *Free Inquiry in Creative Sociology* 24, no. 2 (Mei 1996). <https://ojs.library.okstate.edu/osu/index.php/FICS/article/view/1346>.
- Singh, Ningthoujam Koiremba, dan William Nunes. "Nontraditional Security: Redefining State-Centric Outlook." *SAGE Publication* 20, no. 1 (2016): 1–23.
- Smith, Anthony D. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Blackwell Publishing, 1986.
- Stewart, Benjamin. "A Case For Open Science In Indonesia: Advancing Digital Literacy, Scientific Infrastructure, and Leadership." *Research on Digitalisation*. Jakarta, 2023. <https://www.csis.or.id/publication/a-case-for-open-science-in-indonesia-advancing-digital-literacy-scientific-infrastructure-and-leadership/>.
- Sutcliffe, Alistair G., Jens F. Binder, dan Robin I.M. Dunbar. "Activity in Social Media and Intimacy in Social Relationships." *Computers in Human Behavior* 85 (Agustus 2018): 227–235. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.050>.

- Thahir, Riyal Faraby, Colle M. Said, dan Muh. Rizal Masdul. "Implementasi Usaha Bela Negara terhadap Kesadaran Sosial Masyarakat di Desa Modo dalam Tinjauan Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (September 2019): 803–12. <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.732>.
- The Guardian. "Richest 1% on target to own two-thirds of all wealth by 2030," 7 April 2018. <https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030>.
- Tian, Nan, Diego Lopes da Silva, Xiao Liang, Lorenzo Scarazzato, Lucie Béraud-Sudreau, dan Ana Assis. "Trends in World Military Expenditure, 2022." *Stockholm Internasional Peace Research Institute (SIPRI)*, April 2023. <https://doi.org/10.55163/PNVP2622>.
- Tohari, Imam, Daniel Guyana, dan Christian Christian. "Urgensi Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Guna Mendorong Modernisasi Alutsista Militer dalam Menjaga Keamanan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (Agustus 2023): 2614–8854. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2632>.
- Tooze, Adam. "Welcome to the world of the polycrisis." *Financial Times*, 28 Oktober 2022. <https://www.ft.com/content/498398e7-11b1-494b-9cd3-6d669dc3de33>.
- United Nations. "World Population Prospects 2022." *Department of Economic and Social Affairs*. New York, 2022. <https://population.un.org/wpp/>.
- United Nations Education Scientific Culture Organization (UNESCO). "Launch of the 2022 Survey of Research

- and Experimental Development Statistics for SDG 9.5.” UNESCO Institute of Statistics, 9 Juni 2022. <https://uis.unesco.org/en/news/launch-2022-survey-research-and-experimental-development-statistics-sdg-9-5>.
- Dijck, José van. “Digital photography: communication, identity, memory.” *Visual Communication* 7, no. 1 (Februari 2008): 57–76. <https://doi.org/10.1177/1470357207084865>.
- Vermeiren, Mattias. *Power and Imbalances in the Global Monetary System: A Comparative Capitalism Perspective*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Widodo, J. “Implementasi Nilai-nilai Bela Negara dalam Pendidikan Tinggi.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 12, no. 2 (2020): 112–25.
- Widodo, J. “Implementasi Nilai-nilai Bela Negara dalam Pendidikan Tinggi.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 12, no. 2 (2020): 112–25.
- World Bank. *World Development Report (WDR) 2019: The Changing Nature of Work*. Washington: World Bank Publications, 2019.
- World Economic Forum. *The Global Risk Report 2023*. Geneva: World Economic Forum, 2023. <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/>.
- World Trade Organization. “Report shows increase in trade restrictions amidst economic uncertainty, multiple crises.” World Trade Organization, 6 Desember 2022. [https://www.wto.org/english/news\\_e/news22\\_e/tmwto\\_06dec22\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/tmwto_06dec22_e.htm).
- Yuliarta, I Wayan, dan Hayatul Khairul Rahmat. “Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Teknologi Sebagai Upaya Memperkuat

Keamanan Maritim di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 180–189. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.3228>.

Yusuf, M. *Pendidikan Kebangsaan. Wacana dan Implementasi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Yusuf, M. *Pendidikan Kebangsaan. Wacana dan Implementasi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Zambakari, Christopher. “War in Ukraine: US, Russia, China and the Return of the Multipolar World (Vol. 1).” In *The Great Power Competition in Eurasia*, diedit oleh C. Zambakari, S. Des Georges, E. Giraud, G. Mannino, dan N. Meresz, 132–45. Phoenix, Arizona: The Zambakari Advisory, 2023. <https://ssrn.com/abstract=4470435>.

# INDEKS

## A

AFTA 77  
Amerika Serikat 35, 69, 70, 71, 72,  
73, 93, 94  
Anderson  
    Benedict 6, 12, 13  
Arab Spring 86  
*artificial intelligence* 61  
ASEAN 77, 79, 131  
Asia Tengah 72  
Asia Tenggara 15, 63, 66  
Asia Timur 16, 63, 79

## B

Bakohumas 128  
Belanda 14, 15, 16, 171  
Benua Afrika 63, 66  
bipolar 69, 70  
Bismarck  
    Otto von 4  
Brexit 76, 77  
BRIN 130  
Buddha 19, 20

## C

China 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73,

74, 76, 79, 94

Chomsky  
    Noam 35  
Clausewitz 47, 50, 52, 53  
    Carl von 46, 48, 49  
Covid-19 61, 76, 77, 78  
Cribb 19, 20  
    Robert 14, 18  
CSIS 131  
*cybersecurity* 52

## D

Demokrasi Terpimpin 17  
desentralisasi 17

## E

*environmental security* 101  
Eropa 1, 14, 16, 29, 64, 66, 69, 70,  
72, 77, 88

## F

Finland 57  
Friedman 63  
Fukuyama  
    Francis 68, 69

## G

*global citizens* 11  
globalisasi 4, 5, 24, 56, 57, 58, 76,  
99, 147, 148, 175  
*global security* 102  
Global Trade Alert 76  
gotong royong 136, 139

## H

Hafner  
Robert W. 20  
hak asasi manusia 10, 11, 17, 25,  
26, 100, 168  
Hatta 9, 16, 18  
Hindia Timur Belanda 16  
*human security* 99, 100, 109  
Huntington  
Samuel P. 34

## I

*imagined communities* 6, 12  
imperialisme 29, 30, 31  
Indonesia Emas 122, 123  
International Monetary Fund 75  
Islam 16, 19, 20, 35, 129

## J

Jawa 7, 16, 91  
Jepang 15, 16, 65  
Jerman 4, 73

## K

Kanada 57  
keamanan manusia 98, 100, 109,  
110

kedaulatan 1, 2, 5, 6, 21, 22, 23,  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,  
39, 40, 46, 47, 48, 49, 50,  
51, 52, 53, 54, 56, 57, 79,  
83, 86, 87, 99, 111, 112,  
121, 125, 153, 155, 156,  
158, 167, 168, 169, 170  
kloning manusia 94  
kolonialisme 29, 30, 31, 34, 35  
konflik berbasis budaya 35, 36  
konflik Israel-Palestina 62, 71  
Kopenhagen  
mazhab 98  
Korea Selatan 65, 106

## L

Laut China Selatan 72, 74  
Lord Acton 87

## M

Mahathir Mohammad 92  
Majapahit 9, 15, 19  
Malthus  
Thomas Robert 64  
MBKM 44, 125, 126, 136  
media sosial 10, 12, 38, 52, 59,  
115, 117, 118, 153  
multipolar 67, 68, 69, 72

## N

nasionalisme 3, 4, 6, 9, 13, 31,  
130, 149, 165, 166  
nasionalisme etnis 6  
nasionalisme metodologis 130  
*national defense* 2  
*nation-state* 1, 2, 83, 88, 165

- negara-bangsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,  
 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20,  
 21, 22, 26, 34, 35, 36, 38,  
 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52,  
 53, 55, 56, 57, 58, 59, 83,  
 84, 86, 88, 92, 130  
 negara G20 106  
*New Cold War* 70  
 Norwegia 57, 58  
 Nye 26, 28, 30  
   Joseph 23, 24, 25, 27, 29, 31,  
   32, 33
- O**
- open science* 130, 131  
 operasi militer 51  
 Orde Baru 17, 50  
 Organisasi Perdagangan Dunia 76  
 Organization for Economic  
   Cooperation and  
   Development 65
- P**
- Pancasila 18, 21, 26, 38, 39, 136,  
 139, 166, 176  
 Papua 55, 91  
 patriotisme 38, 45, 56, 144, 145,  
 165  
 pendidikan kewarganegaraan 43  
 Perang Asia Timur Raya 16  
 perang dingin 35, 69, 103  
 perang Hamas-Israel 88  
 Perang Hibrid 51  
 Perang Rusia-Ukraina 72  
 Perjanjian Paris 58  
 Pertempuran Mosul 71  
 pluralisme 35, 55, 59, 102
- polikrisis 62  
 post-truth 114, 115, 117, 118, 119,  
 120, 131, 132, 133  
 Prancis 4  
 Pricewaterhouse Cooper 84  
*proxy war* 71
- R**
- referent object* 98, 99, 100, 101, 102,  
 103  
 revolusi industri 125  
 Ricklefs 14, 15, 18, 20  
 Rousseau 23, 26, 28, 30, 33  
   Jean-Jacques 22, 25, 27, 29, 31  
 Rusia 62, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77
- S**
- Samudra Hindia 74  
 Samudra Pasifik 74  
 Skandinavia 58  
 Smith 7, 10  
   Anthony D. 6, 8, 9, 11  
*societal security* 102  
 Soekarno 9, 16, 17, 18  
 Sriwijaya 15, 19  
*stateless* 84  
 Suriah 71, 72
- T**
- terorisme 34, 36, 37, 40, 54, 120,  
 121, 154, 165  
 The Global Risk Report 105, 106,  
 108, 120  
 Timur Tengah 70, 72  
 Tingkat Fertilitas Total 64  
 toleransi 21, 35, 36, 55, 125, 136,  
 139, 147

**U**

Ukraina 62, 71, 72, 73, 76, 77, 88  
UNCTAD 79  
unipolar 69  
Uni Soviet 69, 70, 97

**V**

VOC 16, 171

**W**

Westphalen 83  
Westphalia  
perjanjian 83  
World Population Prospects 63,  
64  
WTO 76

## TENTANG TIM PENYUSUN

**Hermawan Sulisty**o, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) dan Pusat Kajian Bela Negara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Akrab dipanggil “Kikiek”. Ph.D Ilmu Sejarah khususnya Southeast Asia lulusan Arizona State University (ASU), Tempe Arizona, Amerika Serikat. Profesor Emeritus Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pernah bekerja sebagai jurnalis dan pecinta karate. Telah menulis banyak artikel, esai, dan buku. Tulisannya banyak tersebar di media cetak dan online: *Kompas*, *Tempo*, *The Jakarta Post*, dan lainnya. Beberapa bukunya: *LAWAN: Jejak Jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto* (Pensil-324, 2002); *Palu arit di ladang tebu : Sejarah pembantaian massal yang terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)* (KPG, 2000); *Bom Bali: Fakta dan Pengungkapan* (Pensil-324); *Intercourse with Tragedy* (Pensil-324, 2016).

**Djuni Thamrin Sarkawi**, mendalami berbagai isu pembangunan seperti keamanan non-tradisional, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan desa dan agraria. Dia juga meminati isu HAM dan demokrasi. Ia berpengalaman panjang dalam melakukan fasilitasi dan pelatihan untuk program pembangunan. Salah satunya pada Training of Preparing Urban Climate Change Adaptation Project Proposal in Indonesia (2017). Gelar doktor jurusan Social Work

diperoleh dari University Sains Malaysia (2013) dan master Social Development didapatkan dari Ateneo De Manila University (2000) serta Insinyur sosial ekonomi pertanian dari IPB tahun 1987. Sekarang ia mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan menjadi sekretaris Pusat Kajian Bela Negara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

**Diah Ayu Permatasari**, Doktor Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Bandung. Aktif meneliti dan menulis buku, di samping menjadi narasumber pada berbagai seminar dan talk show. Mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelumnya menjadi pengajar tamu di Moscow State University (MGU), Moscow (2013-2014). Peneliti pada Centre of Indonesia Risk Studies, Jakarta (2015-2017). Pada 2019 menjadi dosen tetap di Universitas President University Program Studi Hubungan Internasional dan Pascasarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Hasil penelitiannya diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Karya buku: *Cambodia 60 Years of Friendship: Moving Forward: Coffeplomacy As A Tool reconnect The Cooperation Between Indonesia and Cambodia* (Embassy of the Republic of Indonesia in Phnom Penh, 2020); *Menuju kemandirian energi: peran Indonesia di Forum Multilateral G-20* (Pensil-324, 2020).

**Indah Pangestu Amaritasari**, profesional dengan latar belakang pendidikan magister dalam teori dan praktik hak asasi manusia dari Universitas Oslo, Norwegia, dengan pengalaman lebih dari lima belas tahun. Pernah mengajar di Universitas Nasional mata kuliah Politik Internasional dan HAM. Indah aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, mata kuliah HAM, Hukum Internasional, dan

Hukum Tindak Pidana Terorisme. Selain mengajar juga selaku peneliti di Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) dan Pusat Kajian Bela Negara Ubhara Jaya. Konsultan pada beberapa proyek berskala nasional dan internasional, seperti pengembangan Rancangan Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk menanggulangi ekstremisme kekerasan. Member of The Advisory board for UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime). Tim Penyusun Dokumen I-KHub BNPT *Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook* (2023).

**Aly Ashghor**, dosen dan *Associate Researcher* di Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain menulis di Jurnal, beberapa buku yang pernah ditulis, antara lain: *Men-Teroris-Kan Tuhan! Gerakan Sosial Baru* (2014), *Jamaah Ansbarut Daulah: Tinjauan Ideologi dan Gerakan* (2023), *Gelombang Terorisme di Indonesia: Sekuritisasi dan Dilema Keamanan* (2023). Dia juga menulis kolom opini di surat kabar atau koran, di antaranya: *Mengimplementasikan Khittah NU Secara Murni dan Konsekuen* (Sindo, 2021), dan *Wajah Aparat Keamanan di Tragedi Kanjuruhan* (Jawa Pos, 2022), dll.

**Sumarno**, bekerja sebagai staf Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak 2017, setelah sebelumnya aktif sebagai jurnalis. Mengawali karir di Harian Jayakarta 1991 hingga 1998, lantas ke Harian Mandiri, satunet.com, dan Radio Tri Jaya FM, Radio 911 Suara Metro, dan Majalah Suara Pemred. Menulis buku Partai Politik Peserta Pemilu 1999 bersama Forum Diskusi Wartawan Politik (FDWP), biografi Suluh dari Lampung. Di industri perbukuan, pernah menjadi tim penulis di Concern 324, dan Managing Editor di Bumen Pustaka Emas (2015).

**Supriadi**, Associate Puskamnas UBJ. Pekerja buku pada 2010 hingga 2016, editor dan layoter di penerbit Pensil-324. Aktif menulis sejak tergabung di Concern (Consultancy and Reserch Network). Bekerja di Ubhara Jaya rentang 2016–2022—staf Lembaga Penelitian kemudian Staf Spri Rektor, sebelum akhirnya pulang berkebun ke kampung istri, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Buku terakhir yang dikerjakan: *Desa Membangun; Mengembalikan Hak Petani* (Editor), 2024.

**Ika Prabandini Arianingsih**, bekerja di Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 2016. Alumni Hubungan Masyarakat Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Sebelumnya pernah bekerja di Gandhi International School dan Tunas Group. Di Puskamnas UBJ di antaranya pernah terlibat aktif dalam tim Kajian Desain Strategi Active Defense dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba (2020) dan tim riset Presisi (2022).